

# **PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAMPAK BENCANA MERAPI BIDANG KEPENDUDUKAN**

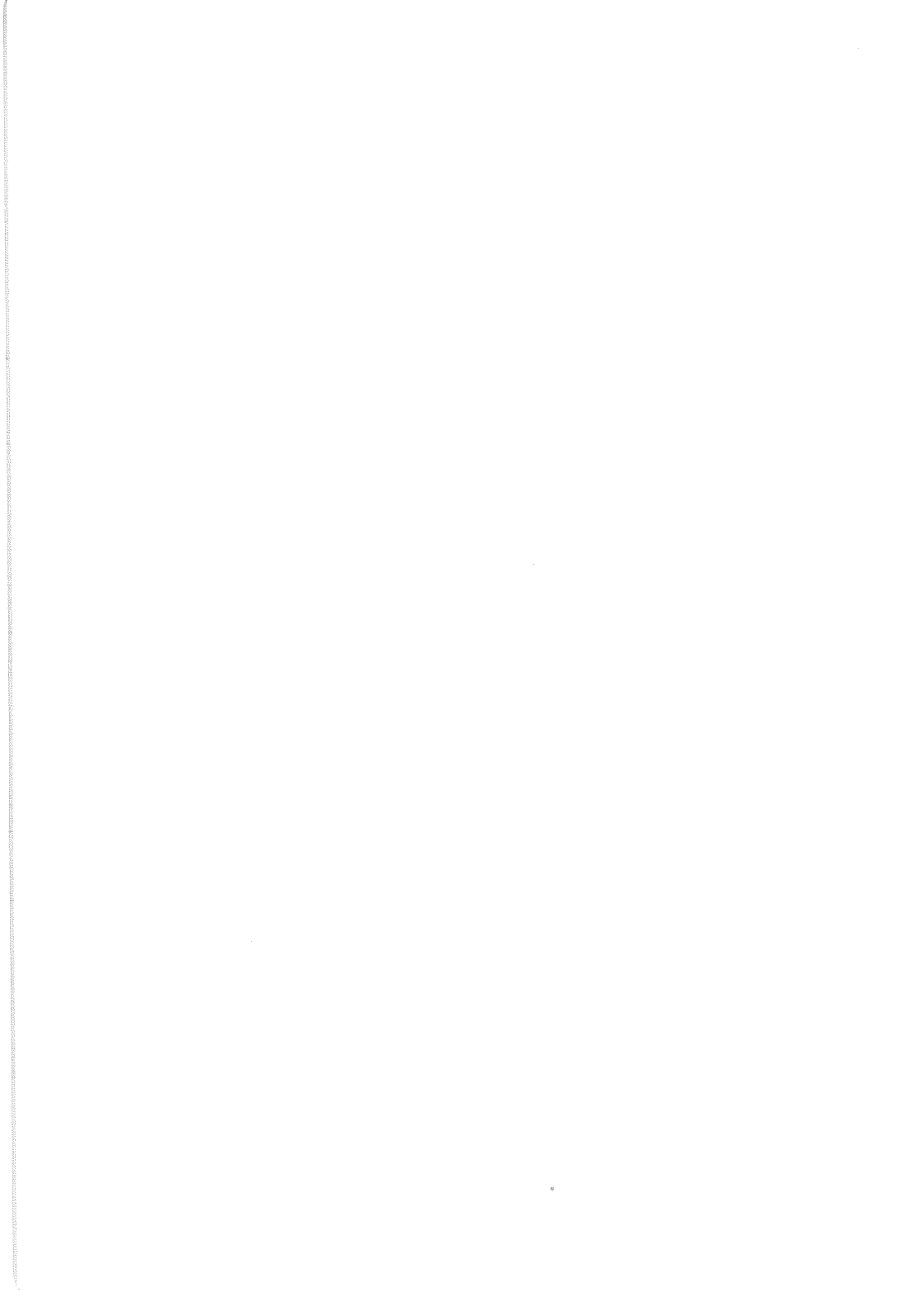
Tim Peneliti:

Gutomo Bayu Aji  
Titik Handayani  
YB. Widodo  
Ade Latifa  
Vanda Ningrum



LIPI

**PUSAT PENELITIAN KEPENDUDUKAN  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
(PPK-LIPI)  
2011**



## KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan hasil dari suatu kajian tentang Penanggulangan Kemiskinan Dampak Bencana Merapi yang ditinjau dari Perspektif Kependudukan. Penelitian ini dipandang penting karena mengkaji dampak bencana merapi terhadap kehidupan masyarakat yang paling vital dari perspektif kependudukan yaitu terkait dengan empat aspek kebutuhan dasar yang menjadi fokus kajian yaitu mata pencaharian, kesehatan, pendidikan dan aset rumah tangga. Erupsi Merapi yang terjadi antara bulan Oktober – November 2010 tercatat yang paling besar dalam sejarah kebencanaan Merapi. Dampak yang ditimbulkan tidak saja berupa kerugian material akibat rusaknya atau hilangnya tempat tinggal dan infrastruktur lainnya, namun juga telah merenggut 386 korban jiwa, korban luka bakar tercatat 364 jiwa. Jumlah pengungsi mencapai sekitar 300.000 jiwa yang tersebar di 500 titik-titik pengungsian.

Bencana Merapi tidak saja membawa perubahan dalam tata ruang kawasan Merapi namun juga perubahan dalam tata kehidupan warga masyarakat yang menjadi korban. Wilayah yang terkena dampak langsung erupsi Merapi, khususnya kawasan rawan bencana (KRB III), terutama di Area Terdampak Langsung (ATL) I dan II yang menghadapi persoalan berat karena roda perekonomian dan kehidupan masyarakat menjadi lumpuh total. Pendekatan relokasi kemudian digunakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DIY dan Kabupaten Sleman terhadap korban erupsi Merapi, khususnya bagi warga yang bermukim di wilayah ATL I. Pendekatan relokasi ini oleh sebagian warga desa di wilayah ATL I dirasakan kurang tepat. Beragam persoalan kemudian dihadapi oleh masyarakat yang mencoba bertahan di lahannya di wilayah ATL I tersebut.

Penelitian ini tidak saja mengangkat isu kemiskinan dilihat dari perspektif kependudukan, tetapi juga mengkaji persoalan

pendekatan relokasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Merapi yang telah menimbulkan implikasi yang sangat serius terhadap korban yang menolak relokasi. Dengan demikian, penelitian juga menghasilkan suatu pemikiran untuk penataan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan mengakomodasi pengalaman masyarakat yang lebih mengedepankan konsep *living in harmony with risk*.

Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kependudukan- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia berlangsung dengan pendanaan dari DIPA tahun anggaran 2011. Dengan selesainya laporan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tidak saja dari segi informasi untuk pemahaman tentang permasalahan kemiskinan dari aspek kependudukan, namun juga dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk penyusunan rekomendasi kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagai dampak bencana Merapi.

Terlaksananya kegiatan penelitian ini hingga selesainya penulisan laporan tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Ucapan terima kasih kami tujukan pada lembaga pemerintah pusat dan daerah, pihak akademisi, lembaga swasta serta masyarakat yang telah membantu dalam memberikan informasi, data dan saran. Kepada peneliti PPK-LIPI yang terlibat serta seluruh staf penunjang yang mendukung perencanaan, pelaksanaan penelitian dan penulisan laporan kajian ini, kami juga mengucapkan terima kasih.

Jakarta, Desember 2011

Kepala Pusat Penelitian Kependudukan  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Dr. Sri Sunarti Purwaningsih, MA  
NIP. 196105211987032001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	4
C. Tujuan Dan Sasaran .....	11
D. Metodologi.....	11
<b>BAB II DAMPAK BENCANA MERAPI TERHADAP KEMISKINAN.....</b>	<b>15</b>
A. Dampak Erupsi Merapi Terhadap Aset Rumah Tangga.....	15
B. Aspek Ekonomi Dan Matapencarian Wilayah Bencana Merapi: Kabupaten Sleman.....	32
C. Dampak Erupsi Merapi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan .....	45
D. Dampak Erupsi Merapi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan .....	
<b>BAB III PEMULIHAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN .....</b>	<b>81</b>
A. Strategi Pemulihan Atas Kehilangan Aset Rumah Tangga.....	81

B. Pemulihan Mata Pencaharian dan Rencana Relokasi Desa.....	92
C. Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan .....	96
D. Upaya Penanganan Kesehatan .....	98
BAB IV PENUTUP .....	105
DAFTAR PUSTAKA .....	115
LAMPIRAN .....	119

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Penduduk Di Kawasan Rawan Bencana Merapi .....	18
Tabel 2.2.	Kondisi Perumahan Daerah Zona Ancaman Merapi .....	20
Tabel 2.3.	Komposisi Penggunaan Lahan .....	22
Tabel 2.4.	Jumlah Korban Jiwa Akibat Erupsi Gunung Api Merapi 2010 .....	24
Tabel 2.5.	Kerusakan Rumah Akibat Erupsi Merapi 2010 .....	25
Tabel 2.6.	Kerusakan Ekonomi Produktif Akibat Erupsi Merapi 2010 (Jutaan Rupiah).....	29
Tabel 2.7.	Kerusakan Ekonomi Produktif Akibat Erupsi Merapi 2010 (Jutaan Rupiah).....	21
Tabel 2.8.	Sekolah Yang Berlokasi di Zona Ancaman Bahaya Merapi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah .....	48
Tabel 3.1.	Strategi Masyarakat dalam Pemulihan Aset Pasca Bencana Untuk Perumahan dan Ekonomi.....	83





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada bulan Oktober-Desember 2010, ketegangan di lereng Gunung Merapi mengalami peningkatan. Menyusul pengumuman dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menyatakan bahwa status Gunung Merapi mengalami peningkatan dari status waspada menjadi siaga dan awas. Sejumlah stasiun televisi menjadikannya *breaking news* dan menyiarkannya secara *live* ke seluruh penjuru tanah air.

Tepat pukul 17.02 WIB tanggal 26 Oktober 2010, Gunung Merapi meletus. Penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana Merapi telah diungsikan. Seperti biasa, pengungsi diampung sementara di gedung sekolah, balai pertemuan, lapangan sepakbola dan tempat lapang lainnya karena tidak ada tempat khusus untuk pengungsi letusan Gunung Merapi. Penduduk yang enggan diungsikan hanya bertahan di rumahnya masing-masing dengan senantiasa waspada membaca tanda-tanda alam dari Gunung Merapi dan pengumuman PVMBG di stasiun televisi.

Sementara itu di pengungsian, berbagai macam bantuan mengalir dari seluruh penjuru tanah air. Solidaritas terhadap korban bencana Merapi menarik perhatian pemirsa di seluruh penjuru tanah air karena *blow up* media massa walaupun pada saat itu juga terjadi bencana banjir bandang Wasior dan tsunami Mentawai. Tak segan-segan sejumlah bendera partai politik bahkan ditancapkan di posko-

posko bantuan Merapi sebagai tanda identitas kepartaian sekaligus eksistensi partai politik dalam ajang kontestasi merebut suara korban.

Sepuluh hari kemudian tepatnya tanggal 5 November 2010, Gunung Merapi kembali meletus. Awan panas yang meluncur dari puncak Merapi kali ini mengarah ke Dusun Kinahrejo. Sungguh tak terduga, awan panas itu telah menghanguskan seluruh isi perkampungan Dusun Kinahrejo, termasuk juru kunci Merapi: Mbah Marijan. Mayat-mayat manusia bergelimpangan, bangkai ternak teronggok di reruntuhan, rumah-rumah dan pepohonan hancur terbakar awan panas. Duka yang menyelimuti masyarakat di lereng Merapi semakin dalam. Raut wajah pilu pengungsi tampak jelas dari sorotan kamera televisi dan foto-foto yang dipampang di surat kabar harian.

Beberapa hari kemudian, tepat pada tengah malam awan panas Merapi kembali meluncur dengan kecepatan 90 km/jam. Arah luncuran kembali tak terduga, kali ini ke arah Dusun Bronggang yang berjarak 15 km dari puncak Merapi. Dusun ini sebelumnya dianggap aman sehingga banyak pengungsi di evakuasi di dusun ini. Korban jiwa kembali berjatuhan, sebagian perkampungan Dusun Bronggang hangus terbakar oleh awan panas. Mereka yang masih bisa diselamatkan diangkut dengan ambulance ke rumah-sakit terdekat dengan kondisi tubuh yang sangat mengenaskan.

Luncuran awan panas yang meluas ke Dusun Kinahrejo dan Dusun Bronggang membuat masyarakat di sekitar Gunung Merapi semakin panik. Mereka yang sebelumnya bertahan di rumah masing-masing segera angkat kaki seiring dengan pengumuman PVMBG yang menyatakan bahwa radius daerah rawan bencana Gunung Merapi semakin luas dari 5 km menjadi 10 km, 15 km dan 20 km dari puncak Merapi. Jumlah pengungsipun membengkak mencapai lebih dari 300 ribu jiwa, terbesar dalam sejarah pengungsi letusan Merapi. Sampai

bulan Desember 2010, korban jiwa akibat letusan Gunung Merapi tercatat mencapai 386 orang, terbesar dalam sejarah letusan Merapi.

Suasana mencekam di lereng Gunung Merapi yang terjadi pada akhir tahun 2010 itu masih terasa dari dampak kerusakan yang ditimbulkannya. Kini walaupun erupsi Merapi telah mereda tapi masih menyisakan banjir lahar dingin. Sebagian masyarakat sudah kembali ke perkampungan mereka. Namun sebagian yang lain yang wilayahnya hangus terbakar oleh awan panas masih berada di penampungan. Pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan rekonstruksi dan rehabilitasi wilayah yang hangus terbakar oleh awan panas, sementara pengungsinya ditempatkan di *shelter* yang sekarang sedang dalam proses pembangunan.

Selama erupsi Merapi yang terjadi antara bulan Oktober-Desember 2010, penduduk sekitar yang tewas akibat awan panas dan material vulkanik mencapai 386 orang. Penduduk tewas terbanyak tinggal di dusun Kinahrejo dan Bronggang di wilayah Kecamatan Cangkringan, Sleman, DIY. Selain itu, penduduk satu dusun tertimbun aliran lahar dingin di wilayah Muntilan, Jawa Tengah. Sedangkan penduduk yang mengungsi tercatat lebih dari 300.000 jiwa. Dari jumlah penduduk yang tewas maupun penduduk yang mengungsi pada erupsi kali ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah erupsi Merapi.

Sebagian besar penduduk yang mengungsi telah kembali ke rumah masing-masing kecuali penduduk yang berasal dari dusun-dusun yang terkena dampak langsung awan panas yaitu penduduk Dusun Kinahrejo dan Bronggang. Mereka ditampung oleh pemerintah daerah di lokasi penampungan sementara (*shelter*) selama perkampungan mereka direhabilitasi dan direkonstruksi kurang lebih selama dua tahun. Dusun Kinahrejo dan 135 KK di wilayah Kabupaten Klaten beberapa waktu lalu telah ditetapkan oleh pemerintah daerah akan direlokasi.

Kehidupan penduduk paska erupsi mengalami perubahan akibat kehilangan jiwa yang diantaranya merupakan penopang ekonomi rumah-tangga dan kemerosotan akibat berbagai kerusakan mulai dari skala kecil seperti kerusakan tanaman pertanian, ternak, perkebunan, permukiman, asset serta harta benda, hingga skala besar berupa kehancuran total seperti Dusun Kinahrejo. Dampak bencana ini terhadap perekonomian rumah-tangga juga terjadi pada berbagai tingkatan mulai dari kerugian hingga kehilangan sumber-sumber mata pencaharian, jaminan kesehatan, pendidikan serta asset-asset berharga.

Kemiskinan yang tiba-tiba akibat bencana ini sedang mengancam penduduk yang terkena dampak terutama yang kehilangan sumber-sumber penghidupan tersebut. Mereka juga kehilangan modal sosial yang paling berharga untuk menjalankan roda kehidupan yang selama hidupnya telah terbangun secara tradisional melalui mekanisme-mekanisme social di tengah masyarakat. Modal sosial ini yang menopang jaminan sosial masyarakat tradisional antara lain berupa bantuan untuk berbagai keperluan mendesak seperti pendidikan, kesehatan, social, keluarga dan lainnya. Lingkungan dan sanitasi seperti ketersediaan air bersih serta infrastruktur lainnya yang hancur juga berpengaruh terhadap kondisi perekonomian rumah-tangga sekarang.

## **B. Permasalahan**

Deskripsi singkat diatas dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai besarnya bencana yang diakibatkan oleh letusan Gunung Merapi, cara respon masing-masing pihak dan manajemen dalam menangani bencana Merapi serta pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa tersebut. Kita tahu bahwa letusan Gunung Merapi telah terjadi puluhan atau bahkan ratusan tahun yang lalu dan selalu berulang sampai sekarang bahkan mempunyai siklus yang bisa diprediksikan. Dari pengalaman inilah paling tidak kita semua bisa

belajar cara-cara menangani bencana Merapi untuk mengurangi risiko yang lebih besar.

Berbagai respon dan manajemen yang secara keseluruhan ditujukan untuk menangani bencana Merapi tersebut di dalam kajian ini dirumuskan sebagai strategi tanggap bencana Merapi. Berdasarkan waktu peristiwanya, strategi tanggap bencana Merapi dapat dipilah menjadi dua kelompok yaitu, pertama, strategi tanggap bencana Merapi selama terjadinya erupsi Merapi, dan kedua, strategi tanggap bencana Merapi paska erupsi Merapi. Dua kelompok ini memiliki permasalahan yang berbeda yang akan diuraikan sebagai berikut:

**a. Keterlambatan mengantisipasi bencana**

Keterlambatan mengantisipasi bencana yang diakibatkan oleh letusan Gunung Merapi juga bisa dikatakan sebagai keterlambatan merespon kemungkinan terjadinya bencana di daerah itu. Peristiwa yang terjadi di Dusun Bronggang merupakan contoh keterlambatan “otoritas Merapi” dalam hal ini adalah PVMBG melakukan antisipasi sehingga jatuh korban jiwa yang sangat besar. Hal ini terkait dengan penetapan status daerah rawan bencana yang dinyatakan oleh PVMBG yang mana Dusun Bronggang sebelumnya dikategorikan diluar daerah rawan bencana namun pada kenyataannya diterjang awan panas sehingga PVMBG mengubah radius daerah rawan bencana dari 10 km menjadi 15 km dan kemudian menjadi 20 km.

**b. Tidak efektifnya komunikasi antara pemerintah dengan warga dalam melakukan evakuasi**

Selama erupsi Merapi berlangsung, proses evakuasi berjalan lambat. Hal ini terjadi karena proses komunikasi antara pemerintah baik yang disampaikan oleh PVMBG dan pemerintah daerah setempat dengan warga tidak efektif. Banyak warga yang

engganan atau bahkan menolak di evakuasi dari daerah rawan bencana Merapi karena menganggap masih aman. Persoalan ini kemungkinan terjadi karena berbagai hal antara lain adalah, pesan atau materi informasi mengenai daerah rawan bencana itu tidak tersosialisasikan secara efektif sehingga tidak diterima oleh warga dengan baik, keengganan warga dievakuasi sementara di posko-posko pengungsian karena kondisi pengungsian yang dianggap kurang layak, keamanan aset seperti rumah dan ternak yang ditinggalkan oleh warga kurang mendapatkan jaminan, dan kepercayaan warga terhadap tanda-tanda alam dalam membaca bahaya letusan Gunung Merapi.

**c. Tidak adanya standar dalam penanganan pengungsi**

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah tidak memiliki standar dalam penanganan pengungsi. Hal ini terlihat sejak dari proses evakuasi, penyediaan tempat yang akan menjadi posko-posko pengungsian sampai pada pelayanan kebutuhan hidup pengungsi. Proses penanganan pengungsi ini tidak memiliki standar yang baku sehingga BNPB dan pemerintah daerah terkesan sangat mendadak atau insidental. Padahal peristiwa letusan Gunung Merapi adalah peristiwa alam yang berulang yang terjadi sejak ratusan tahun yang lalu dan bahkan sudah bisa diprediksi siklus letusannya. Proses penanganan pengungsi yang terjadi beberapa waktu yang lalu masih mengandalkan solidaritas warga sehingga peran negara dalam hal ini pemerintah terkesan sangat lemah.

**d. Obyektivikasi korban**

Selama peristiwa erupsi Merapi, masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana Merapi lebih dilihat sebagai korban yang harus ditangani, bukan dilihat sebagai aktor yang mempunyai

kapasitas untuk mengatasi bencana secara mandiri. Perspektif ini telah menempatkan masyarakat itu sebagai obyek sehingga menciptakan ranah bagi kebijakan pemerintah, politik bantuan, dan obyektivikasi yang berlebihan melalui media massa. Korban bahkan dilihat sebagai tontonan dan obyek wisata. Hal ini menimbulkan kelelahan dan bisa mengubah persepsi masyarakat terhadap penanganan bencana.

**e. Pro dan kontra pemindahan penduduk**

Isu pemindahan penduduk selalu muncul pada setiap letusan Gunung Merapi khususnya paska erupsi. Isu ini telah muncul sejak lama setidaknya sejak tahun 1994 setelah “peristiwa Turgo”. Isu ini biasanya diangkat oleh media massa dengan mengemas pernyataan individu ataupun institusi pemerintah sehingga menimbulkan sikap pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dalam peristiwa letusan Gunung Merapi tahun 2010 ini misalnya, beredar selebaran gelap yang menolak pemindahan penduduk di sekitar Kinahrejo. Isu pemindahan penduduk selama ini dilekatkan dengan istilah “penggusuran”. Sikap pro dan kontra yang berkembang di kalangan masyarakat ini biasanya menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah untuk menetapkan kebijakan penduduk paska erupsi.

**f. Efektivitas kebijakan rekonstruksi dan rehabilitasi**

Sebagaimana diketahui, pemerintah daerah paska erupsi Merapi sekarang ini telah menetapkan kebijakan rekonstruksi dan rehabilitasi. Kebijakan ini membangun kembali kawasan yang rusak yang terutama hangus terbakar oleh awan panas dan memulihkan kehidupan masyarakatnya. Walaupun kebijakan ini telah ditetapkan oleh pemerintah daerah namun masih menyimpan polemik terutama karena telah terjadinya perubahan daerah rawan

bencana Merapi sesudah “peristiwa Turgo”. Sebelum “peristiwa Turgo”, material vulkanik cenderung mengarah ke barat tetapi setelah “peristiwa Turgo” yang meruntuhkan bukit Geger Boyo, material vulkanik mengarah ke barat dan selatan bahkan ke timur. Mempertimbangkan luncuran awan panas yang menghanguskan Dusun Kinahrejo dan Dusun Bronggang tahun 2010 yang lalu, daerah rawan bencana Merapi menjadi berubah yaitu semakin luas dari barat, selatan dan timur. Radius daerah rawan bencana Merapi juga berubah semakin jauh yakni mencapai 15 km dari puncak Merapi mengikuti perubahan sifat luncuran awan panas. Dengan pertimbangan ini, Dusun Kinahrejo yang berjarak 5 km dari puncak Merapi semestinya tidak efektif jika ditetapkan kebijakan rekonstruksi dan rehabilitasi. Polemik kebijakan paska erupsi inipun meluas ke “istana” yang menyatakan tidak perlunya relokasi, sementara itu BNPB menyarankan relokasi. Walaupun pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan rekonstruksi dan rehabilitasi namun pada dasarnya masih menunggu keputusan BPPTK Yogyakarta yang sedang melakukan kajian untuk menentukan layak tidaknya relokasi. Dengan demikian, kajian mengenai kebijakan ini masih sangat penting.

**g. Penentuan kebijakan relokasi dan transmigrasi**

Terdapat dua kebijakan terkait pemindahan penduduk di sekitar Merapi yakni relokasi dan transmigrasi. Kedua kebijakan ini pernah dilakukan oleh pemerintah sehingga memiliki pengalaman masing-masing. Kebijakan transmigrasi masyarakat di sekitar Merapi telah dilakukan sejak tahun 1970-an. Kebijakan ini ada yang tepat dan berjalan dengan baik namun ada yang tidak tepat seperti transmigrasi ke wilayah Kalimantan Barat. Persoalannya utamanya adalah tidak adanya jaminan pemilikan lahan dan kelangsungan mata pencaharian mereka. Tidak sedikit



transmigran dari sekitar Merapi yang sudah ditransmigrasikan namun kembali lagi ke kampung halamannya. Sementara itu kebijakan relokasi juga pernah dilakukan oleh pemerintah daerah di sekitar Merapi dengan sistem tukar guling. Berbeda dengan transmigrasi, relokasi hanya dilakukan di sekitar Merapi, biasanya hanya lintas desa dan kecamatan. Kesulitan relokasi biasanya terkait dengan penyediaan lahan relokasi karena permukiman di sekitar Merapi sudah semakin padat. Kedua kebijakan tersebut memerlukan review sehingga dapat ditentukan yang tepat untuk masyarakat.

#### **h. Lemahnya penanganan kerusakan infrastruktur akibat banjir lahar dingin**

Material vulkanik yang keluar dari kawah selama erupsi Merapi mencapai 10 kali lipat erupsi sebelumnya yaitu sebanyak 140 juta meter kubik. Sampai saat ini material vulkanik yang hanyut oleh banjir sekitar 10%, jadi sekitar 90% material vulkanik masih berada di puncak Merapi. Akibat banjir lahar dingin itu telah menghancurkan infrastruktur penting seperti jembatan yang menghubungkan antar kota antar propinsi sebanyak 15 jembatan, sejumlah perkampungan penduduk terkubur material vulkanik seperti pasir dan batu berikut rumah, tanah dan harta benda lainnya. Diperkirakan, material vulkanik itu baru habis selama 5 tahun sehingga ancaman bencana yang ditimbulkan oleh banjir lahar dingin ini sangat besar. Penduduk yang rumah, tanah dan harta bendanya terkubur oleh lahar dingin menjadi pengungsi baru paska erupsi Merapi.

Secara umum, dampak erupsi Merapi telah mengakibatkan penduduk sekitar mengalami perubahan kondisi sosial-ekonomi rumah-tangga yang tiba-tiba. Situasi krisis dan tanggap darurat telah menyebabkan sumber-sumber penghidupan mereka mengalami

kemerosotan hingga jatuh pada situasi kemiskinan. Berdasarkan dampak dan perubahan kondisi sosial-ekonomi rumah-tangga setidaknya dapat dibagi menjadi tiga yaitu,

1. Penduduk yang terkena dampak erupsi Merapi dan pernah berstatus sebagai pengungsi namun telah kembali ke rumahnya dan menata kembali kehidupan mereka yang mengalami kerusakan namun bisa dipulihkan baik secara mandiri maupun secara sosial melalui keswadayaan masyarakat.
2. Penduduk yang terkena dampak erupsi Merapi yang sampai saat ini masih bertahan di shelter menunggu kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi desa-desa selesai selama kurang lebih dua tahun
3. Penduduk yang terkena dampak erupsi Merapi yang harus direlokasi berdasarkan kebijakan pemerintah daerah setempat antara lain penduduk Dusun Kinahrejo, 135 KK penduduk di daerah Kabupaten Klaten dan beberapa KK di wilayah Muntilan yang permukimannya tertimbun lahar dingin. Sementara menunggu proses relokasi yang beberapa diantaranya masih menimbulkan pro dan kontra dan akan memakan waktu lama, penduduk yang akan di relokasi ini bertahan di shelter.

Dengan peta permasalahan tersebut, dampak erupsi Merapi terhadap kondisi sosial-ekonomi rumah-tangga dan kemiskinan berbeda-beda pada setiap tingkat. Bertitik tolak dari kondisi tersebut, penelitian ini berangkat dari pertanyaan penelitian sebagai berikut,

1. Apakah dampak erupsi Merapi terhadap kemiskinan di bidang kependudukan antara lain mata pencaharian, aset rumah-tangga, ketenagakerjaan, pendidikan serta kesehatan?

2. Bagaimana strategi pemerintah dan masyarakat serta pihak-pihak lain dalam menanggulangi kemiskinan itu?

### **C. Tujuan dan Sasaran**

- Tujuan penelitian
  1. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan permasalahan kemiskinan sebagai dampak bencana Merapi di bidang kependudukan antara lain mata pencaharian, aset rumah-tangga, ketenagakerjaan, pendidikan dan kesehatan.
  2. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membuat rekomendasi kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagai dampak bencana Merapi.
- Sasaran penelitian
  1. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut akan dilakukan pemetaan kependudukan khususnya mata pencaharian, aset rumah-tangga, ketenagakerjaan, pendidikan dan kesehatan pada penduduk yang terkena dampak erupsi Merapi.
  2. Selain itu juga akan dilakukan pemetaan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan intervensi lainnya serta bentuk-bentuk keswadayaan masyarakat yang mengarah pada strategi penanggulangan kemiskinan.

### **D. Metodologi**

- Metode penelitian

Penelitian di daerah bencana Merapi dengan kondisi tanggap darurat serta situasi krisis saat ini kurang memungkinkan dilakukan dengan metode kuantitatif seperti survei rumah-tangga. Hal ini untuk menghindari persepsi penduduk terhadap penelitian dan program-

program bantuan yang bisa menimbulkan salah pengertian. Metode yang sesuai dengan kondisi seperti ini adalah kualitatif dengan pendekatan khusus yaitu wawancara bebas dan kaji bersama. Wawancara bebas berpedoman pada panduan yang sudah ditentukan, sedangkan kaji bersama dilakukan bersama-sama penduduk korban melalui pertemuan kelompok-kelompok kecil.

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggabungkan pendekatan deduktif dan induktif serta mengutamakan aspek emik. Metode ini dipilih dengan pertimbangan perasaan korban bencana Merapi sehingga penelitian ini tidak menambah beban perasaan korban. Selain itu, dengan metode ini diharapkan dapat menghindarkan posisi korban sebagai obyek kajian dan menempatkan korban sebagai subyek yang mempunyai kapasitas untuk mengatasi masalahnya secara individual maupun kolektif.

Untuk mempertajam metode ini akan menggunakan teknik berikut, review literatur, observasi terlibat, *indepth-interview*, *oral history*, *focus group discussion* terutama dengan stakeholder, dan survei sosial-ekonomi khususnya menyangkut persepsi dan pandangan individual dan kolektif (jika dimungkinkan). Kajian akan difokuskan di daerah-daerah yang hangus terbakar oleh awan panas dan yang terkubur oleh pasir akibat banjir lahar dingin di wilayah Kabupaten Magelang dan Klaten, Jawa Tengah, serta Kabupaten Sleman, DIY.

- Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di lokasi-lokasi yang paling terkena dampak langsung erupsi Merapi yaitu,

1. Dusun Kinahrejo dan Bronggang, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, DIY yang sebagian besar penduduknya berada di shelter yang tersebar di beberapa kecamatan di sekitarnya

2. Daerah yang terkena dampak lahar dingin terutama di wilayah Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
3. Daerah yang terkena awan panas dan lahar dingin di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah



## BAB II

# DAMPAK BENCANA MERAPI TERHADAP KEMISKINAN

### A. Dampak Erupsi Merapi Terhadap Aset Rumah Tangga

Bencana alam merupakan suatu peristiwa yang memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan manusia, salah satu dampak langsung dari bencana adalah kehilangan dan kerusakan aset rumah tangga. Menurut definisinya, aset rumah tangga adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomi baik yang berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*) dan digunakan untuk menghasilkan kesejahteraan rumah tangga (Siegel dan Alwang, 1999)<sup>1</sup>. Secara umum, aset rumah tangga berwujud dapat berupa manusia, modal fisik, dan tabungan, Sedangkan Aset rumah tangga tidak berwujud berupa hubungan sosial antar anggota rumah tangga, interaksi rumah tangga satu dengan rumah tangga lainnya, asosiasi jaringan masyarakat, budaya, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Erupsi Merapi yang terjadi pada 26 Oktober hingga 5 November 2010 telah menyebabkan kerusakan dan kehilangan aset-aset penghidupan masyarakat dalam skala yang masif baik aset yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam perspektif rumah tangga, bencana adalah kejutan besar (*multifaceted shock*) terhadap tingkat

---

<sup>1</sup> Siegel, Paul B. and Alwang, Jeffrey. (1999) "An Aset-Based Approach to Social Risk Management: A Conceptual Framework." H. D. N. Social Protection Unit. *Social Protection Discussion Paper Series*. Washington, D.C.: The World Bank. Hal. 67.

kesejahteraan yang mengakibatkan dampak langsung terhadap penurunan jumlah, nilai, dan produktivitas aset (Charvériat, 2000)<sup>2</sup>.

Sebagian bencana alam di Indonesia terjadi di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, sebagai contoh bencana erupsi Merapi di kabupaten Sleman pada tahun 2010 mencatat penduduk miskin sebanyak 195.600 jiwa atau 19,72% Kepala Keluarga (Nakersos, 2010). Dengan terjadinya bencana, ada indikasi meningkatnya tingkat kemiskinan rumah tangga karena rumah tangga miskin memiliki kecenderungan membayar biaya yang besar akibat terjadinya bencana karena karakteristik aset yang dimiliki oleh rumah tangga miskin, baik dari jumlah aset yang dimiliki maupun pemilihan portofolio aset (Fuente, 2007)<sup>3</sup>.

Dampak erupsi terhadap aset rumah tangga dalam tulisan ini hanya membatasi pada kerusakan dan kerugian aset berwujud seperti manusia, rumah, dan ekonomi produktif. Aset manusia mencakup besarnya korban jiwa yang diakibatkan oleh erupsi, kemudian aset rumah mencakup besarnya kehilangan dan kerusakan tempat tinggal, dan aset ekonomi produktif mencakup lahan, ternak, dan kegiatan usaha yang dimiliki oleh warga di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman, Magelang, dan Klaten. Selain menggunakan data sekunder, tulisan ini juga memaparkan penemuan-penemuan dari data primer melalui pengamatan langsung dan *focus group discussion* (FGD) kepada beberapa korban bencana yang masih tinggal di *shelter* dan yang sudah kembali ke desa asal.

---

<sup>2</sup> Charvériat. Céline. (2000) "Natural Disasters in Latin America and the Caribbean: An Overview of Risk". *Research Department Working papers series ; 434*. Washington, D.C.: Inter-American Development Bank. Hal.10.

<sup>3</sup> Fuente. Alejandro de la. (2007) "Climate Shocks and their Impact on Assets". *Human Development Occasional Paper*. United Nations Development Programme. Hal 2.



## 1. Kondisi Penduduk, Perumahan, dan Aset Ekonomi Produktif

Kondisi lahan yang subur, nyaman, dan sangat cocok untuk bercocok tanam maupun beternak menjadi faktor penarik bagi warga untuk tinggal di sekitar lereng gunung api Merapi sejak dahulu kala, tercatat bahwa kenaikan jumlah penduduk dari tahun ke tahun selalu meningkat dan bisa mencapai 15 persen. Keadaan ini menyebabkan terakumulasinya jumlah penduduk di daerah-daerah rawan bencana, semakin banyak penduduk maka semakin besar pula kerentanan masyarakat terhadap ancaman awan panas dan risiko hilangnya aset-aset kehidupan dan penghidupan.

Level risiko terkena dampak bencana telah di petakan oleh pemerintah dalam bentuk peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) yang dibuat berdasarkan komponen ancaman, kerentanan, dan kapasitas. KRB dipetakan dalam 3 wilayah yaitu KRB 1, 2, dan 3. Daerah yang paling rawan terhadap ancaman erupsi Merapi adalah wilayah KRB 3 dimana merupakan aliran lahar panas dan umumnya berjarak 0 – 5 KM dari kawah Merapi. Pemerintah menetapkan wilayah KRB 3 tidak direkomendasikan sebagai lokasi hunian tetap dalam upaya pengurangan risiko bencana<sup>4</sup>, namun dalam kenyataannya, tidak lama setelah status waspada dicabut, sebagian warga lereng gunung berapi kembali ke desa walaupun termasuk dalam wilayah KRB 3 (hasil FGD).

Dari aspek kependudukan, hingga saat ini persebaran penduduk lereng gunung Merapi di KRB 3 relatif tinggi, data menunjukkan ada 79.564 jiwa yang tinggal di KRB 3 atau 2,87 persen dari seluruh total penduduk yang tinggal di seluruh KRB (hingga 10

---

<sup>4</sup> BAPPENAS dan BNPB. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi: Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Provinsi D.I. Yogyakarta Dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013

KM dari puncak Merapi). Persebaran penduduk terbanyak untuk wilayah KRB 3 berada di Kabupaten Boyolali kemudian diikuti oleh Kabupaten Sleman yang merupakan aliran lahar panas terparah dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Sementara penduduk yang menempati wilayah KRB 2 sebesar 8,84 persen dan KRB 1 sebanyak 88,3 persen. Secara detail terlihat pada tabel 2.1 berikut;

**Tabel 2.1. Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana Merapi**

Kabupaten	Rumah	Penduduk	KK
<b>KRB 3 (Jarak 0-5 KM)</b>			
Sleman	6.860	25.006	8.527
Boyolali	9.266	36.202	9.925
Magelang	2.749	10.695	3.065
Klaten	1.934	7.661	2.194
<b>KRB 2 (Jarak 5-10 KM)</b>			
Sleman	9.648	43.323	12.444
Boyolali	28.398	117.774	30.919
Magelang	15.875	63.089	19.080
Klaten	5.093	21.154	5.790
<b>KRB 1 (Jarak 10-20 KM)</b>			
Sleman	98.900	383.281	111.585
Boyolali	80.688	336.809	95.284
Magelang	125.412	516.751	142.494
Klaten	296.115	1.214.502	335.966

Sumber : Badan Geologi, Kementerian ESDM

Berdasarkan data tahun 2010, kabupaten Sleman mencatat 6.242 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di KRB 3 dan meliputi 23 dusun, tingginya jumlah KK tersebut tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Menurut BPS pertumbuhan penduduk

di kabupaten Sleman mencapai 2,7 persen selama 1995-2005, angka ini jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk nasional.

Pertumbuhan penduduk tidak terlepas dari faktor keterikatan masyarakat dengan alam sekitar dan hidup harmoni dengan aktivitas Merapi, faktor tersebut mendorong masyarakat untuk hidup menetap di sekitar lereng Merapi. Sangat sedikit warga asli lereng Merapi yang melakukan transmigrasi ataupun mencari pekerjaan di luar daerah tersebut karena sebagian besar memilih untuk bekerja di desa dan mengelola aset rumah tangga (Hasil FGD).

Sebagian besar dari masyarakat telah membangun rumah secara permanen dengan status kepemilikan hak milik. Berdasarkan hasil Sensus yang dilakukan oleh Dinas Pekerja Umum (PU) Kabupaten Sleman pasca erupsi Merapi tahun 2010, tercatat bahwa status rumah 89,86 persen KK adalah milik sendiri dan sisanya terbagi atas sewa, milik orang tua dan lainnya. Mayoritas rumah yang mereka bangun adalah rumah permanen dengan beratap genteng, dinding tembok, dan lantai bukan tanah. Lebih lanjut, data dari BPS tahun 2008 (tabel 2.2) menunjukkan terdapat 40,054 bangunan rumah bersifat permanen, sementara bangunan yang bersifat semi permanen sebesar 7,866 rumah dan tidak permanen sebesar 9,652 rumah dimana Kabupaten Sleman memiliki jumlah rumah permanen yang paling besar dibandingkan kabupaten lainnya. Angka tersebut telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya selain karena disebabkan pertumbuhan penduduk, juga disebabkan oleh tidak adanya pembatasan pembangunan perumahan dan infrastruktur.

**Tabel 2.2. Kondisi Perumahan Daerah Zona Ancaman Merapi**

Kecamatan	Kabupaten	Rumah				Total
		Jumlah Desa	Permanen	Semi Permanen	Tidak Permanen	
Srumbung	Magelang	5	1.559	435	1.820	3.814
Dukun	Magelang	2	3.377	937	1.153	5.467
Sawangan	Magelang	5	1.502	197	887	2.586
Selo	Boyolali	8	1.697	1.787	1.405	4.889
Cepogo	Boyolali	4	802	959	700	2.461
Musuk	Boyolali	5	1.067	1.618	1.169	3.854
Kemalang	Klaten	3	3.991	142	960	5.093
Ngemplak	Sleman	9	8.725	531	106	9.362
Turi	Sleman	7	3.361		296	3.657
Pakem	Sleman	3	8.322	665	411	9.398
Cangkringan	Sleman	6	5.651	595	745	6.991

Sumber: PODES 2008, BPS

Dilihat dari sisi sosiologis, masyarakat lereng Merapi relatif homogen dari segi etnisitas dan agama, sebagian besar masih menjalankan tradisi jawa, berbahasa jawa, hidup komunal, dan mempunyai sifat kekeluargaan gotong royong. Mayoritas mata pencaharian agraris baik perkebunan, sawah, maupun ternak dan sebagian kecil bergerak di bidang pertambangan, kepariwisataan, industry makanan, dan pegawai negeri.

Sebagai kawasan agraris, aset yang paling produktif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah lahan pertanian, baik berupa pertanian sawah maupun non-sawah, perkecualian untuk kecamatan dalam wilayah Kabupaten Boyolali yang memiliki area non pertanian lebih luas daripada area pertanian. Tabel 2.3 menunjukkan bahwa luas lahan untuk pertanian dan bukan pertanian di Kabupaten Sleman lebih besar dibandingkan kabupaten lainnya. Terdapat preposisi bahwa terjadi hubungan yang linier antara struktur penguasaan lahan dengan

struktur pendapatan rumah tangga di pedesaan<sup>5</sup>, berdasarkan preposisi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum penduduk di Sleman memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten lainnya. Tingginya pendapatan terlihat dari jumlah lahan dan jenis bangunan yang terdapat di wilayah tersebut. Namun jika dilihat berdasarkan karakteristik setiap dusun menunjukkan hasil yang berbeda. Hal ini terlihat dari rata-rata kepemilikan dan penggunaan lahan produktif setiap anggota rumah tangga di setiap dusun berbeda.

---

<sup>5</sup> Supriyati, saptana, Supriyatna Y. (2002). hubungan Penguasaan Lahan dan Pendapatan Rumahtangga Di Pedesaan. *ejournal.unud.ac.id*. Diakses tanggal 18 Juli 2008.

**Tabel 2.3. Komposisi Penggunaan Lahan**

Kecamatan	Kabupaten	Sawah (Km <sup>2</sup> )			Pertanian Bukan Sawah	Non Pertanian	Total Area (Km <sup>2</sup> )
		Pengairan Teknis	Pengairan Non Teknis	Tidak Pengairan			
Srumbung	Magelang	0,3	7,9	2,6	8,4	4,4	23,6
Dukun	Magelang	10,6	0,8	1,9	10,2	3,3	26,8
Sawangan	Magelang	0	0	0	11,5	1,5	13
Selo	Boyolali	0	0	0	13,5	22	35,5
Cepogo	Boyolali	0	0	0	9,1	4,3	13,4
Musuk	Boyolali	0	0	0	11,8	7,6	19,4
Kemalang	Klaten	0	0	0	21,6	17,3	38,9
Ngemplak	Sleman	7,2	5,3	0,2	3,4	7,5	23,6
Turi	Sleman	0	0,6	0	17,9	10,2	28,7
Pakem	Sleman	8,4	8,7	0	9,2	17,6	43,9
Cangkringan	Sleman	7,8	2,7	2	21	14,5	48
<b>TOTAL</b>	<b>34,3</b>	<b>26</b>	<b>6,7</b>	<b>137,6</b>	<b>110,2</b>	<b>314,8</b>	

Sumber: PODES 2008, BPS

Sebagian besar rumah tangga di Sleman memiliki hak kepemilikan atas lahan produktif tersebut, 94 persen KK memiliki status hak milik dengan luas kepemilikan di setiap dusun berbeda-beda (Sensus PU). Kasus di Dusun Bronggang, terdapat 87 persen kepala keluarga memiliki sawah dengan rata-rata kepemilikan sebesar 0,25 hektar, hanya sebagian kecil rumah tangga yang tidak memiliki sawah dan biasanya mereka tersebut berasal dari luar dusun. Sedangkan dusun-dusun lainnya yang berada pada topografi yang lebih tinggi dengan jenis lahan tegalan, umumnya memiliki luas lahan yang lebih besar seperti dusun Kinahrejo, Kalitengah, Serunen, dan Ngancar. Rata-rata kepemilikan lahan di dusun tegalan tersebut antara 0,5 hingga 2 hektar per rumah tangga dimana lahan tersebut dimanfaatkan untuk menanam palawija, rumput, atau beternak sapi.

Di Dukuh Gondang yang masuk dalam wilayah Kabupaten Sleman dan memiliki kondisi topografis yang sama dengan dusun-dusun tegalan di Kabupaten Sleman, umumnya memiliki lahan yang relatif luas. Rata-rata kepemilikan lahan tegalan di dusun Gondang hampir mendekati 1 hektar dan dimanfaatkan untuk palawija, rumput, atau beternak sapi.

Sementara, kondisi yang berbeda terlihat di Dusun Sirahan, kecamatan Muntilan Magelang yang terkena dampak lahar dingin di sebelah barat kali putih. Mayoritas dari rumah tangga tidak memiliki lahan pertanian walaupun rumah yang mereka tempati adalah milik sendiri, Sebelum erupsi Merapi 2010 penduduk dusun tersebut bekerja sebagai buruh tani dan mengerjakan tanah khas milik desa, sebagian kecil diantaranya bekerja sebagai pedagang atau industri kecil rumah tangga yang memproduksi makanan ringan.

## 2. Dampak Erupsi terhadap Penduduk, Hunian, dan Aset Produktif

Awan panas dari erupsi Merapi telah merenggut banyak korban jiwa, hingga 30 November 2010 tercatat korban meninggal sebanyak 341 jiwa dengan penyebab luka bakar sebanyak 195 jiwa dan non luka bakar 146 jiwa, Sedangkan korban rawat inap mencapai 368 orang, saat ini korban rawat inap sudah dapat pulih dan kembali ke rumah, namun bekas luka akibat awan panas masih tersisa dalam tubuh korban tersebut, beberapa diantaranya bahkan mengalami cacat permanen yang menyebabkan kehilangan ataupun penurunan produktivitas.

**Tabel 2.4. Jumlah Korban Jiwa Akibat Erupsi Gunung Api Merapi 2010**

Kabupaten	Korban Jiwa (Orang)		
	Meninggal	Rawat Inap	Pengungsi
Sleman	243	203	26,774
Magelang	52	98	18,505
Klaten	36	30	4,321
Boyolali	10	37	672
Bantul	0	0	4,162
Gunung Kidul	0	0	2,946
Kulon Progo	0	0	1,426
Kota Yogyakarta	0	0	1,388
Magelang	0	0	601
Temanggung	0	0	359
<b>TOTAL</b>	<b>341</b>	<b>368</b>	<b>61,154</b>

Sumber: Kementerian Kesehatan RI, Pemkab Sleman, Pemkot Jogja, Bakorwil Jateng (update data 30 November 2010).



Tabel 2.5. Dampak Erupsi Merapi Terhadap Kondisi Perumahan dan Aset Produktif Korban Merapi

Kabupaten	Dusun/Dukuh, Asal Responden	KRB	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang Masih Tinggal di <i>Shelter</i>	Kondisi Rumah Pasca Erupsi	Kondisi Aset Produktif Pasca Erupsi
Sleman	Bronggang ( <i>Shelter</i> Kuwang)	3	67	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi rumah warga yang telah kembali ke dusun (91 KK) mengalami rusak ringan dan telah dibersihkan dari abu vulkanik. Saat ini warga yang kembali telah menempati kembali rumah tersebut.</li> <li>- Warga yang masih tinggal di <i>shelter</i> telah kehilangan rumah karena tertumpun material vulkanik. Namun batas-batas kaveling rumah masih dapat di tentukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rata-rata warga lokal memiliki sawah dengan rata-rata kepemilikan 0.25 hektar.</li> <li>- Setelah Erupsi, sawah tidak lagi bisa digunakan karena efek dari abu vulkanik dan padi dimakan tikus.</li> <li>- Beberapa usaha warga yang hancur akibat bencana: Usaha salon. Pengrajin kayu (merugi 10 juta), gilingan padi, dan ternak sapi mati</li> <li>- Dari aset produktif yang hancur, hanya sapi yang mendapat penggantian dari pemerintah</li> </ul>

Kinahrejo ( <i>shelter</i> Plosokerep)	3	81	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hampir 100 persen rumah KK di dusun telah hilang karena tertimbun material vulkanik. Sehingga mereka harus menempati <i>shelter</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh penduduk dusun kehilangan aset yang sangat berharga untuk kehidupan sehari-hari. 99 persen KK di dusun tersebut bekerja sebagai peternak sapi perah sejak tahun 1989 dengan kepemilikan antara 3 hingga 16 sapi per KK.</li> <li>- Beberapa warga yang memiliki lahan yang dapat ditanami buah-buahan hancur terkena awan panas</li> <li>- Penggantian hanya diberikan untuk ternak sapi yang mati</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kali Tengah<sup>6</sup></li> <li>- Ngancar</li> <li>- Serunen</li> </ul> ( <i>shelter</i> Banjarsari)	3	200	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penduduk di dusun Ngancar masih menempati <i>shelter</i> karena hampir seluruh rumah hancur terkena awan panas.</li> <li>- Penduduk di dusun kali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagian besar warga Ngancar sebagai petani dan peternak. Namun erupsi telah menghancurkan seluruh lahan dan ternak sehingga sampai</li> </ul>

<sup>6</sup> Mencakup Dusun Kali Tengah Lord an Kali Tengah Kidul di Desa Gelagah Harjo.

					<p>saat penelitian dilakukan. Lahan belum bisa digunakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lahan Penduduk dusun Kali tengah dan Serunen yang digunakan untuk pertanian palawija, rumput, dan ternak sapi terkena dampak awan panas. Namun saat ini telah diolah kembali oleh warga dan dapat digunakan.</li> </ul>
<p>tengah dan Serunen telah kembali ke dusun dan membangun rumah yang telah hancur dengan dana mandiri.</p>					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi saat ini beberapa lahan sudah mulai dibersihkan dari timbunan pasir secara mandiri.</li> <li>- 80 persen mata pencaharian warga adalah bertani sayuran dan jagung. Namun seiring dengan perkembangan waktu, warga mulai menanam lahannya dengan rumput sebagai makanan ternak dan</li> </ul>
	<p>- warga telah kembali ke rumahnya dengan membangun secara mandiri maupun bantuan dari yayasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rata-rata luas rumah di dusun tersebut 2000 m<sup>2</sup></li> </ul>				
<p>Klaten</p>	<p>Gondang (Desa Balairante)</p>	<p>3</p>			

Magelang	Sirahan ( <i>shelter</i> Mancasan)			<p>sebagai penambang pasir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setelah erupsi, mata pencaharian warga beralih hanya sebagai penambang pasir.</li> </ul>
		106	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagian warga dari dusun Sirahan telah membangun dan membersihkan kembali rumah yang terkena abu vulkanik</li> <li>- Warga yang masih tinggal di huntera telah kehilangan rumah (berasal dari 6 dusun)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagian warga Dusun Sirahan sebagai buruh tani yang mengelola tanah khas desa. Setelah terkena lahar dingin, tanah tersebut belum bisa digunakan kembali dan warga beralih sebagai penambang pasir.</li> <li>- Beberapa usaha warga yang hancur akibat bencana: warung, usaha makanan tradisional, dan usaha pahat batu.</li> </ul>

Sumber : Hasil FGD.

Selain kehilangan anggota rumah tangga, masalah lain akibat erupsi antara lain: kondisi psikologis yang masih trauma (kasus warga Dusun Bronggang, Sleman), dan kesiapan adaptasi dengan perbedaan lingkungan, hubungan sosial, dan kondisi wilayah di tempat *shelter* dengan dusun asal (kasus warga dusun Sirahan, Magelang) seperti terlihat dalam salah satu pernyataan responden berikut: *“karena kita ini wong desa nggih to disini kan kota untuk wira-wiri jalan kerumah kita sudah susah kok, takut nyebrangnya”* (Badawi, hasil FGD).

Khawatiran lainnya yang dialami warga adalah ancaman banjir lahar pada musim penghujan, Material vulkanik yang mencapai 130 juta M<sup>3</sup> dapat menjadi ancaman bagi penduduk di sekitar sungai-sungai yang akan menjadi aliran dari gunung Merapi dan diperkirakan ancaman lahar dingin ini hingga tiga kali musim penghujan.

Selain kehilangan anggota keluarga, sebanyak ratusan ribu jiwa dari 10 kabupaten harus mengungsi karena kehilangan atau kerusakan tempat tinggal, Kerusakan perumahan terbanyak terjadi di kabupaten Sleman khususnya di dusun Kinahrejo, Kaliadem, Kedua dusun tersebut telah terkubur material vulkanik akibat awan panas yang terjadi pada 26 Oktober 2010, kemudian pada tanggal 5 November 2010 terjadi letusan terbesar yang menyebabkan sebagian besar wilayah Kecamatan Cangkringan terkubur material vulkanik,

**Tabel 2.6. Kerusakan Rumah Akibat Erupsi Merapi 2010**

Kabupaten	Kerusakan Rumah			Nilai Kerusakan (Jutaan Rp)	Nilai Kerugian (Jutaan Rp)
	Berat	Sedang	Ringan		
Sleman	2.613	156	632	446.217,534	31.352
Magelang	368	745	2.121	31.175	1.545,6
Klaten	117	54	12	6.318	409,5
Boyolali	21	90	221	5.994	388,5

Sumber: BNPB. Bappeda Sleman.

Banyaknya kerusakan permukiman di Kabupaten Sleman menyebabkan nilai kerusakan dan kerugian mencapai 9 persen dari total nilai kerusakan dan kerugian disemua sektor. Kerusakan berat disebabkan oleh awan panas dan tertimbunnya rumah oleh material vulkani, sedangkan kerusakan ringan disebabkan oleh hujan kerikil, pasir, dan abu yang terjadi beberapa hari dan yang paling besar terjadi pada tanggal 5 Desember 2010 dini hari. Dalam hal ini ribuan keluarga harus membersihkan rumahnya apabila akan dihuni kembali setelah mereka pulang dari tempat pengungsian.

Menurut Tipologi Kerusakan dusun yang dibuat oleh BNPB. di zona bahaya primer 1 (KRB 3) yang berlokasi 5 km dari puncak Merapi, dengan penduduk sekitar 79.564 jiwa, dusun yang rusak mencapai 30-100 persen karena berada di kaki gunung. Di zona bahaya primer 2 (KRB 2) yang berlokasi 10 km dari puncak Merapi. dusun yang rusak mencapai bervariasi antara 20-50 persen dan 50-100 persen, serta umumnya berada di jalur tepi sungai yang rawan lahar dingin dan panas. Di zona bahaya 15 km dari puncak Merapi (KRB 1). dusun-dusun relatif aman, meski berpotensi terkena dampak terutama yang tinggal di sepanjang sungai yang hulunya di Merapi.

Seperti halnya ancaman terhadap jiwa dan perumahan. erupsi Merapi juga menghancurkan aset produktif di empat kabupaten sekitar Merapi. Kabupaten Sleman adalah kabupaten yang paling banyak mengalami kerusakan dan kerugian di sektor ekonomi produktif yang mencapai total 1.261.330.950.000 sedangkan kabupaten Klaten mengalami kerusakan dan kerugian yang paling sedikit yaitu sebesar 138.335.870.000 walaupun kabupaten ini terdapat penduduk yang meninggal akibat awan panas.

Nilai kerusakan tersebut dihitung berdasarkan nilai pasar atas aset sedangkan nilai kerugian dihitung sebagai pendapatan yang tidak dapat diterima karena terhentinya kegiatan ekonomi. Aset produktif

pada tabel 2.7 menghitung seluruh aset ekonomi produktif baik yang dimiliki secara penuh oleh rumah tangga seperti lahan pertanian, peternakan, dan usaha rumah tangga, maupun aset yang dimiliki oleh pemerintah tetapi warga memiliki hak untuk menggunakan seperti hutan rakyat, sarana dan prasarana publik, koperasi, dan pariwisata yang mana aset tersebut dapat memberikan nilai ekonomi kepada penduduk. Namun pada analisis selanjutnya, tulisan ini hanya memaparkan dampak bencana terhadap aset produktif yang menjadi hak milik rumah tangga.

**Tabel 2.7. Kerusakan Ekonomi Produktif Akibat Erupsi Merapi 2010 (Jutaan Rupiah)**

Kabupaten	Kerusakan	Kerugian
Sleman	193.437,37	1.067.893,58
Magelang	105.248,70	108.364,37
Klaten	29.971,50	108.364,37
Boyolali	100.793,99	184.903,89
<b>TOTAL</b>	<b>429.451,56</b>	<b>1.469.526,21</b>

Sumber: BNPB, Bappeda Sleman.

Kerusakan aset yang dimiliki oleh rumah tangga menyebabkan warga tidak bisa lagi melakukan aktivitas ekonomi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka harus mengandalkan berbagai bantuan yang ada. Sebagaimana beberapa kasus hasil FGD di *shelter* pada beberapa dusun berikut:

## **B. Aspek Ekonomi Dan Matapencaharian Wilayah Bencana Merapi: Kabupaten Sleman**

### **1. Karakteristik Wilayah Bencana**

Wilayah Kabupaten yang letaknya berhadapan langsung dengan gunung Merapi, yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Boyolali. Kawasan Kabupaten Sleman sangat berbeda dengan ketiga Kabupaten lainnya. Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah yang terletak di lereng Merapi, sering di istilahkan kawasan penyangga Merapi, karena kawasan tersebut berhadapan langsung dengan kegiatan erupsi gunung Merapi. Dilain pihak Kabupaten Sleman merupakan kawasan jalur ekonomi yang menghubungkan kota – kota di Jawa Tengah seperti, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Purwakerto, sehingga kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi bagi penduduk wilayah Kabupaten Sleman. Kegiatan sektoral tumbuh dengan cepat berkembang baik sektor pertanian, Industri, Perdagangan dan Jasa, sektor pariwisata serta sektor pendidikan.

Berdasarkan karakterisitik sumberdaya alam, maka wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi 4 kawasan, yaitu **pertama**; kawasan sabuk Merapi (*ringbelt*) yang merupakan sumber air dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan dan ekosistem gunung Merapi, yaitu Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan. **Kedua**, kawasan timur meliputi kawasan Kecamatan Prambanan, sebagian Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Wilayah ini merupakan tempat peninggalan purbakala berupa candi yang menjadi pusat wisata budaya dan kawasan lahan kering serta sumber bahan batu putih. **Ketiga**, kawasan tengah yaitu merupakan wilayah aglomerasi kota Yogyakarta, terdiri dari Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok, wilayah tersebut merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan Jasa.



**Keempat**, wilayah barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan, Moyudan, Gamping merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan, seperti mendong, bambu, dan gerabah.

Karakteristik wilayah berdasarkan dengan sumber daya alam serta kaitannya dengan dampak bencana erupsi Merapi, maka kawasan yang perlu mendapat perhatian penuh, karena merupakan kawasan bencana merapi (KBM) adalah kawasan **kriteria satu (ringbelt)**, jarak kawasan tersebut hanya berkisar 2 sd 4 km dari puncak merapi. Akan tetapi kawasan tersebut justru menjadi sumber mata pencaharian penduduk baik yang tinggal di kawasan maupun yang tinggal di luar kawasan tersebut, seperti melakukan kegiatan pertanian sayuran, peternakan, perkebunan dan pariwisata alam dengan panorama yang sangat menarik.

## **2. Struktur Perekonomian Daerah**

Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan (aglomerasi kota Yogyakarta), wilayah Kabupten Sleman merupakan wilayah hulu kota Yogyakarta yang sangat potensial bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Mobilitas penduduk di wilayah Kabupaten Sleman sangat tinggi terutama wilayah Kecamatan yang berdekatan dengan kota Yogyakarta, seperti Kecamatan Depok, Gamping, dan sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik dan Mlati yang menjadi aglomerasi kota Yogyakarta.

Dinamika ekonomi selama tahun terakhir (2005 – 2010) menunjukkan bahwa kontribusi sektor primer (**Kegiatan Pertanian**) cenderung mengalami penurunan yaitu dari 17,8 persen tahun 2005 menjadi 16 persen (2010), barangkali ini berkaitan dengan iklim yang tidak menentu selama lima tahun tersebut serta terjadinya musibah gempa bumi dan erupsi Merapi pada tahun 2006, sehingga mengakibatkan kerusakan pemukiman dan sarana produksi pertanian.

Demikian pula kejadian gempa bumi tahun 2006 tersebut berpengaruh pula terhadap kontribusi sektor sekunder (**Kegiatan Industri**) yang cenderung mengalami penurunan sedikit yaitu dari 27,45 persen (2005) menjadi 27,20 persen (2010). Sedangkan sektor tersier (**Kegiatan Jasa**) seperti halnya sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran relatif tidak terpengaruh oleh dampak langsung kejadian alam tahun 2006, maka selama periode tahun tersebut kontribusi sektor Jasa mengalami kenaikan yang dari sebesar 54,6 persen (2005) menjadi sebesar 55,80 persen (2010). Dengan kata lain, dengan adanya musibah erupsi Merapi maka kegiatan perekonomian di kabupaten Sleman yang kena dampak langsung dan mengalami penurunan adalah sektor pertanian dan sektor industri pengolahan/kerajinan, sedangkan sektor, perdagangan, hotel dan restoran, jasa pariwisata, karena tidak mendapat dampak langsung bencana, maka sektor tersebut tidak mengalami penurunan produksi yang cukup berarti.

### **3. Struktur Demografi Kabupaten Sleman**

Jumlah penduduk di kabupaten Sleman selama lima tahun terakhir (2005 – 2010) telah mengalami peningkatan sebesar 1,8 persen. Dari jumlah penduduk sebesar 955.124 jiwa (2005) menjadi 1.053.500 jiwa (2009). Jumlah penduduk tahun 2009 menurut kelompok umur sebagai berikut, pada kelompok umur (< 15 th) sebesar 214.447 jiwa atau 20,3 persen sedangkan pada kelompok usia kerja (15 – 60 th) sebesar 716.689 jiwa atau 68 persen dan penduduk lansia (60 th + ) sebesar 122.364 atau 11,6 persen. Bila dilihat angka ketergantungan penduduk adalah sebesar 47 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Sleman adalah rendah dibawah 50 persen. Artinya bahwa penduduk usia kerja produktif di daerah tersebut relatif tinggi, hal ini dalam teori transisi demografi merupakan sumbangan positif pengembangan sumber daya

manusia dan merupakan peluang (*window opportunity*) dalam pembangunan ekonomi, apabila di manfaatkan dengan baik di daerah tersebut.

#### **4. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Erupsi**

Mata pencaharian (kegiatan ekonomi) sebagian besar penduduk wilayah Merapi Kabupaten Sleman yang terkena bencana adalah; pertanian (petani sawah, petani ladang, perkebunan dan peternak), jasa pariwisata alam pegunungan dan industri rumah tangga. Sebagian besar bertempat tinggal di kawasan sabuk Merapi (*ringbelt*) yang merupakan sumber air dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan dan ekosistem gunung Merapi. Dengan datangnya bencana erupsi Merapi bulan Oktober – November 2010 di wilayah tersebut sarana dan prasarana ekonomi (lahan, jalan, sarana lain) mengalami kerusakan dan kehancuran, sehingga mata pencaharian penduduk terhenti. Demikian pula akibat letusan dasyat dengan muntahan material vulkanik telah menghancurkan sebagian besar lahan pertanian di kabupaten Sleman pada *level ringbelt* bagian utara.

Data yang di himpun oleh pemerintah Kabupaten Sleman, menunjukkan bahwa nilai kerusakan di sektor ekonomi berkisar Rp. 193, 437 milyar, dan nilai total kerugian di sektor ekonomi adalah sebesar Rp. 1,068 trilyun, atau sekitar 23,67 % dari total kerugian. Dengan demikian total nilai kerusakan dan kerugian sektor ekonomi di daerah Kabupaten Sleman adalah sebesar Rp. 1,261 trilyun (*Rencana Rehabilitasi dan Rekontrusi Paska Erupsi Merapi, Kab. Sleman 2010*).

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kerusakan dan kerugian pada beberapa kegiatan ekonomi oleh Pemerintah Daerah Kab. Sleman, maka dampak yang ditimbulkan akibat erupsi Merapi, adalah sebagai berikut;

### **a. Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Kerusakan dan kerugian pada sub sektor tanaman pangan dan hortikultura terdapat pada lima jenis komoditas yaitu padi sawah 238 Ha, sayuran 765 Ha, salak pondoh 4,392,919 rumpun, tanaman hias 209,365 batang dan palawija 35 Ha. Apabila nilai kerusakan dihitung berdasarkan biaya produksi, mulai dari biaya pengolahan, biaya bibit, biaya perawatan dan lainnya, sebesar Rp. 11,499 milyar dengan nilai tara-rata produksi untuk tanaman pangan dan hortikultura sebesar Rp. 6 juta per Ha. Dengan demikian apabila nilai jual komoditas tanaman pangan dan hortikultura di kurangi dengan rata-rata biaya produksi, maka nilai kerugian yang ditimbulkan sub sektor tanaman pangan sebesar Rp.238,296 milyar terdiri dari kerugian padi sawah sebesar Rp. 2,795 milyar, sayuran sebesar Rp. 32,927 milyar, salak pondoh sebesar Rp. 201,486 milyar, tanaman hias sebesar Rp.1,011 milyar, dan palawija sebesar 75,8 juta.

### **b. Perikanan**

Kerusakan dan kerugian pada sub sektor perikanan di nilai berdasarkan tiga jenis usaha yaitu, Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) sebesar Rp.6,384 milyar, pembudidayaan ikan konsumsi (Kec. Ngemplak, Turi, Pakem dan Cangkringan) sebesar Rp. 4,698 milyar, Budidaya Usaha pembenihan dan Ikan Konsumsi radius 20 km sebesar 226 milyar dan pembudidayaan ikan hias sebesar Rp. 8 juta. Dengan demikian total kerugian sub sektor perikanan akibat bencana erupsi sebesar Rp.11,317 milyar. Dengan kata lain bahwa kerugian akibat erupsi Merapi tidak hanya terjadi di kawasan Merapi tetapi juga meluas dikawasan dengan radius 20 km.

### **c. Peternakan**

Letusan erupsi Merapi selain mematikan hewan ternak juga mengganggu kesehatan ternak dan menurunkan produktivitas hewan

ternak. Jumlah hewan ternak yang yang mati akibat letusan merapi tercatat sapi perah sebanyak 2.233 ekor, sapi potong sebanyak 235 ekor, kambing sebanyak 37.000 ekor, ayam potong sebanyak 47 000 ekor, ayam petelur sebanyak 106.300 ekor , dengan nilai total kerusakan hewan ternak sebesar Rp. 32,495 milyar. Kerusakan yang diakibatkan erupsi merapi juga merusak kandang hewan sebesar Rp. 10,172 milyar, tanaman hijau makanan ternak (HMT) sebesar 1,394 milyar serta instalasi air sebesar Rp. 3.896 milyar. Nilai total kerusakan pada sub sektor peternakan tercatat sebesar Rp. 48,048 milyar.

Kerugian yang dihadapi peternak adalah berhentinya produksi hewan ternak karena hamparan tanaman rumput dan tempat budi daya ternak terkena limpahan material vulkanik jutaan ton, sehingga tidak dapat di jual ke pasar. Kerugian nilai produksi susu sebesar 4.482 liter atau Rp. 12,549 milyar, jumlah produksi burung puyuh 1.998 butir atau Rp. 299,7 juta, kerugian produksi telur ayam 51.024 butir dengan nilai Rp. 32,598 milyar. Biaya yang harus dikeluarkan pada saat erupsi adalah biaya evakuasi hewan ternak sebesar Rp. 180,5 juta dan biaya penyediaan HMT sebesar Rp. 953,400 juta serta pembuatan kandang sementara di shelter Rp. 1.602 milyar. Dengan demikian total kerugian sub sektor peternakan sebesar Rp. 48,184 milyar.

#### **d. Hutan Rakyat**

Hutan rakyat merupakan wilayah lereng Merapi yang dibudidayakan bagi jenis tanaman keras seperti sengon, mahoni, mindi, dan jenis spesies tanaman lain seperti bambu dan lainnya, yang mengalami kerusakan adalah seluas 840 Ha, yang tersebar di Kecamatan Turi (desa Girikerto dan Wonokerto), Pakem (desa Purwobinangun dan Hargobinangun) dan Kec. Cangkringan (desa Umbulharjo, Kepuharjo, Glagaharjo, Wukirsari dan Argomulyo),

dengan total nilai kerusakan kawasan hutan rakyat sebesar Rp. 103,740 milyar.

#### **e. Perkebunan**

Kawasan lereng Merapi seperti halnya lereng gunung lainnya di Indonesia, merupakan kawasan subur dan dimanfaatkan oleh penduduk sebagai lahan perkebunan. Perkebunan penting yang dapat dikembangkan adalah, kelapa (372 Ha), kopi (215 Ha), cengkeh (89.5 Ha), kakao (9,7 Ha), lada (9,25 Ha), panili (0,7 Ha), Teh (1Ha) dan Jarak pagar (15 Ha). Dengan total kerusakan pada komoditas perkebunan tersebut sebesar Rp. 10,689 milyar.

#### **f. Industri Kecil Rumah Tangga dan Koperasi**

Dampak akibat erupsi Merapi secara langsung menyebabkan kerusakan sarana usaha sebesar Rp. 3,423 milyar sedangkan dampak tidak langsung adalah terhentinya kegiatan ekonomi masyarakat sekitar Merapi sebesar Rp. 8,008 milyar.

#### **g. Pasar**

Pasar tradisional yang merupakan transaksi jual beli barang dan jasa penduduk sekitar lereng Merapi telah mengalami kerusakan skala berat serta skala ringan, dengan jumlah kerugian akibat tidak beroperasinya pasar diperkirakan sebesar Rp. 372,126 milyar.

#### **h. Pariwisata**

Sektor Pariwisata yang memanfaatkan keanekaragaman sumber daya alam serta budaya yang berkembang di sekitar Gunung Merapi, mendapat kerugian akibat kerusakan sarana dan prasarana pendukungnya sebesar Rp. 7,488 milyar, sedangkan kerugian hilangnya pendapatan penduduk yang bekerja di sektor Pariwisata adalah sebesar Rp. 70,525 milyar.

## **i. Keuangan dan Perbankan**

Kerugian yang dihadapi oleh lembaga keuangan dan perbankan berupa kredit macet dari penduduk yang terkena musibah Merapi, karena kehilangan aset-asetnya (jaminan, dsb) sehingga tidak mampu untuk melunasi hutangnya yang mereka sanggupi. Kondisi tersebut menyebabkan terhentinya program – program penguatan modal dari pemerintah daerah, sehingga kerugian yang peroleh sebesar Rp. 308,744 milyar.

## **2. Kondisi Pedesaan Yang Mengalami Bencana**

Penduduk wilayah Merapi Kabupaten Sleman yang terkena bencana dasyat adalah mereka tinggal di kawasan sabuk Merapi (*ringbelt*) yang merupakan sumber air dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan dan ekosistem gunung Merapi, yaitu Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem dan Kecamatan Cangkringan. Mata pencaharian penduduk desa di ke tiga kecamatan tersebut adalah pertanian (petani sawah, petani ladang, perkebunan dan peternak), jasa pariwisata alam pegunungan dan industri rumah tangga.

Ciri khas pedesaan di wilayah kecamatan tersebut adalah jarak masing-masing rumah saling berjauhan, batas rumah tidak jelas, hanya dibatasi oleh pepohonan tertentu atau pagar pohon hidup disekeliling rumah. Hampir semua rumah di desa memiliki pekarangan, yang ditanami tanaman pangan dan tanaman industri dan beberapa ekor ternak seperti, sapi, ayam dan unggas lainnya. Sedangkan di luar desa terdapat tanaman perkebunan atau “kebun” tidak terlalu luas ( $< 1$  ha) terdapat tanaman homogen seperti, kelapa, buah-buahan, atau pohon salak.

Kebon atau sering disebut “kebonan” sedikit lebih luas daripada pekarangan, hanya ditanami satu jenis tanaman untuk satu masa tanaman seperti, kopi, kelapa, sengo dan tanaman komersial

lainnya seperti salak. Di luar kebun terdapat padang atau semak-semak merupakan lapangan hijau yang bisa untuk penggembalakan ternak dan tanah lapang yang ditumbuhi rumput sebagai pakan ternak. Sedangkan daerah persawahan terletak di lahan yang sifatnya landai dan biasanya mendapat aliran air irigasi yang cukup baik. Lahan persawahan terdiri dari sawah milik penduduk desa dan sawah milik desa tidak boleh dijual belikan yang sering disebut bengkok atau “tanah lungguh”.

Penduduk desa di kawasan tersebut telah menyatu dengan alam sekitarnya, baik sebagai tempat tinggal dan sebagai sumber mata pencaharian. Dengan datangnya bencana erupsi Merapi bulan Oktober – November 2010 di wilayah tersebut sarana dan prasarana ekonomi (rumah, lahan pertanian, sarana transportasi jalan dan alat-alat ekonomi lainnya) mengalami kerusakan serta kehancuran, sehingga mata pencaharian penduduk terhenti sama sekali. Secara keseluruhan akibat letusan dasyat dengan muntahan material vulkanik telah menghancurkan sebagian besar lahan pertanian dan tempat tinggal di kabupaten Sleman pada *level ringbelt* bagian utara.

Kecamatan Cangkringan merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Sleman yang desa – desa nya mengalami kerusakan paling berat di banding dengan kecamatan yang lain. Oleh sebab itu, di daerah tersebut mendapat perhatian penuh dari pemerintah setempat dan pemerintah pusat, melalui dinas – dinas terkait. Sejumlah desa yang mendapatkan penanganan khusus baik sarana dan prasarana rumah tinggal sementara dan kebutuhan hidup sehari-hari antara lain; Desa Glagaharjo, desa Kepuharjo dan Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan. Ketiga desa tersebut terletak 3 km dari puncak Merapi, sehingga muntahan lahar dan awan panas langsung menghancurkan ke tiga desa tersebut.



### **a. Kasus Desa Glagaharjo/Selter Bronggang Kecamatan Cangkringan**

Matapencaharian utama penduduk adalah 1) pertanian sawah dan hortikultura 2) Beternak sapi perah dan kambing, 3). Berternak unggas (ayam, bebek) 4) pedagang kecil hasil pertanian, 5). Usaha Huller (mesin penyosoh padi), 6) Usaha kerajinan meja dan kursi dari kayu dan rotan, 7) Pegawai Negeri dan Swasta. Mayoritas Penduduk desa Glagaharjo bekerja disekitar desanya sebagai petani sawah dan hortikultura dengan penghasilan rata-rata Rp. 3 juta per ½ hektar per musim atau 4 bulan berarti penghasilan per bulan Rp. 700.000,-. Menurut pendapat mereka penghasilan sebesar itu bagi kebutuhan keluarga boleh dikatakan pas – pasan. Untuk kebutuhan tambahan sebagian besar penduduk adalah beternak unggas, seperti ternak ayam dan bebek. Bagi penduduk yang tidak mempunyai lahan pertanian, mereka melakukan pekerjaan sebagai buruh tani, penggali pasir di sekitar desa, atau melakukan pekerjaan menjadi buruh bangunan di kota Yogyakarta. Ternak sapi pedaging selain untuk cadangan atau tabungan, oleh penduduk juga dimanfaatkan untuk mengerjakan lahan sawah, sedangkan ternak kambing dan ayam digunakan untuk keperluan atau kebutuhan yang sifatnya mendadak, seperti kebutuhan sosial dalam rumah tangga, biaya sekolah anak dan biaya kesehatan dan lainnya.

#### **- Aktifitas Pekerjaan setelah terjadi Bencana**

Setelah kejadian erupsi Merapi, sebagian lahan pertanian terkena timbunan pasir dan lahar dingin, sehingga lahan tidak dapat diusahakan lagi untuk kegiatan pertanian sawah dan hortikultura. Namun demikian untuk lahan yang tidak terkena pasir atau lahar, maka oleh sebagian penduduk, lahan tersebut digunakan untuk mengusahakan tanaman palawija. Hingga saat ini, untuk kebutuhan sehari-hari bagi penduduk yang tinggal di selter atau HUNTARA,

mereka masih mengandalkan pada pemberian bantuan pihak swasta, pemerintah, relawan atau sanak saudara. Karena sawah tidak bisa di olah, beternak juga belum juga belum memungkinkan, sedangkan lahan yang tersisa untuk menghidupi ternak mereka sangat terbatas, dan hingga saat ini mulai mewabahnya serangan hama tikus. Sehingga dengan sedikit sisa tanaman yang tersedia akan langsung di makan tikus.

Kegiatan rumah tangga yang tidak terkena dampak langsung erupsi Merapi adalah di sektor Jasa sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta, sedangkan yang bekerja pada usaha perdagangan, UKM dan kerajinan rumah tangga, tidak mendapat dampak langsung erupsi Merapi, sehingga mata pencaharian tersebut dapat bertahan. Akan tetapi terdapat penduduk yang melakukan kegiatan usaha kerajinan / industri rumah tangga, usaha Huler (mesin penyosoh padi) yang usahanya berhenti, karena alat-alat produksi hancur, sehingga menimbulkan kerugian puluhan juta rupiah bahkan ratusan juta. Untuk dapat mengembangkan usaha lagi perlu modal usaha, yang hingga saat ini belum mereka dapatkan kembali.

Kegiatan rumah tangga yang bisa diandalkan untuk kebutuhan rumah tangga selama penduduk masih tinggal di Selter adalah Usaha penambangan pasir, baik disekitar rumah yang terkena timbunan pasir. Pasir dijual satu truk Rp. 90.000,- kepada penampung dibagi 3 orang dalam satu kelompok berarti tiap orang mendapat Rp. 30.000,- sebagai buruh tambang pasir biasanya mendapat Rp. 15.000,- per ½ hari. Dan penambangan pasir satu-satunya harapan yang dapat dipertahankan selam masih melumbisa melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pertanian.

#### - **Permasalahan Mata Pencaharian akibat Erupsi Merapi**

Lahan pertanian masih belum dapat diolah seperti semula. Karena sebagian besar tertutup pasir, jadi harus memindahkan atau

mengeruk pasir di lahan pertanian. Sedangkan petani yang mengolah lahan sawah yang tidak tertimbun pasir, hasilnya masih belum dapat diandalkan, salah satu sebab adalah serangan hama tikus dan hama wereng. Demikian pula lahan tanaman sayuran hasilnya baik akan tetapi harganya sangat rendah yang menghasilkan harga tomat 1 kg hanya Rp. 300,- , cabe per kilo Rp. 6000,- , Terong harga per kilo hanya Rp. 400,- per kg. Dilihat dari penjualan hasil pertanian, tidak ada penanganan langsung mengenai penjualan hasil mereka, yang seharusnya perlu di bantu atau di proteksi atas hasil tanaman mereka agar dapat di jual dengan harga yang mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangganya.

Bentuk bantuan pemerintah daerah berkaitan dengan pengembangan mata pencaharian sehari –hari masih dirasakan belum mencukupi, sebagai contoh bantuan berupa ikan lele dan ternak unggas ayam, tidak dapat mereka pelihara secara maksimal, karena masih di selter, yang terbatas. Bentuk bantuan pelatihan usaha industri kecil bagi penduduk yang tinggal di selter, seperti menjahit, bikin makanan ringan, agar dapat alih usaha tidak bisa dilaksanakan, karena keterbatasan bahan bakunya tidak tersedia, dan bagi masyarakat tidak dengan mudah melakukan alih kegiatan usaha lainnya yang tidak biasa mereka lakukan apalagi tidak mereka minati.

#### **b. Kasus Desa Kepuharjo/Selter Plosokerep Kecamatan Cangkringan**

Letak desa Kepuharjo hanya berjarak 3 km dari arah puncak merapi, jadi sebagian besar penduduk bertempat tinggal di kawasan paling ujung merapi, yang kawasan rerumputan dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan dan ekosistem gunung Merapi. Matapencaharian utama penduduk sebelum terjadinya erupsi adalah 1). Beternak sapi perah, 2). Berternak unggas (ayam) 3). Pedagang

asongan kerajinan tangan dan kerajinan alami bahan rumput hias dan kayu hutan 4). Pemandu Wisata dan perparkiran.

Mayoritas Penduduk desa Plosos Kerep - Kepuharjo bekerja disekitar desanya sebagai peternak sapi perah penghasilan rata-rata Rp. 2- 3 juta per bulan. Dengan rata-rata pemilikan ternak sebanyak 2 – 10 ekor per rumah tangga. Menurut pendapat mereka penghasilan sebesar itu cukup untuk kebutuhan keluarga, dapat menyekolahkan anak dan kebutuhan rumah tangga. Selain itu sebagai pemandu wisata di sekitar daerah wisata yang sangat dekat dengan kediaman mereka, sehingga dapat mengusahakan perparkiran yang dikelola desa. Bagi yang tidak mempunyai ternak sapi, melakukan pekerjaan sebagai buruh memotong rumput untuk pakan ternak.

#### **- Aktifitas Pekerjaan setelah terjadi Bencana**

Pada saat ini setelah terjadi erupsi Merapi, rumah – rumah semua hancur, dan sebagian kawasan tanaman rumput terkena timbunan pasir dan lahar dingin, sehingga tidak dapat diusahakan lagi untuk kegiatan peternakan. Sebagian warga pada saat ini mengusahakan sebagai pemandu wisata transportasi wisata (ojek) dan perparkiran, pada saat sore hari kembali ke tempat hunian sementara (HUNTARA) yang letaknya sekitar 3 km. Untuk kebutuhan sehari-hari penduduk yang tinggal di selter atau HUNTARA masih mengandalkan pada pemberian bantuan dari pihak swasta, pemerintah, relawan dan sanak saudara.

Pendapatan sementara warga usaha ojek motor, mengantar pengunjung kawasan bencana Merapi. Sekaligus pemandu wisata lava tour di bekas Dusun Kinahrejo, tempat juru kunci Merapi, Mbah Marijan menghabiskan masa hidupnya. Pendapatan setiap mengantara pengunjung Rp 20.000,- pendapatan tersebut dipotong Rp 5.000 untuk dana kas desa. Jadi, dalam satu hari rata-rata memperoleh pendapatan sekitar Rp 75.000,- dan menjadi tukang ojek dan pemandu

wisata di kawasan bencana Merapi sejak tanggal 8 Desember lalu. Penghasilannya tergantung cuaca, apabila tidak hujan bisa melayani enam pengunjung per hari.

Pendapatan selaku profesi guide wisata rata-rata per hari mendapat Rp. 100.000,- Para pengungsi asal Dusun Ngancar, Desa Glagahharjo, Kecamatan Cangkringan tersebut mengatakan bahwa kesibukannya sebagai guide bisa untuk bertahan hidup. Akan tetapi sebagian besar pengungsi meskipun sudah mendapat rumah hunian sementara, ia masih kepikiran masalah ekonomi keluarganya. Saat ini masalah kebutuhan sehari-harinya masih tergantung pasokan logistic di lokasi pengungsian.

#### - **Permasalahan Mata Pencarian akibat Letusan**

Lahan tertimbun pasir dan belum dapat diolah, kembali. Menurut hasil penelitian biologi diperlukan waktu 2 – 3 tahun lagi pemulihan lahan, dengan cara menggali pasir, dan merubah struktur tanah di campur dengan kompos, agar dapat ditanami. Sehingga samapai saat ini lahan menganggur belum dapat diusahakan untuk lahan pertanian.

Pergantian ternak sapi yang telah dilakukan oleh pemerintah, diberikan kepada pemilik sapi berupa uang kontan, dewasa itu Rp. 8,5 juta, setengah dewasa Rp.5 juta, dan anak sapi (*pedet*) Rp.3.5 juta. Walaupun sudah ada ganti rugi, belum dapat mengusahakan ternak sapi kembali. Faktor utamanya adalah masih tinggal di HUNTARA, sehingga lingkungannya tidak mendukung untuk perkembangan usaha sapi perah. Disamping itu, posisinya belum jelas, tempat tinggal yang tetap. Menurut rencana khususnya masyarakat Kinarejo sudah beli tanah untuk bedol deso dengan melakukan relokasi mandiri di lokasi mandiri. Sejak pengungsian awal sebelum di HUNTARA sudah merencanakan untuk relokasi mandiri. Mereka menyadari situasi kondisi Kinahrejo saat ini yang tidak memungkinkan menantang alam,

tetapi yang dapat dilakukan adalah bagaimana untuk mensiasati alam tersebut.

Sejarah perkembangan sapi di mulai sejak sapi potong itu di perkenalkan di desa pada tahun 1980, akan tetapi mengalami kegagalan. Kemudian berganti usaha sapi perah pada tahun 1998, dan terdapat kemajuan pesat, sehingga secara umum dapat untuk menopang kebutuhan hidup di kampung. Kemajuan usaha sapi perah bagi penduduk desa dapat ditunjukkan oleh perubahan fisik bangunan rumah dari gedeg menjadi bentuk tembok. Artinya dari aspek ekonomi penduduk di Kinahrejo sudah semakin maju. Akan tetapi karena bencana Merapi perlu pembenahan kembali untuk masa yang akan datang bagi kelangsungan kehidupan masyarakat. Agar dapat menghidupkan kembali usaha ternak sapi. Bagi penduduk desa mengharapkan agar pemerintah membantu penyelesaian masalah pemukiman agar segera terealisasi tempat relokasi mandiri, agar dapat dibangun dan mempunyai sertifikat tanah yang baru, untuk kehidupan masyarakat tenteram kembali. Untuk kehidupan ekonomi tetap mengharap peternakan sapi perah agar hidup kembali, dengan lahan rumput di tempat semula. Sebagai kerja sambilan mengusahakan ojek, warung, ada workshop di kawasa wisata.

### **C. Dampak Erupsi Merapi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan**

Dasar normatif dari pentingnya hak atas layanan pendidikan telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan maupun konvensi Internasional yaitu UUD 1945 yang telah diamandemen (Pasal 31); UU No.23 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Anak dan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 60). Pada tingkat Internasional, diantaranya adalah Konvensi Hak Anak (*the Convention on the Rights of the Child*) tahun 1989 maupun deklarasi “pendidikan untuk semua” di Dakar pada tahun 2000, termasuk pendidikan bagi korban bencana.

Dengan demikian, layanan pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar penting yang tetap harus dipenuhi meskipun dalam kondisi bencana.

Erupsi Gunung Merapi yang terjadi sekitar akhir tahun 2010, merupakan bencana yang menyebabkan jatuhnya korban yang tidak ternilai besarnya, karena menyangkut korban jiwa, korban harta benda dan kerusakan berbagai infrastruktur pelayanan public, termasuk di sector pendidikan, seperti bangunan sekolah dan berbagai peralatan mengajar / bahan ajar.

Tulisan pada sub - bagian ini akan membahas identifikasi permasalahan pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar bagi korban bencana merapi dari warga selama tinggal di pengungsian dan di shelter atau Huntara (Hunian sementara), berdasarkan diskusi kelompok terfokus dengan tokoh masyarakat dan warga di lima lokasi huntara yaitu huntara Kuwang, Plosokerep dan Banjarsari yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Sleman, serta huntara Balerante (Kabupaten Klaten) dan huntara Mancasan (Kabupaten Magelang). Selain berbagai permasalahan layanan pendidikan, akan dikemukakan pula upaya-upaya dan bantuan yang telah dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat bagi layanan pendidikan dasar warga korban erupsi Merapi serta beberapa pokok pikiran sebagai usulan untuk mengatasi persoalan terkait.

## **1. Kawasan Rawan Bencana dan Fasilitas Pendidikan**

Sarana dan prasarana pendidikan seperti bangunan sekolah yang terletak di kawasan rawan bencana/zona ancaman bencana, berpotensi besar mengalami kerusakan pada saat erupsi Merapi. Berdasarkan data Potensi Desa –BPS pada Tahun 2008 bangunan sekolah yang berlokasi di zona ancaman bahaya erupsi merapi di Provinsi Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Magelang, Boyolali dan Klaten serta Kabupaten Sleman – Provinsi DIY, terdapat 132

Taman Kanak-Kanak, 169 Sekolah Dasar, 27 Sekolah Menengah Pertama, 15 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Kejuruan), serta 3 Perguruan Tinggi/Akademi negeri dan swasta di wilayah Merapi. Selain itu, terdapat juga 5 Sekolah Luar Biasa, 18 Pondok Pesantren, dan 39 Madrasah Diniyah (setingkat SD) dan 1 buah sekolah Seminari. Secara detail, rincian fasilitas pendidikan menurut lokasi Kecamatan di empat Kabupaten dapat dilihat pada tabel 2.8 sebagai berikut :

**Tabel 2.8. Sekolah Yang Berlokasi di Zona Ancaman Bahaya Merapi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah**

Kecamatan	Kabupaten	TK	SD	SMP	SMA	SMK	PT/ Akademi
Srumbung	Magelang	14	16	1	0	0	0
Dukun	Magelang	15	21	4	0	0	0
Sawangan	Magelang	3	8	1	0	0	0
Selo	Boyolali	15	18	2	0	1	0
Cepogo	Boyolali	6	10	0	0	0	0
Musuk	Boyolali	9	12	1	0	0	0
Kemalang	Klaten	13	16	1	0	0	0
Ngemplak	Sleman	12	13	2	0	1	2
Turi	Sleman	7	11	2	0	1	0
Pakem	Sleman	22	23	9	4	4	1
Cangkringan	Sleman	16	21	4	2	2	0
TOTAL	132	169	27	6	9	3	

Sumber : Podes 2008, BPS, dalam Bappenas dan BNPB, 2011

Lokasi sekolah di empat kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY, Kabupaten Sleman mempunyai proporsi dan jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar yang paling banyak di banding kabupaten lainnya. Untuk jenjang SD yang berlokasi di Sleman ada sebanyak 84 sekolah atau sekitar 50 persen dari jumlah seluruh bangunan sekolah SD. Artinya sebnyak 50 persen sisanya tersebar di



tiga kabupaten yaitu Magelang, Boyolali, dan Klaten. Demikian pula untuk tingkat SMP, jumlah bangunan terbesar berada di Kabupaten Sleman. Konsekuensi dari kondisi ini adalah kerusakan terbesar dari fasilitas pendidikan pada saat terjadi erupsi Merapi juga berada di kabupaten Sleman.

Sementara itu jumlah sekolah yang berada di Zona Rawan bencana berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman pada tahun 2010, jumlahnya sebanyak 514 unit Sekolah Dasar.( Lihat Peta Sekolah di Zona Bahaya Merapi →Lampiran 1). Jumlah sekolah yang semakin banyak yang berlokasi di zona bahaya Merapi , akan meningkatkan potensi kerusakan apabila terjadi erupsi.

## **2. Permasalahan pelayanan pendidikan akibat erupsi Merapi**

### **- Kerusakan Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa banyaknya sekolah yang berada di zona bahaya Merapi akan berpotensi mengalami kerusakan apabila terjadi erupsi, terutama yang berlokasi di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III yang berjarak 0-10 km dari puncak Merapi. Terdapat 5 unit bangunan TK dan 6 unit bangunan SD di Kabupaten Sleman mengalami kerusakan parah terkena awan panas. Kondisi sekolah yang berada di KRB-III ini perlu perbaikan total bahkan relokasi. Kondisi sekolah yang berada di KRB 2 (10-15 Km) mengalami kerusakan ringan sampai parah sehingga perbaikan ringan sampai berat atau relokasi terutama yang berada di tepi sungai jalur lahar. Kondisi sekolah yang berada di KRB 1 (15-20 Km) tidak rusak, tetapi penuh dengan debu dan pasir, sehingga perlu pembersihan. Penilaian kerusakan dan kerugian ini tidak hanya menghitung kerusakan gedung sekolah, tetapi juga sarana prasarana di dalamnya seperti: mebeuler, peralatan sekolah, dan ruang-ruang pendukung untuk kegiatan guru dan siswa. Akibat erupsi merapi sub sektor pendidikan

mengalami kerusakan sebesar Rp.14,96 Miliar dan kerugian sebesar Rp.8,84 Miliar.(Bappenas, 2011).

Sementara itu, kerusakan bangunan sekolah di Kabupaten Magelang , sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang bahwa : “ sebanyak 211 ruangan sekolah mulai dari TK hingga SMA rusak akibat erupsi Gunung Merapi. Dari jumlah tersebut, 30 ruangan berada dalam kondisi rusak berat hingga ambruk, 57 rusak sedang, dan 112 ruangan rusak ringan. Sekitar 50 persen dari total 211 ruang yang rusak tersebut adalah ruang kelas. Kondisi ruangan disebut rusak berat jika memiliki tingkat kerusakan 85 persen atau lebih sehingga tidak bisa ditempati. Kondisi rusak sedang jika tingkat kerusakan berkisar 45 persen dan rusak ringan jika tingkat kerusakan minimal 25 persen. Kerusakan ini terjadi karena ruangan tertimpa abu dan pasir yang demikian banyak. Kerusakan yang cukup parah antara lain terjadi di SMK Muhammadiyah Borobudur karena atap bengkel produksi ambruk sebab tidak kuat menahan abu dan pasir yang begitu berat.. data tersebut merupakan data sementara dimungkinkan masih bisa bertambah karena wilayah yang termasuk dalam kawasan rawan bencana (KRB) III, belum dibuka karena berada dalam radius 10 kilometer dari Gunung Merapi. Karena di KRB III banyak terdapat SD, maka dimungkinkan sekolah yang ruangnya banyak mengalami kerusakan adalah SD. Sementara itu, berdasarkan data Posko - di Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten dan Kota Wilayah II Kedu-Surakarta menyebutkan di tiga kabupaten di Jateng (Klaten, Boyolali, dan Magelang), terdapat 587 ruangan di 84 SMP dan SMA yang rusak. (Kompas, 29 November 2010).

## - **Berkurangnya Akses Terhadap Layanan Pendidikan**

Adanya kerusakan sarana dan prasarana pendidikan berimplikasi terhadap berkurangnya akses layanan pendidikan yang memadai, dan kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu atau bahkan terhenti. Hal itu terjadi karena beberapa faktor, pertama, banyak fasilitas sekolah baik sekolah dasar maupun sekolah menengah di lereng Merapi yang hancur atau rusak akibat letusan Merapi, dan tidak dapat dipergunakan lagi. Faktor kedua, banyak bangunan sekolah yang dimanfaatkan sebagai lokasi pengungsian, sehingga tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Ketiga, sebagian siswa dan guru yang turut menjadi korban letusan gunung Merapi, serta banyak anak-anak yang ikut mengungsi orang tua mereka.

Data Siswa di Pengungsian per 11 November 2010 hasil pemetaan Posko –pendidikan untuk Merapi Kemdiknas<sup>7</sup>, mendapatkan sebanyak 6.126 siswa jenjang TK sampai dengan SMA yang tersebar di delapan titik pengungsian yaitu : Pengungsian Stadion Maguwoharjo, pengungsian di Kecamatan Mlati, pengungsian di Kecamatan Tempel, pengungsian di Kecamatan Ngaglik, pengungsian di Kecamatan Gamping, dan pengungsian di Kecamatan Prambanan. Jumlah tersebut, baru terbatas pada delapan lokasi pengungsian, sementara jumlah seluruh pengungsian di Kabupaten Sleman mencapai lebih dari 500 titik . Artinya, jumlah siswa yang harus mendapat pemenuhan kebutuhan pendidikan jumlahnya pasti lebih besar, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan darurat dengan cakupan yang lebih besar.

---

<sup>7</sup> Posko Pendidikan Untuk Merapi KEMDIKNAS merupakan posko tanggap darurat bencana yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional terutama dalam menangani korban pengungsi di bidang pendidikan yang beralamat di PPTK Matematika KEMDIKNAS - Jl. Kaliurang KM 6,5 Sambisari Depok Sleman DIY

Permasalahan berkurangnya akses terhadap sarana pendidikan di pengungsian diantaranya telah diatasi melalui layanan pendidikan darurat, yaitu dengan cara mengarahkan semua peserta didik untuk belajar mandiri dengan bimbingan guru yang dikirimkan ke lokasi pengungsian atau ditiptkan di sekolah yang berdekatan. Akan tetapi pada saat ini setelah keluarga, orang tua dan siswa korban erupsi Merapi tinggal di *shelter* atau hunian sementara (Huntara), maka persoalan lain justru timbul. Untuk Huntara yang tidak disertai bangunan sekolah, warga merasa sekolah yang ada di sekitar huntara masih relatif jauh, sehingga memerlukan biaya transport, memerlukan waktu khusus orang tua untuk antar jemput siswa ke sekolah dirasakan semakin memberatkan orang tua siswa dengan kondisi tidak mempunyai sumber penghasilan tetap. Penuturan salah satu orang tua siswa di Huntara Kuwang yang dihuni oleh sekitar 300 KK yang berasal dari 10 pedukuhan Desa Argomulyo yang tinggal di sekitar lereng Merapi sebagai berikut :

“Setelah tinggal di huntara ini, kami merasakan kerepotan anak-anak yang harus sekolah agak jauh, karena harus naik kendaraan umum. Kalau orang tuanya ada motor juga perlu biaya bahan bakar”.

Hal yang sama juga dirasakan oleh orang tua siswa yang tinggal di huntara Mancasan, Muntilan sebagai berikut :

“Jadi kalau berkaitan dengan pendidikan anak kendala utama adalah jarak sekolah yang jauh , sehingga memerlukan tambahan ongkos, bensin, juga tambahan waktu, repot juga orang tua “

Meskipun tersedia sarana dan prasarana pendidikan di sekitar huntara, namun dalam kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih, untuk menjangkau lokasi sekolah yang ada menjadi beban yang cukup berat.

## - **Layanan Pendidikan dan Relokasi Sekolah**

Persoalan akses terhadap layanan pendidikan bagi Warga korban erupsi Merapi yang tinggal di huntara Banjarsari, Glagaharjo Kabupaten Sleman cukup pelik. Hal itu berkaitan dengan kembalinya sebagian besar warga dari huntara ke tempat tinggal desa asal mereka di Dusun Srunen, Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan Sleman, sehingga SD Srunen (darurat) yang dibangun di huntara Banjarsari tidak lagi dimanfaatkan oleh siswa. Setelah libur lebaran, seiring dengan kembalinya orang tua siswa dan warga ke dusun asal, sebagian besar siswa lebih memilih bersekolah di gedung sekolah lama di SD Srunen yang berlokasi di pemukiman mereka. Akibat erupsi Merapi, sekolah tersebut mengalami kerusakan berat. Tetapi, tanpa sepengetahuan Pemkab Sleman, ada pihak lain (swasta) yang memperbaiki gedung SD Srunen Namun karena gedung sekolah tersebut berada di kawasan rawan bencana / terlarang, maka Pemkab Sleman tidak memberi izin dan melarang semua guru mengajar di SD tersebut dan tetap menginstruksikan siswa untuk sekolah di SD Srunen di huntara Banjarsari. Sementara itu, untuk mencapai sekolah darurat di Huntara Banjarsari, siswa harus menempuh jarak anatar 8 – 10 kilometer., dan jika menggunakan angkutan umum atau ojek memerlukan biaya sekitar Rp.10.000 – Rp 15.000. Hal ini yang menjadi pertimbangan orang tua siswa untuk tetap menyuruh anaknya sekolah di SD Srunen (lama). Dikemukakan oleh orangtua siswa pada waktu diskusi kelompok terfokus di Huntara Banjarsari bahwa :

“Masalahnya warga terbentur biaya khususnya transportasi untuk mengantarkan anak, padahal perekonomiannya belum pulih, juga masalah waktu yang harus dibagi antara mencari pakan ternak dan mengantar anak “. “ ...bagi warga yang tak memiliki kendaraan, yang kadang terpaksa

membayar ongkos mahal seperti ojek, atau naik motor beberapa anak sekaligus" ; " ...untuk sekolah di Selter, harus antar jemput karena anak kelas 1 atau kelas 2 SD masih kecil, berarti empat kali naik turun angkot, kalau naik ojek terlalu mahal. Dalam situasi masa pemulihan ekonomi yang masih sulit setelah bencana kemarin, hal itu merupakan beban bagi kami ....".

Di sisi lain, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tetap berpedoman pada kebijakan bahwa wilayah terlarang (KRB -III) tetap tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas. Pemerintah Kabupaten sejak 8 September 2011 tak mengirimkan guru ke SD Srunen dengan dasar Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi. Srunen masuk kawasan sembilan dusun yang harus dikosongkan, bahkan SDN Srunen termasuk salah satu sekolah yang akan di-relokasi. Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Sleman, mengenai rencana relokasi fasilitas pendidikan pasca erupsi Merapi tahun 2011, terdapat 6 sekolah TK ( TK ABA Ngrangkah, TK Basari, TK Puspitasari, Kuncup Mekar, Citra Rini, Glagaharjo ) dan , 7 SD (SDN Srunen, SDN Glagaharjo, SDN Gungan, SDN Pangukrejo, SDN Petung dan SD Bronggang dan Bronggang Baru), serta satu SMP Negeri 2 Cangkringan. Bahkan dikemukakan oleh asisten II Pemkab Sleman bahwa : "Jika Pemkab Sleman mengirimkan guru untuk mengajar di SD Srunen (lama) yang berada di kawasan rawan bencana itu, bisa dipidanakan. kalau kami mengirim guru untuk mengajar di sana bisa diancam pidana," (*Media Indonesia*, 17 September 2011).

Dengan adanya dua pendapat yang saling bertahan tersebut, maka permasalahan menjadi berlarut-larut, sekitar 130 siswa menjadi terlantar dan dirugikan karena tidak mendapat pendidikan. Sebagaimana disampaikan pada waktu diskusi kelompok terfokus di huntara Banjarsari, apabila tidak ada titik temu antara warga dan

pemerintah menyangkut persoalan SD Srunen, maka warga berkeinginan akan memindahkan anaknya ke SD di Balerante di wilayah Klaten Jawa Tengah. Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang nara sumber bahwa :

“ Nah sekarang kuat-kuatan ini ada 149 murid terlantar, nggak ada guru, berarti kalau tidak ada respon dari pemerintah kami sepakat akan memindahkan anak-anak ke SD Balai Rantai, meskipun termasuk wilayah Kabupaten Klaten, tapi masih terjangkau. Ya kalau tidak ada respon dari pemerintah Sleman, dari pada nggak sekolah, untuk mengurangi pengeluaran per harinya, kan murid mau jalan kaki juga bisa nggak terlalu jauh gitu lo, paling sekitar sekilo, kalau dari sini jalan kan jauh, kalau jalan kabupaten memang jauh bu itu yang Balai Rantai itu kan sama-sama termasuk daerah anu to KRB3 itu, kemarin kena awan panas tapi disana untuk warga nggak dilarang juga, lha masalah lokasi malah dibantu”

Penyelesaian masalah SD Negeri Srunen, sebetulnya telah diupayakan oleh berbagai pihak. DPRD Sleman, sekitar pertengahan September telah mengundang pihak terkait untuk musyawarah bersama. Dalam musyawarah yang dihadiri para Pejabat Pemkab Sleman, Kepala Desa Glagaharjo dan sejumlah wali siswa SD Srunen tersebut, disepakati untuk penyelesaian penyelenggaraan pendidikan SD Srunen dipilih 2 opsi yang kemudian akan dibahas lagi, yaitu : “ akan meminta izin bupati agar penyelenggaraan pendidikan sementara waktu tetap berlangsung di SD Srunen dan opsi ke-2, dibangunnya tempat pendidikan sementara di padukuhan Gading, Kelurahan Glagaharjo, Cangkringan ([www.jogjatv.tv/berita/16/09/.../ penyelesaian-sdn-srunen-di-pilih-2-opsi](http://www.jogjatv.tv/berita/16/09/.../penyelesaian-sdn-srunen-di-pilih-2-opsi))

Berdasarkan dua opsi dan alternative tersebut, maka diharapkan segera ada titik temu, sehingga penyelenggaraan pendidikan di SD Srunen tidak berlarut-larut, sehingga kepentingan anak didik tidak menjadi korban, mengingat bahwa kebijakan relokasi sekolah sampai saat ini juga belum ada kepastian yang jelas, di mana sebagian besar relokasi sekolah dinyatakan bahwa belum ada lokasi untuk pemindahan sekolah – sekolah tersebut. Bahkan, relokasi sekolah untuk SDN Srunen dan Glagaharjo dinyatakan masih akan ditunda. Sementara itu yang berstatus dapat direkomendasikan hanya ada empat sekolah (SDN Gungan, Pangukrejo, Bronggang dan Bronggang Baru). (Pemerintah Kabupaten Sleman, 2011).

Kondisi tersebut mencerminkan ketidakpastian yang merugikan siswa, karena proses belajar mengajar menjadi terbengkelai meskipun untuk sementara dibantu oleh para relawan melakukan kegiatan belajar mengajar. Akan tetapi dalam kasus SDN Srunen, tanggung jawab negara terhadap layanan pendidikan dengan tidak memfasilitasi proses belajar mengajar menjadi “lemah”, meskipun karena alasan keamanan .

**- Kasus – kasus trauma, dan kesulitan adaptasi yang dirasakan siswa menurunkan konsentrasi belajar**

Letusan Gunung Merapi yang telah terjadi pada akhir tahun lalu juga meninggalkan trauma yang luar biasa, terutama trauma pada anak-anak. Trauma akan letusan Merapi, trauma di pengungsian, ada yang terpisah dari keluarga, bahkan ada yang menjadi yatim piatu. Meskipun bencana Merapi sudah terjadi hampir satu tahun hingga kini, akan tetapi masih memisahkan anak-anak yang mengalami trauma walaupun dalam tingkatan yang relatif rendah. Sebagaimana dikemukakan oleh beberapa nara sumber penghuni Selter di Kuwang bahwa:

“.....Sampai saat ini anak-anak masih mengalami trauma antara lain rasa takut yang timbul pada saat melihat kabut dan mendengar “*gluduk*” apalagi petir. Kondisi tersebut



terjadi karena anak-anak tersebut melihat kabut dan petir pada waktu meletusnya Gunung Merapi. Selain itu, hingga saat ini ada beberapa anak yang menjadi pendiam”

Untuk itu, perlu terus dilakukan upaya-upaya untuk mengembalikan kepercayaan diri , terutama anak-anak. Pada waktu masih tinggal di pengungsian, berbagai pihak baik dari pemerintah, swasta maupun LSM banyak melakukan kegiatan *trauma healing*. Akan tetapi setelah tinggal di Huntara, kegiatan tersebut baru dilakukan satu kali untuk huntara Kuwang. Padahal terdapat sebagian anak-anak yang masih memerlukan kegiatan tersebut dan perlu pendampingan. Utuk huntara plosokerep pendampingan masih cukup intensif dilakukan.

Sementara itu, berkaitan dengan konsentrasi belajar anak – anak selama dalam masa pengungsian, terutama pada saat mengikuti program ‘penitipan sekolah” di sekolah terdekat dengan lokasi pengungsian, anak-anak merasa minder dan kurang dapat menyesuaikan diri dengan cepat, karena berada di lingkungan sekolah baru serta kawan-kawan baru. Konsentarasasi belajar anak pada waktu telah menempati Huntara juga mengalami kesulitan. Pada waktu tinggal di rumah, mempunyai kamar sendiri dengan fasilitas meja belajar, sehingga dapat belajar lebih tenang. Sementara di Huntara, kondisinya tentu jauh berbeda dengan fasilitas yang terbatas.

Konsentrasi belajar anak-anak pada waktu tinggal di pengungsian juga terganggu. Padahal pada waktu itu dalam masa persiapan menghadapi ujian akhir sekolah dan Ujian Nasional. Gedung sekolah banyak mengalami kerusakan parah. Jadwal dan agenda kegiatan belajar-mengajar pun carut-marut karena sekolah diliburkan dan diposko pengungsian tidak mungkin dilakukan proses kegiatan belajar mengajar secara efektif.

Sejak bencana meletusnya Gunung Merapi di akhir tahun lalu, berbagai kegiatan sosial telah dilakukan oleh berbagai pihak baik dari Perguruan Tinggi maupun pihak swasta dan relawan serta dari LSM, diantaranya mengadakan pendampingan belajar secara intensif dengan cara “karantina siswa yang akan menghadapi ujian. Tetapi hal ini hanya dilakukan dilokasi pengungsian yang terbatas..

- **Siswa Korban Merapi Terpaksa Mengalami Putus Sekolah.**

Erupsi Merapi selain memberikan dampak dan kerugian yang cukup besar, juga mengakibatkan sedikitnya 424 orang di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah mengalami cacat permanen. Dari sejumlah korban yang menderita cacat tersebut 25 orang diantaranya adalah anak-anak usia sekolah. Dengan demikian diperlukan penanganan anak dengan kecacatan dalam situasi darurat di lokasi bencana dengan melibatkan banyak pihak yang mempunyai komitmen dan tanggung jawab, terutama berkaitan dengan pemenuhan hak anak atas layanan pendidikan terus dilaksanakan baik pada masa tanggap darurat maupun pasca darurat (rehabilitasi dan resosialisasi). Meskipun demikian, pada waktu kunjungan lapangan di Huntara Kuwang, Cangkringan Kabupaten Sleman ditemui dua remaja putri / siswi yang mengalami cacat karena menderita luka bakar, dan terpaksa tidak melanjutkan pendidikannya, karena merasa malu dan mengisolir diri. Kedua siswi tersebut sebelum mengalami musibah adalah pelajar SMP kelas dua, dan satu pelajar SMA kelas dua. Seharusnya mereka mendapatkan hak memperoleh layanan pendidikan, sehingga diperlukan kebijakan khusus, misalnya dengan mendatangkan guru kunjung.

Adanya siswa putus sekolah juga dialami oleh korban Merapi yang tinggal di Kabupaten Klaten. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Klaten mewaspadaai maraknya perdagangan manusia (*trafficking*) terutama

anak, pasca erupsi Gunung Merapi akibat putus sekolah. Koordinator Data dan Informasi Sekretariat Bersama (Sekber) P2TP2A Kabupaten Klaten, mencatat banyak anak berusia 12-14 tahun di Kecamatan Kemalang Klaten yang memilih bekerja menjadi penambang pasir ketimbang melanjutkan sekolah ke SMP maupun SMA. Begitu lulus SD, mereka tidak langsung melanjutkan ke jenjang lebih tinggi melainkan langsung bekerja, dan saat ini banyak orang-orang tidak bertanggungjawab yang sudah mulai mencari-cari anak korban Merapi untuk diajak bekerja dengan mengiming-iming gaji besar dan kehidupan yang layak, apalagi, orang tua kehilangan rumah dan pekerjaan. (<http://www.krjogja.com/krjogja/news/detail/59684/P2TP2A.Klaten.Waspada.Perdagangan.Anak.html>).

Persoalan putus sekolah dari siswa korban erupsi Merapi seharusnya tidak terjadi, apabila pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten melakukan pendataan bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Untuk siswa yang putus sekolah akibat menurunnya kemampuan orang tua karena hilangnya mata pencaharian akibat erupsi Merapi, dapat diberikan bantuan beasiswa yang telah dianggarkan oleh pemerintah, atau bantuan beasiswa yang berasal dari donator perusahaan swasta, organisasi keagamaan maupun perorangan. Sementara itu, untuk siswa yang mengalami musibah cacat karena erupsi Merapi juga perlu mendapat bantuan dan perhatian berlebih baik bantuan medis, psikologis maupun beasiswa serta mendapatkan pendidikan khusus.

#### **D. Dampak Erupsi Merapi terhadap Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan**

Sub bab ini khusus menjelaskan mengenai permasalahan kesehatan yang dialami oleh warga pengungsi selama mereka menetap di pengungsian dan di shelter (atau 'huntara' – hunian sementara). Dari lima shelter yang dikunjungi, 3 diantaranya masuk dalam

wilayah Kabupaten Sleman (Banjar Sari, Kuwang dan Ploso Kerep, sementara dua lainnya, terletak dalam wilayah Kabupaten Klaten (Balarante) dan Magelang (Mancasan). Sebagian besar warga masih menetap di shelter, seperti Kuwang, Ploso Kerep dan Mancasan. Sementara pengungsi yang awalnya menetap di shelter Balarante, sebagian besar penghuninya sudah kembali ke desa, sedangkan yang menetap di shelter Banjar Sari yaitu penduduk yang berasal dari 5 dusun, maka penduduknya yang berasal dari 3 dusun yaitu: Kali Tengah Lor, Kali Tengah Kidul dan Srunen, sudah menetap di “desa asal”nya kembali.

Menurut tahapan penanggulangan bencana (PP nomor 21/2008), maka untuk wilayah kabupaten Sleman saat ini sudah masuk pada tahap rekonstruksi yang direncanakan akan berakhir tahun 2013 atau maksimal sampai dengan tahun 2014. Dengan masuknya tahapan rekonstruksi maka masa pemulihan dini selama 5 bulan sudah berakhir, terhitung sejak bulan Desember 2010 sampai dengan bulan April 2011. Sejalan dengan masa itu, masa rehabilitasi pasca bencana gunung Merapi sudah dilaksanakan sampai dengan bulan ketujuh sejak bulan Januari 2011.

Terkait dengan dampak erupsi Merapi khususnya terhadap kesehatan maka berdasarkan hasil diskusi dengan para warga pengungsi yang berasal dari 5 huntara/shelter tersebut, dapat diidentifikasi tiga persoalan utama yang terkait dengan kesehatan saat di pengungsian, shelter dan setelah kembali ke desa asal, yaitu:

1. Terjadinya kerusakan infrastruktur kesehatan
2. Permasalahan terkait dengan kondisi kesehatan saat berada di pengungsian, shelter dan saat kembali ke desa
3. Belum dimanfaatkannya fasilitas pelayanan kesehatan dari pemerintah secara optimal

Dua dari tiga permasalahan tersebut yaitu yang pertama dan kedua terkait langsung dengan dampak dari erupsi Merapi, sedangkan yang ketiga, tidak terkait dengan dampak erupsi Merapi langsung karena hal tersebut lebih ke arah persepsi yang sudah terbangun sejak lama, namun hal ini juga dapat menimbulkan persoalan yang cukup serius bagi para pengungsi dalam hal pembiayaan pengobatan dan dalam jangka panjang dapat berdampak pada peningkatan kemiskinan (atau rentan menjadi jatuh miskin). Oleh karena itu persoalan tersebut juga perlu diangkat dalam pembahasan pada sub bab ini. Permasalahan tentang kondisi kesehatan yang menjadi fokus kajian adalah yang terkait dengan kelompok penduduk rentan, yaitu balita, lansia dan ibu hamil, meskipun permasalahan kesehatan secara umum juga disinggung dalam tulisan ini.

## **1. Identifikasi permasalahan kesehatan**

Tulisan dalam sub bab ini menjelaskan tentang tiga permasalahan utama yang telah teridentifikasi saat melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan beberapa tokoh masyarakat maupun anggota masyarakat lainnya yang menjadi korban erupsi Merapi 2010. Permasalahan terkait dengan kesehatan ini juga diuraikan saat sebelum dan sesudah terjadi erupsi Merapi, untuk mendapatkan gambaran yang relatif lengkap akan perubahan kondisi kesehatan yang dialami oleh warga desa yang tinggal di kelima shelter yang dikaji dalam penelitian ini.

### **- Kerusakan infrastruktur kesehatan**

Jarak dari dusun-dusun para warga yang menetap di kelima shelter tersebut terhadap puncak Merapi, berkisar dari yang paling dekat sekitar 4,5 km dari puncak Merapi sampai yang berjarak sekitar 19 km. Namun jauh dekat jarak tersebut nampaknya tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan apabila melihat dari

dampak kerusakan yang disebabkan. Meskipun berjarak relatif jauh dari puncak Merapi, namun sebagian dusun juga mengalami kerusakan lingkungan, infrastruktur maupun bangunan tempat tinggal yang relatif parah.

Dampak kerugian yang ditimbulkan akibat erupsi merapi dari tinjauan kesehatan adalah sebagai berikut: kerusakan infrastruktur kesehatan secara makro: berdasarkan laporan dari .... Sarana kesehatan yang rusak sebanyak 65 unit (Prov. DIY : 17 unit dan Prov. Jateng : 48 unit), terdiri dari 23 Pustu, 31 Poskesdes, 8 Puskesmas, 2 Rumah Dinas dan 1 RS. Khususnya untuk wilayah Kabupaten Sleman, fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan akibat erupsi gunung Merapi teridentifikasi 15 puksemas/pustu, antara lainnya Puskesmas Cangkringan, Pustu Glagaharjo, Pustu Umbulharjo. Menurut laporan dari pemerintah Kabupaten Sleman (2010), nilai total kerusakan dan kerugian sub sektor kesehatan mencapai sebesar Rp. 10.054 milyar.

Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat erupsi Merapi ini berdasarkan pentahapan bencana dan per sektor. Untuk masa *recovery* (pemulihan dini), telah ditetapkan berbagai kebijakan diantaranya untuk sektor kesehatan, antara lainnya adalah pembangunan kembali sarana dan prasarana fisik untuk layanan kesehatan, seperti di setiap shelter dibangun posko kesehatan yang dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan. Selain upaya dari pihak pemerintah, pihak swasta juga banyak membantu pengungsi dalam hal penyediaan sarana-prasarana layanan kesehatan di shelter-shelter. Seperti di Shelter Banjar Sari, LSM Bulan Sabit membantu pembangunan pelayanan kesehatan dan sudah diresmikan. Berbeda halnya dengan kondisi di Huntara Mancasan (diwilayah Muntilan, Kabupaten Magelang) belum disediakan bangunan/sarana khusus sebagai tempat untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Meskipun demikian, bidan desa tetap melakukan pelayanan kesehatan

khusus untuk bayi - balita bertempat di rumah kepala desa. Sementara belum ada layanan kesehatan untuk pengobatan umum termasuk pelayanan kesehatan bagi lansia. Warga di kedua shelter/huntara dan shelter lainnya pada dasarnya sangat membutuhkan pelayanan kesehatan di shelter/huntara karena akses kepada layanan kesehatan/puskesmas dirasakan jauh, misalnya jarak dari Huntara Mancasan ke layanan kesehatan yang ada di desa (pustu) sekitar 5 km, *“...kalo ada posko kesehatan di sini (shelter) jadi kami tidak perlu lagi lari ke desa untuk berobat...”*.

Permasalahan pokok yang muncul terkait dengan pelayanan kesehatan adalah meskipun secara fisik sudah dibangun sarana untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan, namun informasi yang diperoleh dari beberapa shelter, adalah sebagian warganya masih merasakan belum dapat memperoleh layanan kesehatan secara optimal. Seperti yang disampaikan dari hasil FGD dengan para tokoh masyarakat di shelter Banjar Sari, sarana prasarana untuk layanan kesehatan di shelter tersebut sudah ada namun belum digunakan. Menurut seorang tokoh masyarakat: *“...katanya ada pelayanan kesehatan 24 jam, tapi kenyataannya sampai sekarang masih terkunci dan katanya di dalamnya juga sudah lengkap (peralatan kesehatan)...”* Mengenai persoalan pemanfaatan layanan kesehatan yang disediakan pemerintah akan dibahas lebih lanjut dalam bagian berikutnya.

Selanjutnya, memasuki tahapan relokasi untuk penyediaan fasilitas kesehatan, menurut informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, untuk wilayah Glagahharjo, rekomendasi yang dikeluarkan untuk Pustu yang terletak di Glagahharjo, Cangkringan, statusnya adalah “belum ada lokasi”. Sedangkan Pustu Umbulharjo yang terletak di Umbulharjo, Cangkringan (masuk wilayah KRB II), status relokasi fasilitas kesehatannya adalah “sudah dapat direkomendasikan”. Demikian pula halnya dengan Puskesmas

Cangkringan yang beralamat di Argomulyo, statusnya “sudah dapat direkomendasikan”. Puskesmas Cangkringan ini berada dalam wilayah KRB II. Implikasinya dengan status penetapan rekomendasi tersebut, maka pembangunan Pustu dan Puskesmas untuk wilayah Umbulharjo dan Argomulyo yang rusak terkena dampak erupsi Merapi dapat segera dilaksanakan sehingga aktifitas layanan kesehatan sudah dapat segera berlangsung secara normal. Namun tidak demikian halnya dengan layanan kesehatan di wilayah Glagahharjo, untuk sementara layanan kesehatan di Pustu tidak dapat diselenggarakan karena belum ada ketetapan resmi dari pemerintah mengenai lokasi penetapan pustu yang dianggap aman dari dampak erupsi Merapi.

Pada dasarnya selain pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah (seperti puskesmas, pustu, RSUD), juga masih banyak alternatif pelayanan kesehatan swasta lainnya yang dapat diakses oleh penduduk, seperti dokter dan mantri praktek swasta. Mengenai pemanfaatan terhadap layanan kesehatan di luar yang disediakan pemerintah dibahas selanjutnya termasuk persepsi warga terhadap layanan kesehatan puskesmas.

Selain persoalan yang terkait dengan kerusakan infrastruktur kesehatan, maka erupsi Merapi juga berdampak terhadap persoalan air bersih karena terjadinya kerusakan pada sumber-sumber mata air. Persoalan mengenai air bersih ini terutama dihadapi oleh para warga saat mereka kembali ke desa asal. Pada saat kejadian Merapi meletus, beberapa sumber mata air di dusun tertimbun lahar panas, sebagian lain airnya berubah menjadi panas dan berbau belerang sehingga tidak dapat dikonsumsi. Sehingga untuk sementara para warga terutama yang sudah kembali ke desa asal, masih harus membeli air bersih untuk konsumsi. Seperti warga dusun Kali Tengah Lor dan Kidul, pasca Merapi harus beli air atau ambil air ke huntara (meskipun mengambil air gratis tapi tetap harus mengeluarkan uang untuk beli



solar motor). Umumnya untuk memenuhi kebutuhan selama 1-2 minggu, warga membeli air minimal satu tengki isi 5000 liter seharga 120 ribu , yang antara lain dipergunakan untuk mengairi tanaman, minum ternak. Sumber mata air yang dulu berada di Kali Tengah Lor dan Kidul dulu tertimbun lahar panas, tetapi sekarang sudah mulai digali sumur-sumur air yang tertimbun lahar tersebut, meskipun saat ini kecepatan debit air berkurang yaitu menjadi 20 liter/detik dari sekitar 35 liter/detik. Demikian pula dengan warga dari shelter Balarante yang sudah kembali ke dusunnya, untuk kebutuhan air bersih di dusun masih harus membeli.

Sementara untuk yang tinggal di shelter/huntara, sebagian tidak menemukan masalah dengan ketersediaan air bersih. Seperti di Shelter Kuwang, air bersih diperoleh dari sumur bor dan setiap rumah ada aliran air bersih. Air juga bisa dikonsumsi tidak bau belerang seperti air pada sumur di desa. Di shelter Ploso Kerep air bersih juga tersedia dari sumur bor dan saat kemarau tiga bulan ini debit air masih tetap stabil (kedalaman sumur air sekitar 30 meter). Namun tidak demikian dengan kondisi di huntara Mancasan, ketersediaan air bersih masih merupakan masalah. Air yang diperoleh dari sumur bor dengan kedalaman 100 m, bau dan keruh sehingga tidak bisa untuk dikonsumsi. Warga hanya menggunakan air tersebut untuk kebutuhan mencuci saja. Saat ini kuantitas air juga sudah mulai berkurang (air sudah hampir sat).

– **Permasalahan kesehatan saat di pengungsian, di shelter dan di desa**

Permasalahan kesehatan yang dialami warga saat di pengungsian, di shelter dan di desa dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang bersifat fisik dan psikis. Dari segi fisik antara lain keluhan gatal-gatal, batuk, pilek, luka bakar sementara yang bersifat psikis lebih terkait dengan kondisi psikologis. Pembahasan ini tidak

membahas tentang persoalan kesehatan dari tinjauan medis namun lebih memfokuskan pada keluhan-keluhan yang disampaikan oleh warga saat mereka hidup di pengungsian maupun setelah menetap di shelter, kemudian membahas tentang penyebab timbulnya permasalahan tersebut. Adapun uraian tentang upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi persoalan kesehatan tersebut dibahas dalam bagian berikutnya. Lama tinggal di pengungsian beragam, ada yang hanya 3 bulan seperti warga yang sekarang menetap di shelter Kuwang, sedangkan warga dari shelter Banjar Sari menetap di pengungsian kurang lebih 5 bulan lamanya.

Sebelum erupsi Merapi, keluhan kesehatan yang umumnya disampaikan warga hanya sebatas masuk angin. Sehingga dapat dikatakan ada perubahan dalam hal keluhan kesehatan setelah terjadi erupsi merapi dan sebagian warga bahkan menghadapi persoalan kesehatan yang tidak dapat dikatakan ringan serta membutuhkan penanganan yang tepat.

Setelah erupsi Merapi, keluhan kesehatan yang seringkali disampaikan warga saat masih menetap di pengungsian adalah batuk, flu, sakit mata dan gatal-gatal. Banyaknya warga pengungsi yang menderita penyakit tersebut karena pengaruh debu dari Merapi. Menurut data yang dikeluarkan dari Pemerintah Kabupaten Sleman berkenaan dengan laporan komando tanggap darurat penanganan bencana Merapi (Oktober 2010 s/d Januari 2011), 5 jenis penyakit yang paling banyak dialami para pengungsi adalah Ispa (9.419 kasus), Cepalgia (3.769 kasus), Common cold (flu) 3.710 kasus, Myalgia (2.903 kasus) dan Hipertensi (2.861 kasus).

Terkait dengan kondisi kesehatan balita selama hidup di pengungsian, dapat dikatakan dari pengalaman para warga dari kelima shelter, tidak ada persoalan kesehatan yang serius yang dihadapi balita. Hanya dikatakan mereka lebih rewel karena mengalami situasi

baru, namun tidak ada yang sampai menderita kurang gizi. Karena selama hidup dalam pengungsian, banyak mendapatkan bantuan makanan tambahan untuk bayi-balita, baik dari pemerintah maupun swasta<sup>8</sup>. Sehingga kebutuhan konsumsi untuk bayi-balita tercukupi.

Saat ini kondisi kesehatan para pengungsi yang masih menetap di shelter maupun warga yang sudah kembali ke desanya, sebagian masih mengeluhkan sakit batuk, flu, gatal-gatal dan darah tinggi. Penyakit batuk, flu terutama paling banyak dialami oleh anak-anak, namun kondisinya sudah lebih baik daripada saat menetap di pengungsian karena di lokasi shelter yang baru, debu merapi sudah jauh berkurang. Selain itu, meskipun sudah menetap di shelter, perawatan korban luka bakar masih tetap dilakukan oleh dinas kesehatan, antara lain terhadap dua anak remaja perempuan yang tinggal di shelter Kuwang.

Adapun untuk darah tinggi lebih sering dikeluhkan oleh orang dewasa. Fenomena yang menarik adalah keluhan tentang gejala darah tinggi kecenderungannya lebih sering diutarakan oleh para ibu rumah tangga. Namun mengenai fenomena ini perlu kajian lebih lanjut. Menurut penuturan mereka faktor yang mengakibatkan meningkatnya gejala darah tinggi di kalangan warga adalah masih adanya perasaan cemas, trauma dengan peristiwa erupsi Merapi dan pemikiran mengenai masa depan mereka selanjutnya. Sedemikian traumanya mereka, sehingga hanya dengan melihat mendung di atas Merapi saja, sudah membuat mereka memutuskan untuk berhenti bekerja di lahan dan cepat-cepat kembali ke rumah. Sebagian juga memutuskan untuk menjemput anak-anak mereka yang masih sekolah untuk segera pulang. Permasalahan kesehatan ini kemungkinan besar lebih terkait dengan faktor psikologis yang ditimbulkan oleh bencana

---

<sup>8</sup> Menurut hasil FGD dengan warga dari shelter Kuwang, bantuan dari swasta untuk makanan tambahan bayi-balita sudah hampir 3 bulan terhenti.

Merapi. Akibat dari erupsi Merapi ini, tidak hanya menimbulkan korban jiwa, cacat, kerusakan bangunan dan infrastruktur tetapi banyak orang yang kehilangan mata pencaharian juga hilangnya aset ekonomi mereka karena lahan pertaniannya rusak, ternak sapinya banyak yang mati. Peristiwa ini telah membebani pikiran warga dan untuk sebagian orang dewasa/ibu rumah tangga sampai menyebabkan perasaan depresi. Peristiwa meletusnya gunung Merapi masih menyimpan kenangan pahit yang sangat mendalam dalam benak mereka.

Menurut penuturan warga shelter Kuwang, di shelter tidak ada/belum pernah dikunjungi dokter yang secara khusus menangani permasalahan stress yang banyak dialami warga shelter pasca erupsi. Selain itu, menurut mereka tidak ada penanganan khusus untuk warga pasca erupsi, padahal warga sangat membutuhkan kunjungan psikolog ke shelter untuk mengatasi trauma/takut, juga bantuan untuk mengatasi keluhan rasa kelelahan yang semakin memberatkan (antara lain karena sekarang dari shelter ke sawah jaraknya sekitar 3 km).

*“Trauma bila mendengar geludug, petasan”*

*“...ya tentu aja kehidupan setelah menetap di shelter ini memang tidak seperti yang dulu, baik dari ekonomi, kesehatan, sandang, pangan, pemukiman...tentu saja memprihatinkan...kalau dalam bidang kesehatan, itu yang lansia dengan kejadian alam itu mengalami trauma dan kaget, banyak keluhan, sakit dan sebagainya....anak-anak sekolah itu kalau mendengar geludug, dher..dher..dher..itu sudah pada takut....ada kembang api, petasan itu sudah takut.....mengingat keadaan di situ saja sudah takut...”*

Hal menarik lainnya terkait dengan fenomena darah tinggi yang sering dikaitkan dengan trauma atau depresi ini adalah pengalaman yang dihadapi oleh warga desa dari Cangkringan yang

sekarang menetap di huntara Plosos Kerep. Menurut penuturan warga tersebut fenomena darah tinggi yang dihadapi warga setelah terjadinya erupsi Merapi merupakan persoalan biasa saja yang dihadapi oleh warga yang sedang banyak pikiran tetapi gejala ini menurut penuturan mereka tidak sampai menimbulkan depresi berat atau perasaan trauma. Kebanyakan yang mengalami trauma menurut warga Plosos Kerep hanya kelompok anak-anak saja, sementara orang dewasa dikatakan lebih 'semeleh', ikhlas dan pasrah dengan bencana yang dihadapi mereka sehingga tidak ada yang mengalami depresi. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih dalam karena pengetahuan semacam ini dapat dimanfaatkan untuk membantu program rehabilitasi-rekonstruksi agar berjalan lancar, jauh dari konflik.

Mengenai keluhan masuk angin, lebih banyak disampaikan oleh warga yang menetap di huntara Mancasan, Muntilan. Permasalahan ini disebabkan karena bentuk bangunan huntara yang tidak tertutup (menyisakan celah yang relative besar), sehingga menyebabkan angin masuk tanpa ada penutupnya. Di waktu malam di dalam huntara menurut para penghuninya terasa lebih dingin dan angin, sehingga para lansia maupun balita, banyak yang mengeluhkan masuk angin. Para penghuni huntara sampai saat ini masih membutuhkan bantuan terpal untuk menutup lubang angin yang besar tersebut.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh sebagian besar warga yang menetap di lima shelter adalah persoalan terkait dengan limbah dari septic tank. Meskipun persoalan ini tidak terkait langsung dengan kesehatan namun dampak yang ditimbulkan dari persoalan ini dapat berpengaruh serius terhadap kondisi kesehatan. Daya tampung septic tank sangat terbatas sehingga seringkali meluap dan menimbulkan aroma yang tidak sedap. Hal ini karena ketersediaan septic tank sangat terbatas, yaitu setiap satu base beton septic tank digunakan untuk 4 rumah. Beragam upaya yang dilakukan warga mengatasi persoalan

septic tank ini, seperti sebagian warga dari shelter Ploso Kerep juga Mancasan, membangun septic tank baru untuk setiap rumah karena tanah kedap air sehingga tidak dapat memperdalam pembuangan limbah. Namun warga dari shelter Kuwang, terpaksa memanfaatkan kali yang mengalir tidak jauh dari shelter sebagai tempat pembuangan limbah dan terpaksa membatasi mandi hanya sekali sehari saja. Sampai sejauh ini belum ada keluhan kesehatan yang disampaikan warga terkait dengan pencemaran akibat limbah, meskipun demikian hal ini membutuhkan penanganan segera untuk mencegah merebaknya penyakit. Kekurangan jumlah maupun kualitas sanitasi (air bersih dan jamban) dapat meningkatkan resiko penularan penyakit.

Mengenai sampah juga dikeluhkan oleh warga yang menetap di shelter Kuwang. Meskipun sudah disediakan tempat pembuangan sampah, namun menurut warga dari shelter tersebut sejak menetap di shelter tersebut, belum pernah ada instansi yang ditugaskan untuk mengambil sampah-sampah tersebut. Keberadaan sampah ini juga sangat mengganggu dan dapat berakibat buruk terhadap kondisi kesehatan.

#### *“WC panjang”*

*“..... septic tank merupakan persoalan karena untuk 4 rumah hanya satu, jadi untuk mengatasinya membatasi mandi menjadi sekali sehari saja ....paling susah itu pagi hari kalau anak-anak mau sekolah, yang satu sudah mandi, yang satu belum, tapi sudah ‘penuh’....mau mandi air sudah luber dan berbau .... Paling enak dan dekat pakai “wc panjang” saja tapi ya dimarahi sama yang bawah, di ‘seneni’.... Kalau mau itu pagi-pagi saja, setelah sholat subuh itu..... Tidak bisa digali lebih dalam karena keluar air.....”*

## - Pemanfaatan layanan kesehatan

Berbicara mengenai pemanfaatan layanan kesehatan maka topik yang dibahas dalam tulisan ini adalah terkait dengan pemanfaatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan atas layanan kesehatan tersebut dari sisi user, atau pengguna. Kajian ini belum menganalisis secara komprehensif tentang implementasi program dan kegiatan yang dikhususkan untuk warga yang terkena dampak erupsi merapi dari sisi *provider*, yaitu penyedia layanan kesehatan itu sendiri, seperti dari pihak puskesmas dan jajarannya, rumah sakit daerah/provinsi serta dari Dinas Kesehatan; berikut persoalan yang dihadapi pihak *provider* dalam mengimplementasikan program kesehatan untuk warga yang terkena dampak erupsi merapi tersebut (belum diulas lebih dalam).

Berdasarkan hasil FGD dengan para tokoh masyarakat dan juga warga di kelima shelter, diperoleh informasi bahwa selama hidup di pengungsian pun, sebagian besar warga menyatakan tidak menemukan masalah dalam mengakses layanan kesehatan. Karena selama hidup dalam pengungsian, senantiasa ada kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan baik dari pihak pemerintah maupun swasta. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi kondisi kesehatan pengungsi, seperti yang terpaparkan dari laporan komando tanggap darurat penanganan bencana Merapi (Oktober 2010 s/d Januari 2011), Pemerintah Kabupaten Sleman, antara lain mencakup pemberian pelayanan dan pengobatan kejiwaan, penambahan pos kesehatan di barak pengungsian dan melakukan rujukan dan upaya penguatan system rujukan. Sehingga, persoalan kesehatan juga langsung tertangani dengan baik, tidak ada penundaan pelayanan. Bahkan menurut pengalaman dari warga desa yang saat ini tinggal di Huntara Mancasan, Muntilan, meskipun tidak ada jadwal dokter berkunjung ke pengungsian setiap hari, namun tidak ada masalah terkait dengan pengobatan karena dokter kepala puskesmas yang

tinggal dekat pengungsian, selalu siap manakala dibutuhkan bantuannya. Layanan kesehatan saat pengungsian juga dibantu oleh para relawan kesehatan dengan jenis kompetensi yang bervariasi, misalnya Tim Medis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ikatan Apoteker, psikolog dan mahasiswa fakultas dan prodi psikologi dari perguruan tinggi se DIY.

Setelah menetap di shelter, layanan kesehatan masih berjalan, meskipun tidak lagi diselenggarakan secara rutin/berkala. Layanan kesehatan yang berlangsung di shelter menurut warga hanya bersifat insidental saja (tidak ada kegiatan layanan kesehatan yang dilakukan secara berkala). Tidak semua penyelenggaraan layanan kesehatan berlangsung di shelter, namun sebagian kegiatan ada yang dilaksanakan di dusun asal, seperti kegiatan posyandu untuk warga desa yang menetap di shelter Kuwang dan Mancasan (posyandu dilangsungkan di desa Sirahan, Muntilan). Dengan demikian warga yang ingin memanfaatkan layanan kesehatan tersebut, harus pergi ke desa asal. Hal ini tentunya membawa konsekuensi adanya pengeluaran tambahan untuk biaya transport pulang-balik shelter-desa.

Pengalaman warga dari Shelter Kuwang dapat dipaparkan di sini untuk menunjukkan bahwa dalam situasi yang penuh keterbatasan-kekurangan, sifat ke'guyuban' warga justru semakin menguat dan hal ini sangat membantu warga dalam memperoleh layanan kesehatan. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa tidak ada jadwal kunjungan dokter yang regular ke shelter, namun hal ini tidak membuat warga yang sakit menjadi sulit untuk berobat. Karena para tetangganya secara suka rela – bergotong royong menggunakan sepeda motor (namun biaya pemeriksaan/pengobatan tetap ditanggung oleh pasien ybs) mengantarkan warga yang sakit ke dokter atau layanan kesehatan lainnya. Fasilitas kesehatan yang terdekat dengan shelter adalah puskesmas Kecamatan Cangkringan dan dokter umum. Kegiatan gotong royong ini pada dasarnya sudah



berlangsung sejak dulu, tetapi dengan adanya bencana Merapi justru mempererat keguyuban antar warga karena tempat tinggal mereka di shelter semakin berdekatan. Adapun untuk pemeriksaan kehamilan tidak menjadi masalah untuk warga shelter Kuwang karena ada bidan desa yang menetap di shelter tersebut.

Dari hasil FGD muncul beberapa isu terkait dengan pemanfaatan layanan kesehatan terutama yang disediakan oleh pemerintah. Kenyataan menunjukkan meskipun pemerintah sudah berupaya untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat namun sebagian warga berpendapat bahwa mereka tidak dapat secara optimal memanfaatkannya. Isu ini menarik untuk dikaji, oleh karena itu tulisan berikut ini mencoba mengangkat faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan atas layanan kesehatan yang dalam kesempatan ini masih terfokus dari sisi *user* (pengguna layanan kesehatan). Faktor-faktor tersebut adalah: a). aksesibilitas terhadap layanan kesehatan dan b). persepsi masyarakat terhadap puskesmas.

#### a. Aksesibilitas terhadap layanan kesehatan

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pemanfaatan atas layanan kesehatan adalah aksesibilitas terhadap layanan kesehatan. Sejauhmana seseorang mendapat akses terhadap layanan kesehatan tergantung dari kondisi keuangan, organisasi pengelola layanan, aspek sosial dan budaya yang mendorong atau menghambat pemanfaatan layanan. Dengan demikian akses yang dilihat dari sudut pandang penggunaan layanan tergantung dari kemampuan individu, jarak layanan, penerimaan atau kepuasan terhadap layanan dan tidak semata tergantung dari ketersediaan layanan kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut, tulisan berikut ini mengkaji akses para warga terhadap layanan kesehatan baik saat berada di pengungsian, di shelter maupun di desa bagi sebagian warga yang sudah kembali ke desa asal

Aksesibilitas terhadap layanan kesehatan seperti Puskesmas, khususnya untuk warga yang menetap di shelter Ploso Kerep dan juga Kuwang, justru menjadi lebih dekat dibandingkan sewaktu mereka masih tinggal di desa. Bahkan di shelter Kuwang, juga ada 4 bidan desa yang menetap di shelter tersebut sehingga untuk pemeriksaan kehamilan sejatinya lebih mudah<sup>9</sup>. Sementara yang berasal dari shelter Balarante, sebagian warga merasa lebih dekat pergi ke dokter swasta daripada ke puskesmas atau rumah sakit yang menjadi rujukan (RS rujukan untuk tingkat kabupaten/kota di Pemalang, berjarak sekitar 7-10 km dan tidak ada kendaraan umum untuk mengakses layanan kesehatan tersebut). Persoalan jarak yang jauh acapkali menjadi masalah bagi sebagian besar warga desa yang menjadi narasumber untuk kajian ini. Karena untuk mencapai tempat layanan kesehatan yang jauh tempatnya jelas memerlukan ongkos/biaya transportasi. Hal ini bisa juga menjadi faktor penghambat untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang disediakan pemerintah secara optimal.

Di samping itu kondisi jalan yang rusak akibat erupsi merapi juga semakin menambah sulit mengakses layanan kesehatan puskesmas, seperti yang dialami oleh warga dari dusun Kali Tengah Kidul dan Kali Tengah Lor, sebelum terjadinya erupsi Merapi mereka bisa ke Poskesdes yang terletak di Glagah Malang atau ke puskesmas yang ada di Srunen. Namun kondisinya sekarang jalanan menuju lokasi tersebut rusak, fasilitas pelayanan kesehatan juga rusak (dan tidak dibenahi karena termasuk dalam wilayah KRB ) sehingga sekarang warga dari tiga desa tersebut untuk mengakses pelayanan kesehatan harus pergi ke Balarante (masuk dalam Kabupaten Klaten) karena lokasi di Balarante ini sudah termasuk yang paling dekat<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Warga desa tidak lagi memeriksa ataupun melahirkan ditolong oleh dukun. Dukun hanya dibutuhkan untuk mengurus badan saja tetapi tidak menolong proses persalinan.

<sup>10</sup> Karena di desa tidak ada lagi/tidak boleh diselenggarakan pelayanan kesehatan dari pemerintah (termasuk dalam wilayah KRB III), maka warga harus turun dari desa.

Kalau warga dari dusun Kali Tengah Kidul maupun Lor pergi ke Cangkringan untuk berobat, menurut warga '*sela mati*' jadi lebih dekat pergi ke Klaten. Konsekuensinya berobat ke Klaten mereka harus membayar (pelayanan jamkesmas tidak berlaku karena sudah beda kabupaten). Sementara untuk warga dusun yang masih tinggal di bawah (huntara Banjar Sari) untuk pemeriksaan kesehatan lebih dekat ke Cangkringan.

Di setiap shelter pada umumnya sudah dibangun posko layanan kesehatan dan sudah ada kegiatan layanan kesehatan yang dilaksanakan baik dari pihak pemerintah maupun swasta. Namun kegiatan tersebut tidak secara rutin diselenggarakan, sehingga apabila ada warga yang membutuhkan pengobatan harus mengupayakan sendiri pergi ke layanan kesehatan, baik swasta maupun ke puskesmas. Menurut penuturan sebagian besar warga yang menjadi narasumber, untuk pengobatan mereka cenderung pergi ke dokter swasta atau mantri praktek (meskipun biayanya relative mahal dan harus mengantri juga). Hal ini dilakukan antara lain karena jam layanan puskesmas yang terbatas, yaitu jam 8 pagi sampai jam 11 siang<sup>11</sup>. Sementara pengobatan dengan swasta jam pelayanannya lebih panjang, sehingga saat warga butuh berobat di sore hari mereka dapat langsung menuju tempat dokter/mantri praktek. Selain faktor jarak, keengganan untuk mengurus surat-surat administrasi untuk pelayanan rujukan juga menjadi salah satu faktor penghambat warga

---

Kalau mau ke puskesmas, masih dilayani hanya jarak dari desa ke puskesmas sangat jauh (ke Puskesmas Cangkringan jaraknya sekitar 13 km). Tapi menurut narasumber lebih banyak warga desa yang lebih memilih berobat ke dokter (di wilayah Cangkringan juga) daripada ke puskesmas, karena dianggap obat-obatan dari dokter praktek lebih manjur meskipun relative mahal namun menurut warga "*....demi kesehatan mampu tidak mampu harus diupayakan, biarpun harus ngutang tidak apa...*".

<sup>11</sup> Puskesmas yang buka sampai 24 jam adalah puskesmas teladan Ngemplak, di Kecamatan Ngemplak .

memanfaatkan layanan kesehatan pemerintah. Meskipun demikian, sejauh ini dari pengalaman ke lima shelter tidak ditemukan kasus warga yang meninggal karena tidak tertangani penyakitnya atau menjadi bertambah parah, karena warga cenderung memilih pelayanan kesehatan yang terdekat meskipun mereka harus membayar untuk transportasi maupun membayar dokter dan obat-obatannya. Bagi warga yang penting dapat mengakses pelayanan kesehatan secara cepat.

Selain faktor jarak dan terbatasnya jam buka layanan, faktor lainnya yang juga mempengaruhi pemanfaatan atas layanan kesehatan yang disediakan pemerintah seperti puskesmas, pusku, polindes, adalah faktor persepsi terhadap layanan kesehatan pemerintah tersebut. Pembahasan berikut ini akan mengangkat isu tersebut.

#### b. Persepsi masyarakat terhadap puskesmas

Faktor yang kedua ini tidak terkait langsung dengan dampak bencana Merapi, namun sangat mempengaruhi pemanfaatan terhadap layanan kesehatan, dalam hal ini adalah puskesmas dan jajarannya. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa jam buka layanan puskesmas yang terbatas menjadikannya alasan buat sebagian warga shelter Kuwang mencari pelayanan kesehatan swasta yang lebih fleksibel jam buka layanannya. Sebagian warga lainnya bahkan menegaskan meskipun jam buka puskesmas diperpanjang, tetap dirasakan tidak 'sreg' berobat ke sana. Selain ke dokter swasta, layanan kesehatan swasta yang sering dikunjungi warga shelter Kuwang adalah ke mantri kesehatan. Biaya pengobatan dengan dokter tidak menentu, tergantung dari penyakitnya, misalnya penyakit batuk-pilek sekitar Rp 35 ribu. Namun menurut warga rata-rata pengobatan sekitar Rp. 20-50 ribu (biaya kekeluargaan), sementara dengan mantri kesehatan lebih murah yaitu sekitar Rp. 15 ribu (sudah termasuk obat-obatan).

Kebiasaan berobat ke dokter atau mantra praktek swasta, sudah biasa dilakukan oleh sebagian besar warga penghuni shelter Kuwang. Sebelum erupsi pun, warga cenderung berobat ke dokter daripada ke puskesmas. Dokter yang sering dirujuk tersebut sebenarnya dokter ahli saraf tetapi dianggap bisa juga mengobati penyakit lainnya. Demikian pula untuk keperluan pemeriksaan kehamilan, meskipun saat ini di shelter Kuwang ada bidan desa, namun sebagian warga mengaku lebih merasa 'sreg' apabila memeriksakan kehamilan dan bersalin ditolong oleh dokter.

Menurut penuturan warga mereka memilih berobat dengan dokter karena ingin cepat sembuh dan obatnya dianggap lebih mujarab. Tarif berobat dengan dokter swasta juga dianggap tidak/belum memberatkan dan itupun sudah termasuk obat-obatan. Sedangkan berobat di puskesmas menurut warga, meskipun hanya sekitar Rp. 6 ribu, tapi sakitnya tidak sembuh-sembuh. Menurut warga dari shelter Banjarsari, jenis obat-obatan yang dipergunakan di Puskesmas adalah obat generik, sehingga dianggap kurang manjur dibandingkan dengan obat-obatan paten yang bermerk. Menurut pendapat warga apabila berobat dengan obat-obat dari puskesmas 3 hari belum sembuh tapi dengan obat dari dokter satu hari sudah ada perubahan terhadap kondisi kesehatan (seperti mereda panasnya). Puskesmas menurut warga hanya untuk mengobati "penyakit pusing, keseleo dan masuk angin" saja, sehingga sebagian warga lebih cenderung berobat ke dokter. Pendapat yang kurang lebih sama juga diutarakan oleh warga dari shelter Ploso Kerep. Pengobatan di puskesmas hanya untuk mengobati penyakit batuk pilek saja. Ada keyakinan di masyarakat bahwa apabila biaya pengobatan relative murah, maka kualitasnya juga dianggap tidak 'majas'.

## *Berobat di puskesmas tidak 'marem'*

*".....namanya masyarakat sini tuh, sebelum maupun setelah kejadian Merapi kalau berobat itu selalu ke dokter spesialis...sebenarnya dokter ahli syaraf tetapi bisa mengobati macam-macam.... Obatnya lebih manjur, kalau di puskesmas meskipun bayar lima ribu tapi tidak sembuh-sembuh, mendingan bayar 20 ribu tapi sembuh. Berobat dengan puskesmas idak 'marem', tidak pernah diperiksa hanya ditanya saja sakit apa terus dikasih obat, kalau ke dokterkan diperiksa "didemek-demek", ditensi..."*

Berbeda dengan warga di huntara Mancasan, persepsi mereka terhadap pelayanan puskesmas lebih positif dan mereka sangat membutuhkan pelayanan kesehatan di huntara karena akses kepada layanan kesehatan/puskesmas dirasakan jauh, sekitar 5 km. Sehingga untuk kebutuhan berobat mereka harus kembali desa asalnya. Menurut warga huntara Mancasan kalau ada pilihan buat mereka lebih baik pergi ke puskesmas daripada ke dokter sehingga uang untuk berobat dengan dokter bisa dialihkan untuk memenuhi keperluan yang lain.

Menurunnya kunjungan masyarakat ke puskesmas pasca erupsi, juga disampaikan oleh narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Ada beberapa factor yang menurutnya dapat menyebabkan hal tersebut, yaitu pertama mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transport ke puskesmas, karena untuk sebagian warga yang pindah ke shelter/huntara, jarak ke puskesmas menjadi lebih jauh. Faktor kedua adalah sampai saat ini di shelter-shelter masih ada kegiatan pengobatan gratis dari LSM dan obat-obatan yang diberikan LSM adalah obat paten (bermerk) bukan generic seperti yang biasa diberikan puskesmas serta lebih beragam jenis obat-obatannya yang disiapkan pihak LSM. Oleh karena itu kecenderungannya sekarang adalah warga hanya menunggu saja

pelayanan kesehatan keliling dari LSM di shelter dan untuk itu tidak perlu mengeluarkan biaya transport.

Dari pihak puskesmas sendiri, menurut narasumber tersebut, ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dijalankan secara optimal karena keterbatasan anggaran di puskesmas. Pemasukan/pendapatan untuk puskesmas bergantung pada jumlah kunjungan ke puskesmas (tidak menggunakan system kapitasi) sehingga semakin sedikit yang berkunjung semakin berkurang pegghasilan akibatnya beberapa kegiatan puskesmas juga terkena imbasnya<sup>12</sup>. Kalau banyak program/kegiatan maka tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Sementara untuk menggelar pelayanan kesehatan di shelter tidak bisa dilakukan setiap hari (seperti yang diharapkan kebanyakan warga shelter) karena masih banyaknya warga di luar shelter yang harus dilayani. Menurut informasi lainnya dari narasumber, kegiatan pelayanan keliling dari puskesmas paling cepat hanya sebulan sekali karena cakupan kerjanya per wilayah dan periode satu bulan sekali itu pun sudah termasuk cepat, karena puskesmas juga harus melakukan pelayanan kesehatan di puskesmas dan pustu. Kadang-kadang kegiatan pusling hanya dapat dilakukan dua bulan sekali.

Selain factor tersebut, puskesmas juga menghadapi keterbatasan SDM untuk dapat setiap hari memberi pelayanan kesehatan di shelter-shelter. Untuk satu puskesmas rata-rata ketersediaan dokter paling banyak 2, perawat 7 dan bidan 9 (untuk puskesmas rawat inap SDM-nya tersdia lebih banyak). Sehingga untuk kegiatan pusling tidak bisa mengikutsertakan tenaga dokter hanya perawat, bidan atau para medis saja. Ketersediaan tenaga dokter hanya diprioritaskan untuk pelayanan di puskemas induk saja. Ketersediaan dokter piket yang dapat memberikan layanan kesehatan

---

<sup>12</sup> Biaya kunjungan antara lain digunakan untuk membiayai penyuluhan, transport pusling (puskesmas keliling).

di shelter sebenarnya sangat dibutuhkan oleh warga dari shelter Kuwang. Di Shelter Kuwang ada pos kesehatan tetapi tidak ada penghuninya. Khususnya para lansia merasa sangat terbantu dalam mengakses layanan kesehatan dengan keberadaan dokter piket di shelter. Menurut warga shelter Kuwang belum pernah ada dokter yang memberi layanan kesehatan di pos kesehatan tersebut sejak awal menempati shelter tersebut.

Pemaparan berikut ini membahas tentang berbagai upaya yang sudah dilakukan, baik dari pihak pemerintah maupun swasta, untuk mengatasi persoalan kesehatan warga, baik sewaktu masih hidup di pengungsian, di shelter/huntara atau setelah warga kembali ke desa asal.



# **BAB III**

## **PEMULIHAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

### **A. Strategi Pemulihan Atas Kehilangan Aset Rumah Tangga**

#### **- Strategi Masyarakat untuk Pemulihan Aset Perumahan dan Ekonomi**

Berbagai cara telah dilakukan oleh korban bencana erupsi Merapi untuk memulihkan kondisi seperti sediakala. Pemulihan kehidupan sebagian besar dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, khususnya yang terkait dengan pembangunan rumah. Warga membangun kembali rumah mereka secara gotong royong dengan dana pribadi dan sebagian dibantu oleh yayasan Klaten Peduli Umat (Kasus Desa Balairante). Menurut pengakuan responden, dana membangun selain berasal dari tabungan dan sumbangan keluarga, melainkan juga dengan menjual sapi dari hasil pergantian sapi yang merupakan program bantuan dari pemerintah (Hasil FGD Dusun Kali Tengah, Serunen, dan Gondang).

Keputusan warga untuk membangun rumahnya kembali secara mandiri bertentangan dengan rencana pemerintah tentang tata ruang kawasan bencana Merapi, sebagian besar dari dusun tersebut masuk dalam wilayah KRB 3, dimana kawasan tersebut adalah kawasan yang akan direlokasi, Namun beberapa dusun menolak secara tegas dengan kembali tinggal dan beraktivitas di dusun tersebut.

Alasan yang paling mendasar warga kembali membangun rumah di tempat yang asal adalah sumber mata pencaharian. Dengan keterampilan yang sudah mereka miliki sebagai petani, peternak, dan penambang pasir di lereng gunung tidaklah mudah untuk pindah ke lokasi lain dengan kondisi geografis dan sosial yang berbeda. Hal ini tercermin dari pengakuan para responden yang sebagian besar menyatakan bahwa tidak banyak yang bisa mereka lakukan selama tinggal di *shelter*. Berbagai program pemerintah yang telah mereka terima seperti pelatihan, budidaya ayam, lele, ternak domba, sapi serta kegiatan lainnya dianggap tidak begitu efektif sebagai mata pencaharian baru.

Kendati demikian, beberapa dusun yang menjadi korban erupsi Merapi masih memilih tinggal di *shelter* dan mengandalkan program dan bantuan baik dari pemerintah maupun swasta untuk bertahan hidup. Keputusan ini mereka ambil karena kondisi dusun yang tidak memungkinkan untuk dipulihkan dan kondisi kemiskinan dimana mereka tidak lagi mempunyai aset sebagai penopang kehidupan (kasus Dusun Sirahan dan Ngancar). Berbagai strategi masyarakat korban dalam memilih strategi pemulihan bencana khusus untuk sektor perumahan dan ekonomi terlihat pada tabel 3.1 berikut;

**Tabel 3.1. Strategi Masyarakat dalam Pemulihan Aset Pasca Bencana Untuk Perumahan dan Ekonomi**

Kabupaten	Dusun	Pemulihan Perumahan	Pemulihan Ekonomi
Sleman	Bronggang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 67 KK memilih tinggal di <i>shelter</i> dan tidak membangun kembali perumahannya.</li> <li>- Meminta pemerintah untuk memberikan penggantian rumah di daerah sekitar <i>shelter</i> yang mereka tempati</li> </ul>	<p>Karena lahan tidak bisa diolah kembali, warga dusun ini mencari alternatif pekerjaan sebagai penambang pasir untuk memenuhi kehidupan sehari-hari selain dari bantuan yang ada selama tinggal di <i>shelter</i>.</p>
	Kinahrejo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Warga memilih tinggal di <i>shelter</i> dan tidak membangun kembali rumahnya di dusun Kinahrejo.</li> <li>- 81 KK akan membangun rumah dengan ide relokasi mandiri di dusun Balong, dimana masing-masing KK akan mendapat 100 m2 dan menjadi hak milik pribadi.</li> <li>- Pendanaan relokasi mandiri tersebut dibiayai oleh uang kas dusun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagian besar warga bekerja di sektor jasa pariwisata dengan memanfaatkan banyaknya kunjungan wisatawan, peneliti, dan relawan yang datang ke gunung api Merapi.</li> <li>- Sebagian warga sudah kembali beternak sapi perah walaupun dengan kondisi yang terbatas</li> <li>- Melaksanakan program-program</li> </ul>

		<p>ditambah dengan iuran warga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak kepemilikan akan rumah, bangunan, dan lahan yang dimiliki warga di dusun Kinahrejo tetap akan menjadi hak milik warga dan bangunan yang masih tersisa tidak boleh dihancurkan oleh pemerintah. kemudian warga akan menggunakan lahan tersebut untuk usaha agrowisata buah-buahan.</li> </ul>	<p>pemerintah seperti beternak ayam, lele, dan PNPM Padat Karya namun hasilnya belum bisa memenuhi kebutuhan</p>
Ngancar		<p>Kondisi rumah hancur total dan warga belum memperbaiki karena akses dan kondisi dusun rusak parah. Sebagian warga masih tinggal di <i>shelter</i> dan menerima tawaran pemerintah untuk tinggal di hunian tetap yang disediakan oleh pemerintah dengan syarat dekat dengan dusun asal.</p>	<p>Memanfaatkan lahan yang tertimbun pasir dengan mempekerjakan buruh dari Klaten dan dusun lainnya untuk penambang pasir. Memiliki lahan mendapatkan <i>fee</i> atas banyaknya pasir yang diambil.</p>

	Kali Tengah dan Serunen	Sebagian besar warga membangun kembali rumah dengan dana mandiri, dan saat ini telah kembali dan beraktifitas di dusun mereka. Warga menolak dengan tegas kebijakan relokasi yang diajukan oleh pemerintah, walaupun mereka mendapat ganti rugi atas tanah di dusun.	Sebagian besar warga mencari alternatif pekerjaan seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memanfaatkan pohon terbakar untuk memproduksi arang</li> <li>- Menjual rumput untuk pakan ternak dari hasil lahan yang masih dapat diolah.</li> <li>- Menjadi buruh penambang pasir di Dusun Ngancar</li> <li>- Memulai menanam palawija dan beernak sapi, dan budidaya teledu.</li> </ul>
Klaten	Dukuh Gondang	Sebagian besar warga telah kembali dan beraktifitas di dusun asal. Rumah telah mereka perbaiki dengan menggunakan dana pribadi dan bantuan dari yayasan swasta. Warga menolak tawaran pemerintah untuk tinggal di lokasi lain.	Sebagian besar kembali menjadi penambang pasir dan memulai kembali ternak sapi.

Magelang	Sirahan	<p>Warga tetap tinggal di <i>shelter</i> dan hanya mengandalkan bantuan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Kondisi rumah belum dipulihkan sehingga tidak layak untuk dihuni. Warga mengharapkan ada hunian tetap yang disediakan oleh pemerintah dengan syarat mendapat hak kepemilikan atas hunian tetap tersebut.</p>	Menjadi penambang pasir.
----------	---------	--	--------------------------

Sumber: Hasil FGD

- **Tawaran dan Aksi Pemerintah Dalam Usaha Pemulihan Aset Perumahan dan Ekonomi.**

Salah satu program rehabilitasi dan rekonstruksi pemerintah dalam penanganan bencana adalah pemulihan sektor perumahan dan ekonomi. Ruang lingkup pemulihan sektor perumahan antara lain melalui; Pembuatan panduan dan prinsip mekanisme subsidi rumah, fasilitasi pengorganisasian pembersihan rumah dan lingkungan berbasis masyarakat, serta fasilitasi pengelolaan hunian sementara. Sedangkan ruang lingkup sektor ekonomi melalui; revitalisasi kelompok tani, kebun dan ternak, program diversifikasi/alternatif usaha pertanian, penyediaan bibit tanaman cepat panen, bantuan modal usaha untuk pedagang dan industri kecil menengah<sup>13</sup>.

Ruang lingkup pertama dari sektor perumahan adalah penyediaan hunian sementara (*shelter*). Selama tinggal di *shelter*, pemerintah menyediakan kebutuhan dasar seperti listrik, air, sanitasi, dan bantuan kehidupan sehari-hari sebagai jaminan hidup. Berdasarkan hasil wawancara dengan penghuni *shelter*, masalah yang umumnya terjadi adalah masalah sanitasi karena sangat terbatasnya tempat pembuangan dan bantuan jaminan hidup yang tidak diberikan setiap bulannya, dalam kurun waktu setahun ini rata-rata warga hanya menerima dua kali bantuan jaminan hidup.

Selain kebutuhan dasar untuk perumahan sementara, warga juga diberikan beberapa pelatihan dan modal ekonomi sebagai alternatif mata pencaharian. Salah satu program yang diberikan adalah pelatihan batako, budidaya ikan lele, ternak ayam, dan pelatihan membuat makanan bagi kaum ibu-ibu. Selain pelatihan, warga juga diberikan beberapa bibit lele, ayam, domba, dan sapi dengan sistem kelompok. Namun, keefektifan dari berbagai program tersebut masih dirasakan kurang oleh warga, permasalahan yang terjadi antar lain

---

<sup>13</sup> Berdasarkan Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BAPPENAS 2011

belum adanya kesiapan warga untuk mengimplementasikan segala pelatihan dan modal yang didapat. Keterampilan yang diperoleh khususnya oleh ibu-ibu belum dijadikan usaha bisnis yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ditambah lagi, kesiapan warga untuk mengembangkan ternak ayam yang diberikan dari Dinas Pertanian belum dapat diimplementasikan dengan alasan kondisi suhu dan ketidaksiapan warga beternak ayam.

Selain pembangunan *shelter*. Program selanjutnya adalah perbaikan rumah di lokasi dusun asal atau pembangunan rumah di lokasi baru (relokasi). Untuk program relokasi melalui bantuan Rekompak (Ditjen Cipta Karya) Kementerian PU dengan Sistem Pembangunan Rumah Tumbuh dan Pemberdayaan Masyarakat Sistem Gotong Royong yang diperkirakan biaya per unit Rp 30 juta dan direncanakan lahan yang akan disediakan per kepala keluarga adalah 150 M<sup>2</sup>. Saat ini Rekompak-JRF (*Java Reconstruction Fondation*) terus melakukan konsolidasi dan persiapan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi antara lain: penjaringan *benefecieris* (penerima manfaat), penentuan lokasi relokasi, sosialisasi Kawasan Rawan Bencana kepada masyarakat. Skema relokasi meliputi dusun-dusun dalam wilayah KRB 3 yang tidak layak huni berdasarkan peta rekomendasi Badan Geologi Kementerian ESDM melalui pendekatan: (a) pemadatan desa, (b) relokasi ke dusun lain, (c) transmigrasi, dan (d) relokasi mandiri.

Gagasan relokasi berarti menata ulang pemukiman penduduk di sekitar wilayah yang rawan bencana dalam upaya untuk meminimalisasi korban di kemudian hari jika terjadi bencana. Gagasan ini secara hukum berlandaskan pada Pasal 32 UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa "*pemerintah dapat menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman dan/atau mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan*



*setiap orang. Selanjutnya, bagi setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan yang berlaku”.*

Produk hukum turunan tentang relokasi adalah keputusan presiden nomor 16 tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah pasca Bencana Erupsi Merapi dan Peraturan Kepala BNPB nomor 5 tahun 2011 tentang Penetapan Rencana Aksi (RENAKSI) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah pasca Bencana erupsi Merapi di D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah tahun 2011 – 2013. Instruksi produk hukum tersebut kemudian dijadikan dasar hukum untuk melakukan relokasi pada kawasan rawan bencana di lereng Merapi.

Sebagai bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana, relokasi berada pada cakupan penetapan kebijakan pemerintah dan kegiatan pencegahan. Kebijakan pemerintah yang didesain untuk menjadi payung melaksanakan relokasi adalah kawasan rawan bencana dan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi<sup>14</sup>. Dengan di tetapkannya peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) dan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Maka ruang gerak masyarakat yang tinggal di areal KRB dan TNGM akan terbatas.

Keputusan dari pusat tersebut, kemudian dilanjutkan ke tingkat daerah. Khusus untuk Kabupaten Sleman, saat ini pemerintah sedang memprioritaskan pendekatan relokasi mandiri dengan target 156 KK. Dalam relokasi mandiri tanah yang akan dibangun telah dimiliki oleh warga kemudian pemerintah memberi bantuan dalam

---

<sup>14</sup> Krisanto, Yakub Adi. “Relokasi Korban Bencana: Legalistik vs Kultural-Historis (Kajian Penolakan Warga Lereng Merapi terhadap Kebijakan Relokasi)”. *Kompas*, Sabtu 21 September 2011. Download 24 September 2011.

pembuatan rumah dengan dana Rekompak. Kemudian dalam 3 tahun kedepan, pemerintah akan merelokasi warga yang bersedia dengan kisaran lebih dari 2800 KK (Hasil wawancara).

Dalam implementasinya, gagasan relokasi ini jmendapat penolakan keras dari berbagai pihak. Perdebatan intepretasi kata-kata di Pasal 32 UU No. 24 Tahun 2007 bergejolak diantara kaum akademisi dan peneliti. Kata “*dapat*” pada isi pasal tersebut menyatakan bahwa kebijakan relokasi adalah sebuah pilihan bukan suatu kewajiban. Sehingga relokasi bukanlah satu-satunya cara pemerintah untuk mengurangi risiko bencana.

Di lain sisi warga sebagai korban bencana juga melakukan berbagai cara penolakkan baik melalui surat terbuka yang dikirim ke pemerintah, membangun kembali rumah di dusun asal yang mana termasuk dalam kawasan rawan bencana 3, dan memasang baliho di dusun Kali Tengah dengan isi sebagai berikut:

*Mengapa Kami Menolak Relokasi:*

1. *Karena Tanah Kali Tengah adalah Sumber Penghidupan Kami.*
2. *Karena Warga Kali Tengah Warga Tanggap Bencana.*
3. *Karena Tanah Kali Tengah Adalah Hak Milik*
4. *Kami Bisa Berdampingan Hidup Dengan Merapi Dengan Cara Hutan Rakyat Tidak Harus Dengan Hutan Lindung/TNGM.*
5. *Kami Merasakan Keadilan dan Kesejahteraan Dengan Tetap Hidup Di Kali Tengah.*
6. *Karena Kali Tengah Masih Layak Huni*

*(TTD. Warga Kali Tengah)*

Pernyataan warga tersebut mencerminkan begitu menyatunya tanah dan dinamika kehidupan di lereng gunung dengan warga. sebagaimana pepatah Jawa mengatakan “*Sedumuk batuk senyari bumi, ditohi pecahing dodo lan wutahing ludiro*” yang artinya Soal wanita dan tanah adalah soal yang sensitif dan untuk itu dipertaruhkan dada dan tumpahnya darah. Pepatah tersebut telah melekat di warga lereng gunung Merapi yang relatif bersifat homogen secara sosiologi.

Seperti halnya warga Kali Tengah di Kabupaten Sleman, warga Dukuh Gondang di Desa Balairante Kabupaten Klaten juga melakukan penolakan dengan menyatakan surat penolakan yang ditandatangani seluruh warga. Alasan penolakan lebih kurang sama dengan alasan penolakan dengan dusun lainnya, yaitu tanah sebagai sumber mata pencaharian. Keterbatasan keterampilan menjadi alasan kuat mereka untuk tidak berpindah sumber mata pencaharian, hal ini diaktualisasikan dengan kembali tinggal di rumah asal dan sebagian membangun kembali rumah dengan usaha mandiri.

Wacana lainnya yang diusulkan oleh warga Dusun Kinahrejo Kabupaten Sleman adalah dengan relokasi mandiri. Warga dengan swadaya mandiri akan membeli tanah seluas 844 M<sup>2</sup> di Dusun Balong dan akan dibagikan kepada 81 KK (masing-masing KK mendapatkan 100 M<sup>2</sup>) untuk membangun rumah. Kemudian mereka akan menerima bantuan subsidi pemerintah sebesar 30 Juta rupiah per KK untuk pembangunan rumah. Namun hak dan kepemilikan tanah termasuk bangunan yang masih tersisa di dusun Kinahrejo tetap menjadi hak milik dan warga berhak mengelola tanah tersebut.

Usulan lainnya yang berkembang dalam berbagai diskusi<sup>15</sup> adalah wacana *living harmony with disaster* dan *zero growth*<sup>16</sup> sebagai

---

<sup>15</sup> Rakornis Rekompak 29 Juli 2011 dengan tema “Mendorong Kesamaan Langkah Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Merapi”. Diakses di <http://www.rekompakjrf.org/?act=isiberita&id=297> tanggal 26 Oktober 2011.

<sup>16</sup> Termasuk jumlah penduduk, bangunan, dan infrastruktur.

salah satu alternatif pilihan yang bisa dipertimbangkan terutama bagi warga yang memilih tetap tinggal di tempat lama namun warga harus bersedia tunduk pada satu komando pemerintah dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang bermuatan pengurangan resiko bencana agar warga siap menghadapi bencana. Namun, hal ini harus memperhatikan pertumbuhan penduduk yang terjadi secara alamiah dan bagaimana kesiapan warga dalam menyelamatkan diri dan aset-aset yang dimiliki jika terjadi bencana kembali.

Koordinasi pemerintah dalam pelaksanaan relokasi juga belum optimal, aparat pemerintah tingkat bawah yang langsung berhubungan dengan warga seperti beberapa kepala desa dan kepala dusun mendukung penolakan relokasi tersebut<sup>17</sup>. Di lain sisi, pemerintah daerah mendorong agar kebijakan tersebut terlaksana. Belum adanya kesepakatan baik dari sisi pemerintah dan kesepakatan dengan warga mengindikasikan ketidaksiapan kebijakan relokasi yang belum secara optimal mengacu pada *local wisdom* yang berlaku dalam masyarakat dan alur pelaksanaan kebijakan dari pusat hingga aparat di level desa dan dusun.

## **B. Pemulihan Mata Pencaharian dan Rencana Relokasi Desa**

Pada saat ini sudah selesai tanggap darurat, ada dua hal yang sedang direncanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman, yaitu 1. Rehabilitasi dan 2. Relokasi (BPPD, Kab. Sleman). Menurut pemerintah daerah Kabupaten Sleman terdapat 9 dusun yang masuk dalam kategori KKB, yang terdiri atas 4 dusun tidak terlalu parah dan diharapkan dapat membangun kembali rumahnya, sehingga tidak perlu relokasi. Mata pencaharian penduduk sangat tergantung pada alam sekitarnya. Sehingga yang direncanakan segera direlokasi adalah mereka yang sudah tidak memiliki tanah (lahan, lokasi pemukiman),

---

<sup>17</sup> Hasil Rakornis Rekompak 29 Juli 2011

jumlah penduduk tersebut sebanyak 57 persen. Sedangkan penduduk yang akan membangun lokasi rumah secara mandiri yaitu; dengan cara membangun rumah dengan biaya sendiri sebanyak 146 rumah dan target adalah 566 rumah mandiri. Rencana Pemda kab, Provinsi dan Pusat akan mengerjakan relokasi hunian tetap HUNTAP sampai dengan tahun 2013, sebanyak 1300 KK.

Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 3.299 keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang tinggal di daerah rawan erupsi Merapi harus direlokasi. Langkah itu mengantisipasi potensi bencana serupa pada masa mendatang. "Hingga 100 tahun ke depan daerah itu diperkirakan berisiko tinggi terkena awan panas dan material aliran piroklastik panas muntahan Merapi," Potensi itu dilihat dari posisi kubah lava yang membuka ke selatan. Awan panas sangat dominan meluncur ke Kali Gendol dan Kali Opak.

Areal seluas 1.310 hektar ditetapkan dalam peta kawasan rawan bahaya dan peta terdampak langsung erupsi Badan Geologi. Rinciannya, seluas 1.300 hektar di Sleman, DIY, dan 10 hektar di Klaten, Jawa Tengah. Areal itu akan digunakan sebagai taman nasional, hutan lindung, dan rehabilitasi hutan. Areal itu ditinggali korban bencana Merapi dari DIY (korban erupsi 2.636 keluarga dan lahar dingin 46 keluarga) serta Jawa Tengah (korban erupsi 174 keluarga dan lahar dingin 443 keluarga). Data korban lahar dingin tersebut masih bersifat sementara karena bencana masih akan terjadi terjadi. Sehingga perlu dengan segera melakukan pembebasan lahan masyarakat disepakati Rp 37.500 per meter persegi. Total biaya pembebasan sebesar Rp 296,25 miliar dengan penghitungan hanya 60 persen di antaranya berupa permukiman.

Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Bambang Sulistiyanto mengatakan, warga yang memiliki rumah di areal itu juga memperoleh dana stimulus Rp 30 juta per rumah utama. "Misalnya seseorang memiliki dua rumah atau lebih di daerah itu, yang dihitung hanya satu," ujarnya. Warga diberi opsi memilih tempat tinggal di lahan yang disediakan pemerintah atau pindah secara mandiri. Pemerintah menyediakan lahan kas desa.

Pada saat ini, areal relokasi di Yogyakarta memanfaatkan lokasi hunian sementara (huntara) yang berada pada zona aman di Gondang (1.018 rumah), Kuwang (297 rumah), Plosokerep (312 rumah), Dongkelsari (194 rumah), dan Kentingan (36 rumah). Sementara huntara di zona berbahaya Banjarsari dan Jetis Sumur disiapkan cadangan tanah pengganti seluas 12,5 hektar untuk menampung 825 rumah di Desa Argomulyo. Rencana relokasi di Jawa Tengah dilakukan mandiri, dengan rumah dibangun swadaya warga dengan luas bangunan minimal 36 meter persegi. Pemerintah menyediakan tanah 100 meter persegi per keluarga ditambah fasilitas umum dan sosial 50 meter persegi. Rekonstruksi ditargetkan selesai tahun 2012. (ICH) (*Sumber : regional.kompas.com*).

Warga masyarakat, desa Kepuhharjo sekitar Kaliadem / Plosokerep mengharapkan agar tanah yang sudah turun temurun menjadi hak dan dimiliki penduduk desa tersebut agar dapat mengelola lahan. Sementara warga akan mengusahakan tempat yang sudah tersedia untuk pemukiman secara tetap dengan pola kawasan relokasi mandiri, artinya tidak tergantung kepada Pemerintah Daerah dalam penempatan di wilayah yang baru. Disamping itu, warga mengajukan permintaan agar kawasan yang sudah dimiliki sebelumnya secara turun temurun tersebut, bila dikelola negara menjadi hutan lindung, warga masyarakat masih dapat mengelolanya, untuk bercocok tanaman, seperti sayuran dan tanaman rumput bagi pakan ternak sapi. Sehingga kelangsungan hidup bagi mereka yang

sudah lama sangat tergantung apada pemeliharaan sapi dapat tetap berlanjut.

Sebaliknya dari pihak Pemerintah, menyatakan apabila kawasan sudah menjadi hutan lindung otomatis, akan menjadi hutan alam suaka nasional dimana masyarakat tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan di kawasan tersebut. Sehingga terjadi perbedaan pandangan dalam masalah kepentingan kehidupan masyarakat petani dengan kepentingan pemerintah untuk melindungi petani dari bahaya erupsi Merapi pada saat yang akan datang.

Sedangkan desa Glagaharjo sekitar Kalitengah lor, Kalitengah kidul dan Ngancar mengharapkan agar warga masyarakat tetap tinggal di desa tersebut, karena pemukiman dan mata pencaharian untuk kehidupan secara turun temurun sangat tergantung pada kawasan tersebut. Mereka beranggapan bahwa penduduk di desa di kawasan tersebut, sudah menyatu dengan kondisi Merapi sepanjang tahun, dan mereka tahu dengan pasti kapan harus menyelamatkan diri, walaupun terjadi luapan awan panas dan lahar Merapi pada suatu saat terjadi. Atas dasar ini, warga desa Glagaharjo tetap membangun rumah dan lahan pekarangan mereka yang tidak mengalami kerusakan, karena hanya tertimpa awan panas untuk persiapan bercocok tanam pajawija dan persiapan tanaman rumput bagi ternak mereka.

Pemerintah daerah sudah melakukan penutupan daerah tersebut, dengan cara tidak memberikan akses prasarana pembangunan daerah, seperti sarana kesehatan, sarana pendidikan dan sarana fasilitas jalan dan listrik. Akan tetapi tidak dihiraukan oleh penduduk setempat. Dalam hal ini ada suatu perbedaan kepentingan yang sangat mendasar, dimana penduduk setempat menganggap bahwa kehidupan dan matapencaharian sangat tergantung pada kawasan yang sudah dinyatakan berbahaya, di pihak lain Pemerintah Daerah menjalankan

kebijakan untuk melindungi (*Human right*) bagi warganya agar tidak menempati kawasan yang dianggap sangat berbahaya.

Perbedaan kepentingan tersebut diperlukan solusi agar kebijakan pemerintah yang akan di lakukan dan kehendak (tuntutan) masyarakat desa dapat di selesaikan dengan benar dan baik. Sehingga diperlukan pendalaman pemikiran secara multi dimensi (sosial, budaya, psikologi, ekonomi) tidak hanya melihat dari satu aspek saja, sehingga dapat memberi penyelesaian baik dari aspek Human Right dan Ekspektasi masyarakat secara benar.

### **C. Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan**

Berbagai upaya layanan pendidikan telah banyak dilakukan baik oleh pihak pemerintah maupun swasta serta masyarakat baik layanan pada masa tanggap darurat di pengungsian maupun setelah tinggal di huntera dan bagi sebagian warga yang telah kembali desa di rumah masing-masing. Untuk Kabupaten Sleman, pada masa tanggap darurat layanan pendidikan dilakukan melalui dua tahapan yaitu periode sebelum tanggal 5 November 2010 dan setelah tanggal 5 November 2010. Pelayanan pendidikan sebelum tanggal 5 November 2010 dilakukan di Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan, untuk layanan pendidikan di tingkat SD sampai dengan SMA baik dilakukan di pengungsian rumah penduduk, di pengungsian – sekolah dan di pengungsian tetap yang telah disediakan oleh Pemerintah kabupaten. Sementara itu pelayanan di pengungsian setelah tanggal 5 November 2010, dimana terjadi perkembangan titik lokasi secara pesat, dilakukan dengan cara titipan, di berbagai sekolah yang berada di sekitar sentral evakuasi khususnya stadion Maguwoharjo. (Lampiran 2). Pelayanan pendidikan juga dilakukan dengan cara pembentukan kelompok per barak pengungsian, yang didatangi guru kelasnya secara reguler. Di samping itu, untuk menjangkau tempat pendidikan di luar pengungsian juga diatasi dengan bantuan antar jemput siswa dengan kendaraan



(mobil) yang disediakan oleh pemerintah, bantuan buku dan alat tulis dari berbagai pihak. (Pemerintah kabupaten Sleman, 2011).

Di samping itu, bantuan pada masa tanggap darurat juga diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah berupa buku tulis, ball point, pensil, rautan, dan lain-lain yang diberikan oleh poskodiknas di delapan pengungsian setelah dilakukan pendataan. Dari berbagai perguruan tinggi seperti UGM, UNY dan UII selain memberikan perlengkapan belajar juga memberikan bantuan tenaga dengan melakukan pendampingan, belajar maupun *trauma healing*. Sementara itu organisasi swadaya masyarakat diantaranya yayasan Indonesia Bangkit memberi bantuan tenda untuk belajar. Dari kelompok aksi cepat tanggap (ACT) memberikan bantuan peralatan dan perlengkapan sekolah berupa tas, pakaian, alat tulis dan sepatu untuk 114 siswa di Sekolah Darurat SD Negeri Srunen, Desa Glagaharjo. Demikian pula Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU Yogyakarta, membagikan 1100 paket cinta untuk anak-anak dari wilayah Sleman, Magelang, dan Boyolali berupa paket pendidikan seperti tas dan buku serta 100 unit sepeda bagi anak-anak korban merapi.

Bantuan pasca bencana atau dalam tahap rekonstruksi dan rehabilitasi yang akan dilakukan oleh pemerintah, berdasarkan pada perhitungan *Human Recovery Need Assesment* (HRNA) dengan menggunakan survey pada masyarakat yang terkena dampak oleh Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) sehingga dapat diketahui kebutuhannya. Untuk bidang pendidikan program bantuan yang telah direncanakan diantaranya adalah : jaminan pembiayaan pendidikan bagi anak-anak korban bencana (beasiswa penyediaan peralatan) untuk tingkat SD sampai dengan SLTA dan sederajat. Beasiswa telah dianggarkan dalam APBD DIY 2011 dan diberikan pada sekolah untuk kemudian diteruskan pada siswa. Total anggaran dalam beasiswa yang diberikan untuk siswa korban Merapi diantaranya adalah Rp4.190.000.000 untuk siswa tingkat SD dan SMP, serta Rp

5.963.600.000 untuk siswa tingkat SMA/SMK. Rencana program kegiatan lain adalah penyediaan layanan psikologi untuk siswa, Fasilitasi pengelolaan sekolah untuk sementara (SD dan SLTP); Revitalisasi PAUD, Fasilitasi sekolah ramah anak dan pelatihan psikososial untuk guru dan kader pendidikan serta pengurangan resiko bencana berbasis sekolah dan fasilitasi sekolah penyangga (Pemerintah kabupaten Sleman, 2011).

#### **D. Upaya Penanganan Kesehatan**

Untuk warga desa yang tinggal di Cangkringan dan Pakem yang terkena dampak erupsi Merapi, seluruh keluarga tercakup dalam program Jamkesmas Merapi<sup>18</sup> (cek nama program yang benar !) namun untuk desa Di Tempel dan Ngeplak tidak semua warga mendapatkan Jamkesmas, karena pemberian Jamkesmas dilihat dari resiko bencananya. Hanya warga yang dianggap mengalami resiko dampak Merapi yang paling berat yang tercakup dalam program Jamkesmas. Skema program Jamkesmas Merapi sama dengan Jamkesmas umumnya, namun Jamkesmas Merapi ini akan berakhir bulan Desember 2011. RS yang menjadi rujukan jamkesmas: RSUD Sleman, Sardjito, Panti Rapih, RS Provinsi Gracia, PKO, sedangkan dari swastanya antara lain: RS Panti Nugrogo, Panti Rini. Untuk keberlangsungan program Jamkesmas Merapi yang akan berakhir di bulan Desember 2011, rencananya dilanjutkan dengan program JPKM

---

<sup>18</sup> Menurut informasi yang diterima, bahwa pendataan tentang Jamkesmas Merapi ini dilakukan dua kali. Pertama dilakukan bulan Oktober-November 2010, saat awal pengungsian, dan yang kedua berlangsung di bulan Mei 2011. Pendataan kedua ini dilakukan karena ternyata banyak warga desa yang tidak terdata disebabkan mereka sudah pergi menyelamatkan diri dan meninggalkan desa, sehingga saat pendataan berlangsung di desa, mereka tidak terdata. Oleh karena itu pelaksanaan pendataan yang kedua kali berlangsung di shelter dengan harapan seluruh warga desa tinggal di shelter.

(mencakup wilayah Sleman dan Cangkringan) dengan anggaran dari pemerintah daerah setempat<sup>19</sup>.

Warga shelter Balarante (Kabupaten Klaten) juga diikutkan semua dalam program Jamkesmas ‘pengembangan’ ? paska erupsi Merapi. Warga yang sebelumnya tidak masuk program Jamkesmaspun, sekarang diikutkan sebagai peserta Jamkesmas, kecuali PNS. Untuk keperluan pengobatan/pemeriksaan ke palayanan kesehatan cukup dengan menunjukkan KTP atau kartu KK saja (karena tidak dikeluarkan kartu Jamkesmas). Tanpa kartu identitas diripun dimungkinkan untuk mengakses layanan kesehatan secara gratis dengan cara menunjukkan surat keterangan dari desa yang menjelaskan bahwa warga Balarante ikut dalam program Jamkesmas pasca erupsi (meskipun di pengungsian juga buka kantor secretariat desa untuk pelayanan urusan adminsitrasi)

Dengan tercakupnya warga pengungsi Merapi ini dalam program Jamkesmas, maka dapat dikatakan kesehatan mereka lebih terjamin. Karena apabila mereka mengalami problem kesehatan dan pergi berobat ke tempat pelayanan kesehatan yang menjadi rujukan program Jamkesmas, maka mereka akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis sehingga beban pembiayaan kesehatan yang harus ditanggung keluarga menjadi berkurang.

*“Jamkesmas kalau bisa diperpanjang sampai satu atau dua tahun lagi”*

Utk program Jamkesmas kalau bisa diperpanjang sampai satu atau dua tahun lagi, sampai situasi dan kondisi dirasakan sudah

---

<sup>19</sup> Akan dilakukan pendataan ulang penduduk miskin dari BPLS, dengan hasil pendataan baru tersebut warga yang tergolong miskin akan mendapatkan kartu yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan keringanan dalam hal kesehatan dan pendidikan.

pulih kembali. Karena berobat dengan Jamkesmas gratis, ada warga yang patah tulang berobat ke rumah sakit RSUD, tidak ditarik bayaran. Begitu juga saat ada yang melahirkan saat di pengungsian maupun di shelter, dengan Jamkesmas gratis (biasanya bayar 500 ribu).

Warga korban Merapi juga tercakup dalam program Jampersal dengan persyaratan berlaku umum antara lainya ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan ke layanan kesehatan yang menjadi rujukan. Selain Jamkesmas dan Jampersal, warga korban merapi juga mendapatkan akses untuk memperoleh pelayanan pemasangan implant secara gratis.

Beberapa kegiatan kesehatan yang pernah diselenggarakan di shelter, antara lain kegiatan dari Yayasan Jantung Indonesia yang diselenggarakan di shelter Ploso Kerep. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengecek kondisi paru-paru yang hasilnya memperlihatkan tidak ada warga Ploso Kerep yang menunjukkan gejala terjangkit penyakit pernapasan akibat debu Merapi, meskipun jarak desa dengan puncak Merapi hanya sekitar 4,6 km. Kemudian di shelter Kuwang, pernah diselenggarakan pemeriksaan gratis dari mahasiswa kedokteran terkait dengan pelaksanaan program KKN fakultas kedokteran.

Khususnya terkait dengan kebutuhan bayi-balita dan juga lansia, maka di shelter Banjar Sari, pernah dilangsungkan penambahan gizi dari ACF selama 7 bulan. Ada juga bantuan PNPM untuk penambahan gizi yang masih berlangsung sampai saat ini dimana setiap anak menerima Rp.3.000,- per bulan. Sementara untuk lansia, kegiatannya diikutkan dengan kegiatan penambahan gizi balita dengan menambah iuran secara swadaya (sekitar Rp 2.000,-). Sementara di shelter Kuwang, kegiatan posyandu sudah secara rutin dilaksanakan meskipun kegiatan tersebut dipusatkan di dusun (bukan di shelter;

jarak dari shelter ke dusun sekitar 2 km). Kegiatan posyandu tersebut berlangsung sebulan sekali dan ada kunjungan dokter (datang 3 bulan sekali). Untuk pemeriksaan kehamilan dapat dilakukan di shelter karena ada 4 bidan yang tinggal di shelter Kuwang tersebut.

Demikian pula dengan di Kabupaten Klaten dan Magelang, bahwa berbagai kegiatan layanan kesehatan sudah mulai digiatkan kembali di shelter maupun “desa asal” meskipun beberapa kegiatan belum secara rutin dilakukan. Misalnya di Balarante (Kabupaten Klaten), kegiatan posyandu sudah secara rutin diselenggarakan sebulan sekali di desa. Namun saat ini menurut warga desa Balarante, pelayan kesehatan keliling (pusling) sudah jarang dilakukan di desa, yang paling sering menggelar kegiatan layanan kesehatan adalah dari pihak swasta, seperti rumah sakit swasta yang menyelenggarakan acara bakti social yang diikuti dengan pengobatan gratis, meskipun kegiatan ini pun tidak rutin diselenggarakan di desa. Di huntara Mancasan (Kabupaten Magelang) sudah berlangsung kegiatan posyandu di huntara, khususnya untuk layanan kesehatan bagi bayi-balita saja. Sedangkan untuk lansia, untuk sementara kegiatan belum dapat dilaksanakan. Ada juga bantuan obat-obatan dari puskesmas yang dibawa oleh bidan desa (dokter belum pernah berkunjung ke huntara). Selain itu, menurut warga dari huntara Mancasan ini, pernah dilakukan kegiatan pengobatan gratis yang diselenggarakan oleh Universitas Islam di Yogyakarta yang dipusatkan di desa selama dua hari dan ada kegiatan pelatihan yang khusus ditujukan pada ibu-ibu untuk mengukur tensi karena ada gejala peningkatan tensi dikalangan warga yang menjadi korban erupsi Merapi. Kepada warga Mancasan juga diiberikan alat untuk mengukur tensi.

Menurut laporan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, bahwa dari Dinas kesehatan dan Dinas Nakersos KB dalam tahap pasca bencana juga memberikan pendampingan rehabilitasi mental terhadap korban yang menderita gangguan kejiwaan/depresi.

Penanganan trauma untuk anak-anak tidak hanya dari pihak pemerintah tapi juga banyak dari pihak swasta (LSM) yang melakukan pendampingan sebagai metode trauma healing. Berdasarkan hasil FGD dengan warga di shelter Kuwang, antara lainnya menunjukkan bahwa sebagian warga dewasa membutuhkan juga penanganan trauma yang nampaknya lebih difokuskan untuk kelompok anak-anak daripada orang dewasa, padahal tidak sedikit orang dewasa yang sampai saat ini mengeluh masih merasa depresi. Perasaan takut akan banjir lahar dingin, gagal panen, kehilangan mata pencaharian masih terus membayangi pikiran sebagian warga dari shelter Kuwang. Mengenai penanganan trauma ini menurut informasi yang disampaikan oleh narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, bahwa salah satu kegiatan dari Dinas Kesehatan adalah selama masa pengungsian membuat posko-posko kesehatan dengan salah satu kegiatannya adalah trauma healing dan juga sudah melatih para kader, khususnya untuk wilayah cangkringan satu dusun 2 orang. Pelatihan yang dilakukan selama 4 hari ini bertujuan untuk menyiapkan para kader agar mampu mengatasi/menghadapi stress dan deteksi dini gangguan jiwa. Kalau ada tanda-tanda gangguan jiwa pada warga desa maka kader akan melaporkan ke puskesmas. Kegiatan ini juga dikaitkan dengan program desa siaga.

Khususnya untuk warga dusun Kali Tengah Lor dan Kali Tengah Kidul yang termasuk sebagai wilayah Kawasan Rawan Bencana (KRB) III dan serta dusun Srunen sebagai wilayah KRB II, maka kegiatan layanan kesehatan dari pemerintah tidak dilaksanakan lagi di “dusun-dusun tersebut, tetapi untuk sementara layanan kesehatan ditempatkan di shelter Banjar Sari. Dengan demikian, layanan kegiatan kesehatan dari puskesmas tidak berlangsung lagi di tiga dusun tersebut, juga petugas PLKB dan bidan desa tidak ada yang melakukan pelayanan kesehatan rutin di “dusun”. Menurut warga, petugas puskesmas tidak ada yang boleh naik ke atas termasuk bidan

desa tidak dapat (atau diijinkan) datang ke “dusun” untuk melakukan pelayanan kesehatan. Namun demikian, kalau ada warga yang datang berobat ke puskesmas atau layanan kesehatan pemerintah lainnya, tetap akan dilayani (Jamkesmas Merapi juga berlaku), misalnya balita yang kurang gizi dari dusun Kali Tengah Kidul masih mendapatkan layanan PMT di puskesmas, meskipun orang tuanya memutuskan tinggal di wilayah KRB III.

Untuk mengatasi kesenjangan pelayanan kesehatan tersebut, penduduk “dusun” tersebut berupaya secara mandiri untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan untuk warga “dusun”, seperti penimbangan bayi-balita yang dilakukan oleh kader kesehatan (ada sekitar 5 orang kader setiap dusunnya). Selain itu, pedukuhan mengeluarkan biaya sendiri untuk penambahan gizi bagi bayi-balita. Warga juga secara bergotong royong menolong warga yang sakit meskipun hal ini tidak diorganisir secara kelompok<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Sebelum erupsi Merapi, di dusun Kali Tengah Kidul memiliki beberapa kelembagaan kemasyarakatan, salah satunya karang taruna yang kegiatan antara lainnya mengumpulkan dana sosial untuk menolong kalau ada anggota yang sakit, dimana besarnya bantuan sekitar Rp. 40-50 ribu. Kemudian kegiatan PKK yang mengelola dana sosial dimana dana tersebut dapat dipergunakan untuk membantu orang sakit yang dirawat di rumah sakit (di beri bantuan sekitar 50 ribu). Namun setelah erupsi Merapi, kegiatan-kegiatan ini belum beraktifitas seperti biasa karena para anggotanya masih sibuk menata kehidupannya.





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **- Mata Pencaharian**

Undang undang no 24 tahun 2007 ini disatu sisi merupakan kebijakan pemerintah yang bersifat mengikat bagi pemerintah itu sendiri dan oleh karena itu pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan bencana dengan memperhatikan hak-hak masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, di sisi lain undang undang tersebut memuat hak masyarakat dalam penanggulangan bencana. Adalah hak setiap orang yang terkena bencana untuk mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Apabila hak terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dapat terpenuhi secara maksimal, maka hal tersebut dapat mendorong atau meningkatkan produktivitas kerja dan berkontribusi terhadap pembangunan kembali kondisi perekonomian desa yang porak poranda akibat bencana Merapi. Situasi ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan sosial diantaranya adalah meningkatkan kualitas hidup sekaligus mengurangi derajat kemiskinan.

Pada kenyataannya bencana erupsi masih akan tetap ada, meskipun tersedia bahan pangan dan uang, salah satu sebab adalah bencana datang secara tiba-tiba dan tidak bisa diramalkan, dan yang bisa di lakukan adalah berusaha membangun bagi kepentingan bersama dan menciptakan kebersamaan antar warga masyarakat. Disamping itu, diharapkan agar masyarakat mampu melakukan tindakan yang diperlukan memecahkan masalah secara mandiri. Masalah tersebut menjadi lebih berat apabila sebagian besar penduduk belum memiliki kesadaran masalah lingkungan kependudukan. Fakta

tersebut menunjukkan bahwa “kemiskinan pengetahuan” merupakan masalah yang kompleks dan rumit. Masyarakat memerlukan dorongan dan bantuan agar mampu mengubah orientasi mereka dari sekedar hidup mengandalkan pada alam sekelilingnya dan curah hujan ke perilaku yang lebih maju mengikuti perkembangan jaman.

Potensi alam daerah bencana erupsi yang perlu mendapat prioritas utama adalah di kawasan pertanian, karena sebagian besar penduduk hidup dari sektor pertanian. Sementara sektor industri kecil dan jasa dapat terus dikembangkan, terutama jenis industri pengolahan kekayaan alam, dan pengolahan hasil-hasil pertanian. Untuk menunjang sektor - sektor tersebut, maka perkembangan sektor perhubungan darat, listrik dan air minum perlu ditingkatkan. Berbagai kegiatan pembangunan prasarana telah dilaksanakan seperti pembangunan prasarana perhubungan, fasilitas air irigasi, dan sarana sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi masalah yang belum dapat terpecahkan adalah masalah pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan (*ringbelt*) dengan wilayah perkotaan sekitarnya, seperti tersedianya berbagai sarana dan prasarana ekonomi yang relatif yang lebih baik bagi keduanya.

#### – **Pendidikan**

Penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar termasuk layanan pendidikan dasar bagi anak-anak korban erupsi Merapi merupakan salah satu amanah yang telah diatur baik dalam tataran nasional maupun internasional yang menegaskan bahwa semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus yang mengalami kecacatan fisik, kecacatan kejiwaan (traumatis) maupun termarginalisasi akibat bencana tetap berhak mendapatkan pendidikan yang layak.

Erupsi Merapi yang terjadi pada akhir tahun 2010, telah memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan. Rusaknya sarana dan

prasarana pendidikan, digunakannya bangunan sekolah sebagai tempat pengungsian, guru, siswa dan keluarganya yang menjadi korban bencana menyebabkan terganggu bahkan terhentinya kegiatan belajar mengajar (KBM), terutama di daerah-daerah yang termasuk dalam kawasan rawan bencana, terutama (KRB) kategori III. Dengan demikian diperlukan layanan pendidikan darurat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah Kabupaten Sleman maupun Kabupaten Klaten dan Magelang beserta stakeholder lain yaitu Perguruan Tinggi, pihak swasta, maupun LSM dan berbagai organisasi termasuk organisasi keagamaan secara spontan telah memberikan kontribusi dan bantuan bagi layanan pendidikan untuk korban erupsi Merapi baik dalam bentuk bahan-bahan sarana pendidikan seperti alat tulis, tas sekolah maupun pendampingan dan penyelenggaraan *trauma healing*.

Secara umum, bantuan layanan pendidikan pada masa tanggap darurat di pengungsian telah dilakukan sesuai dengan tahapan normatif pendidikan darurat yaitu pada minggu-minggu pertama setelah bencana, usaha pendidikan lebih terfokus pada program rekreasi, dan *trauma healing*. Pada tahap berikutnya, anak-anak korban bencana dapat mulai mengikuti proses belajar-mengajar yang lebih formal dengan "menitipkan" peserta didik di sekolah di lingkungan yang berada di sekitar pengungsian. Kemudian, pada tahap berikutnya yaitu tahap rekonstruksi (setelah tinggal di hunian atau telah kembali ke rumah masing-masing), upaya layanan pendidikan harus dikembalikan pada pemulihan terpenuhinya akses layanan pendidikan (dasar) formal seperti sedia kala sebelum terjadi bencana erupsi Merapi. Meskipun demikian, belum semua persoalan layanan pendidikan bagi warga korban Merapi dapat terselesaikan dengan baik.

Hingga satu tahun berlalunya bencana sampai saat ini, menunjukkan kecenderungan bahwa pemerintah belum mempunyai kebijakan dan konsep yang jelas terkait dengan layanan pendidikan di daerah bencana. Berkaitan dengan sekolah yang rusak di wilayah KRB

-III pemerintah menyatakan akan melakukan relokasi ke tempat aman, namun upaya ini belum berhasil sepenuhnya. Kasus yang ada di SD Srunen, Cangkringan yang sampai sekarang polemiknya juga belum berakhir, menguatkan kecenderungan tersebut. Masyarakat tetap menginginkan untuk bersekolah di SD Srunen yang berada di Dusun Srunen, agar jarak antara sekolah dengan rumah tidak terlalu jauh. Sedangkan selama ini, jarak SD Srunen (darurat) yang berada di shelter Banjarsari, cukup jauh yaitu sekitar 8-9 kilometer. Sementara pemerintah juga tidak berbuat banyak bahkan melarang guru untuk melakukan proses kegiatan pendidikan.. Akibatnya murid yang jadi korban, karena selama beberapa pekan tidak ada kegiatan belajar mengajar, sampai ada beberapa relawan membantu memberikan pendampingan dan pelajaran sampai ada uluran dari pihak pemerintah.

Akibat belum adanya kejelasan konsep kebijakan pendidikan, anak-anak yang masih sekolah semakin menjadi korban. Selain menjadi korban bencana, mereka juga menjadi korban tidak mendapatkan layanan pendidikan, akibat tarik menarik kepentingan. Dengan demikian, sudah semestinya, pemerintah perlu mempunyai konsep dan kebijakan yang jelas dan tegas tentang model pendidikan di daerah bencana. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah meratifikasi deklarasi universal tentang hak asasi manusia serta konvensi Dakar tentang pendidikan untuk semua termasuk perspektif pendidikan di daerah bencana. Dalam konvensi, digaribawahi bahwa negara harus bertindak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak-hak anak seperti hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak atas pendidikan.

Berdasarkan berbagai permasalahan layanan pendidikan bagi anak-anak korban erupsi Merapi yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dikemukakan pokok-pokok pikiran yang diusulkan sebagai alternatif rekomendasi bagi pemenuhan hak atas layanan pendidikan (dasar) bagi korban bencana sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dasar, khususnya bagi anak-anak sekolah yang tinggal di hunta yang berlokasi jauh dengan sekolah (SD), karena belum semua hunta dibangun sekolah SD. Kasus hunta Banjarsari yang telah dilengkapi dengan bangunan SD, tetapi tidak lagi dimanfaatkan karena telah ditinggalkan sebagian besar warga kembali ke dusun Srunen, Kali Tengah Lor dan Kidul dan lebih memilih bersekolah di SD terdekat dengan pemukiman, perlu dilakukan mediasi misalnya dengan memberikan fasilitas kendaraan antar jemput seperti halnya waktu tinggal di hunta.
2. Relokasi sekolah yang bertujuan untuk melindungi warga / siswa perlu menggunakan pendekatan partisipatif yaitu melalui dialog yang intensif dengan warga. Apabila kebijakan relokasi sekolah mendapatkan penolakan keras di lapangan, maka seharusnya pemerintah tidak menerapkan ketentuan yang kaku, karena sebagaimana dikemukakan dalam Rencana Aksi RR Erupsi Merapi di Provinsi Jawa Tengah dan DIY, Tahun 2010 – 2013 bahwa: “kebijakan relokasi merupakan pendekatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya : masyarakat harus difasilitasi untuk berdialog dengan pemerintah sebagai regulator dan pengambilan keputusan. Relokasi diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat
3. Meningkatkan koordinasi dalam pemberian bantuan. Kasus rehabilitasi SD Negeri Srunen oleh pihak swasta dengan niat mulia tetapi tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sleman, (Dinas Pendidikan) menyebabkan dimanfaatkannya bangunan tersebut oleh siswa tetapi tidak didukung oleh pemerintah Kabupaten Sleman, karena

merupakan kawasan rawan bencana (KRB-3), sehingga tidak ada guru yang melakukan kegiatan belajar.

4. Dalam rangka pemenuhan hak atas layanan pendidikan bagi anak-anak korban merapi, perlu diterapkan kebijakan khusus yaitu dengan menerapkan pendidikan inklusif, melalui pendekatan yang eksklusif, misalnya dengan mendatangkan guru kunjung (model *home schooling*) bagi anak-anak yang menderita cacat sebagai korban erupsi Merapi
5. Segera merealisasikan kurikulum kebencanaan yang sudah disiapkan oleh Kemdiknas, terutama difokuskan pada sekolah-sekolah yang rawan mengalami bencana.

#### - Kesehatan

Bencana erupsi Merapi menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat sekitar merapi, seperti yang dialami oleh warga dari ke lima shelter ini, akibat dari hilangnya nyawa, rusaknya harta benda, hancurnya mata pencaharian dsb. yang berdampak pada menurunnya kualitas hidup, telah sering dikemukakan dan dibahas dalam berbagai forum ilmiah maupun media massa. Pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat bahu membahu berupaya mengatasi segala permasalahan yang ditimbulkan oleh bencana merapi ini, namun demikian belum semua persoalan warga korban merapi dapat terselesaikan secara tuntas. Hasil kajian ini mengidentifikasi adanya persoalan yang terkait dengan pemanfaatan dan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan. Pada bagian akhir dari tulisan ini implikasi atau konsekuensi dari persoalan-persoalan tersebut menjadi catatan penting dengan harapan dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam merumuskan rekomendasi penanggulangan kemiskinan sebagai dampak dari erupsi Merapi yang ditinjau dari aspek kesehatan.

Dapat dikatakan bahwa persoalan kesehatan yang dihadapi oleh warga yang bermukim di shelter dengan warga yang sudah memutuskan untuk kembali ke 'desa' ada perbedaan meskipun masih terkait dengan persoalan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan. Persoalan yang dihadapi oleh warga yang bermukim di shelter adalah mereka membutuhkan tenaga medis (disebutkan dokter) yang dapat memberikan layanan kesehatan di posko-posko yang berada di shelter secara rutin. Menurut warga kegiatan layanan kesehatan yang ada di shelter saat ini lebih bersifat insidental saja (pelayanan kesehatan tidak dilakukan secara berkala) padahal para warga khususnya kelompok lansia sangat membutuhkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan dekat jaraknya. Dengan berfungsinya posko-posko kesehatan di shelter secara optimal dapat mengurangi biaya transportasi yang harus dikeluarkan warga apabila merujuk ke layanan kesehatan seperti puskesmas atau ke dokter/mantri praktek swasta yang jaraknya relative jauh dari shelter. Adanya pendampingan *trauma healing* juga dibutuhkan oleh sebagian warga dewasa yang masih bermukim di shelter mengingat mereka sampai saat ini masih merasakan depresi/trauma baik karena memikirkan kehidupannya yang sudah jauh berubah dan juga mengingat peristiwa erupsi Merapi yang sangat mencekam. Kegiatan *trauma healing* yang berlangsung saat ini, menurut para warga, lebih difokuskan kepada anak-anak, sementara kelompok dewasa tidak menjadi target sasaran, padahal mereka juga membutuhkan. Terkait dengan persoalan ini, pihak pemerintah maupun swasta perlu juga mempertimbangkan kehadiran dari para psikolog di shelter-shelter untuk secara rutin membantu warga dewasa mengatasi keluhan depresi/stress agar tidak berkembang ke arah yang negatif. Pendampingan semacam ini sangat membantu warga untuk lekas pulih dari depresi/stress.

Adapun persoalan kesehatan yang dihadapi oleh warga dari dusun Kali Tengah Lor, Kali Tengah Kidul, Srunen dari shelter

Banjarsari, yang saat ini sudah menetap di 'desa asal' mereka, dapat dikatakan lebih kompleks. Karena 'desa' mereka termasuk dalam wilayah KRB III, maka seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, program pelayanan kesehatan dari pemerintah setelah erupsi Merapi tidak dapat dilangsungkan/ masuk ke desa-desa tersebut. Keputusan pelarangan ini tentunya diambil berdasarkan pertimbangan keamanan daripada warga yang bermukim di wilayah tersebut. Meskipun demikian terhentinya akses penduduk untuk mendapatkan layanan kesehatan di 'desa' mereka juga dapat menimbulkan konsekuensi yang cukup serius untuk warga, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi keuangan (biaya transportasi untuk berobat). Dari sisi kesehatan, antara lain konsekuensinya adalah warga yang membutuhkan pengobatan tidak dapat segera tertangani dan warga harus keluar desa untuk mencari layanan kesehatan yang terdekat. Hal ini dapat membebani warga karena harus mengeluarkan uang transport tambahan padahal situasi kehidupan mereka saat ini belum normal. Banyak warga yang kehilangan mata pencaharian dan berkurang penghasilannya karena sawahnya rusak, ternaknya mati, dsb. Perlu segera mencari jalan keluar untuk mengatasi persoalan ini sebelum terjadi peristiwa yang lebih serius yang semakin membebani kehidupan masyarakat di tiga dusun tersebut dan pada gilirannya berimbas kepada pihak pemerintah daerah juga. Terhentinya system pelayanan kesehatan dapat menurunkan derajat kesehatan dan berpotensi menyebabkan terjadinya KLB.

Salah satu factor yang perlu menjadi pertimbangan dalam memutuskan kebijakan bagi warga yang menetap di desa yang termasuk sebagai wilayah KRB III adalah merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk memenuhi hak setiap warga masyarakat mendapatkan akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, antara lainnya layanan kesehatan dasar. Hak ini dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang



Penanggulangan Bencana pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar<sup>21</sup>. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana pasal 28 ayat (1) bahwa bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf d, diberikan kepada korban bencana dalam bentuk penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, dan pelayanan kesehatan. Bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.

---

<sup>21</sup>[http://www.gitews.org/tsunami-kit/en/E6/further\\_resources/national\\_level/peraturan\\_kepala\\_BNPB/Perka%20BNPB%207-2008\\_Tata%20Cara%20Pemberian%20Bantuan%20Pemenuhan%20Kebutuhan%20Dasar.pdf](http://www.gitews.org/tsunami-kit/en/E6/further_resources/national_level/peraturan_kepala_BNPB/Perka%20BNPB%207-2008_Tata%20Cara%20Pemberian%20Bantuan%20Pemenuhan%20Kebutuhan%20Dasar.pdf)



## DAFTAR PUSTAKA

- Brown, Lester R. Dkk. 1990. *Dunia Di Tepi Jurang Kebinasaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Li, Tania Murray (2002). *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia* (edisi terjemahan). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Murtiningsih, S. 2006. '*Transisi Demografi dan Pembangunan Sumber Daya Manusia*'. Presentasi pada Pendidikan dan Latihan Tenaga Kerja. Pusat Penelitian Kependudukan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Pemda Sleman (2011). Laporan Komando Tanggap Darurat Penanganan Bencana Gunung Merapi, 2011
- (2010), Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Erupsi Merapi 2010
- Rofi, Abdur (2006) "Kematian Terkait Gempa Bumi 27 Mei 2006 di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah". *Populasi, Buletin Kependudukan Dan Kebijakan*, Vol.17, No.2. 2006.
- Saputra, Muda (2006). "Kondisi Penduduk dan Kependudukan Di Kabupaten Nias Dan Nias Selatan Pasca Tsunami 2004 dan Gempa Bumi 2005". *Warta Demografi*, No. 2, 2006. Lembaga Demografi – Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Tjiptoherianto, Prijono., 1999. *Keseimbangan Penduduk, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Wichester, Simon. 2004. *Krakatoa. The Day The World Exploded 27 August 1883*. London : Penguin Books.
- Widodo, YB. (2007) *Dampak Bencana Kekeringan terhadap Peluang Kesejahteraan Penduduk*. Jurnal POPOLASI Vol 18 No.1 Tahun 2007 – ISSN 0853-0262. Yogyakarta; PSK – Univ. Gadjah Mada
- Widodo, YB. (2007) *Urban Rural Disparities And The Regeneration Of Rural Livelihoods In Java -Indonesia*. Paper Presented at the Asian Rural Sociological Association (ARSA) 3rd International Conference on: Globalization, Competitiveness and Human Insecurity in Rural Asia, 8-10th August 2007, Beijing – China..
- Pemerintah Kabupaten Sleman, 2010, Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Erupsi Merapi 2010
- Pemerintah Kabupaten Sleman, 2011, Laporan Komando Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Gunung Merapi.

### **Website**

- <http://www.bappenas.go.id/bencana> , Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2010-2013, Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, diunduh, 2 Oktober 2011.
- <http://www.jogjatv.tv/berita/16/09/.../penyelesaian-sdn-srunen-di-pilih-2-opsi>
- <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/09/17/260165/289/101/-Pembab-Sleman-Tolak-Kirim-Guru-ke-SD-Srunen>, diunduh 2 Oktober 2011.

[http://www.bnpb.go.id/website/asp/berita\\_list.asp?id=203](http://www.bnpb.go.id/website/asp/berita_list.asp?id=203), Usulan Relokasi 73 Sekolah di Kawasan Rawan Bencana Wilayah DIY, diunduh 2 Oktober 2011

<http://www.krjogja.com/krjogja/news/detail/59684/P2TP2A.Klaten.Waspada.Perdagangan.Anak.html>, diunduh 3 Oktober 2011

<http://poskodiknas.com/wp-/content/upload//2010/11/5.jpg>

Peta sebaran sekolah di zona bahaya Merapi wilayah DIY



## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Sekolah Yang Rusak Akibat Erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Sleman

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah
I	Jenjang TK	
1	TK Citra Rini	Batur Kepuharjo Cangkringan
2	TK Kunci Mekar	Petung Kepuharjo Cangkringan
3	TK ABA Ngrangkah	Ngrangkah Umbulharjo
4	TK Puspitasari	Glagahmalang Glagaharjo
5	TK Basari	Srunen Glagaharjo Cangkringan
II	Jenjang Sekolah Dasar ( SD )	
1	SD Bronggang	
2	SD Pelung	Argomulyo Cangkringan
3	SD Srunen	Petung Kepuharjo Cangkringan
4	SD Batur	Srunen Glagaharjo Cangkringan
5	SD Gungan	Gungan Umbulharjo Cangkringan
6	SD Pangukrejo	Pangukrejo Umbulharjo Cangkringan
7	SD Glagaharjo	Glagaharjo Cangkringan
III	Jenjang SMP dan SMA/SMK	
1	SMK Muh.Cangkringan	
2	SMKN Cangkringan	

Sumber : Pemerintah Kabupaten Sleman

